



BUPATI BANDUNG BARAT
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT

NOMOR 27 TAHUN 2026

TENTANG

STRATEGI SANITASI TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa sanitasi merupakan salah satu aspek dasar pelayanan publik yang berperan penting dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, kualitas lingkungan permukiman, serta kesejahteraan masyarakat, sehingga perlu dilakukan pembangunan sanitasi secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan di Kabupaten Bandung Barat;
- b. bahwa dalam rangka mendukung percepatan peningkatan akses layanan sanitasi yang layak dan aman serta sebagai pedoman perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sanitasi daerah, perlu disusun Strategi Sanitasi Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025–2029;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf b Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi, Strategi Sanitasi Kabupaten disusun oleh Pemerintah Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Strategi Sanitasi Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);



3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
5. Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 389);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 193);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 4);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 4);
10. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 60 Tahun 2019 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2019 Nomor 60);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STRATEGI SANITASI TAHUN 2025 - 2029.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Bandung Barat.
2. Bupati adalah Bupati Bandung Barat.
3. Sanitasi adalah segala upaya yang dilakukan untuk menjamin terwujudnya kondisi yang memenuhi persyaratan Kesehatan melalui pembangunan sanitasi
4. Pembangunan Sanitasi adalah upaya peningkatan kualitas dan perluasan pengelolaan persampahan, air limbah domestik dan drainase lingkungan secara terpadu dan berkelanjutan melalui peningkatan perencanaan, kelembagaan, pelaksanaan dan pengawasan yang baik.
5. Strategi Sanitasi Kabupaten Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut SSK Tahun 2025-2029 adalah suatu dokumen perencanaan yang berisi kebijakan dan strategi pembangunan sanitasi Tahun 2025-2029 yang disusun secara lengkap, luas, dan menyeluruh.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya SSK Tahun 2025-2029 untuk memberikan arah yang jelas, tegas, dan komprehensif bagi Pembangunan Sanitasi di Daerah.
- (2) Pembentukan Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mewujudkan pembangunan Sanitasi yang sistematis, terintegrasi, dan berkelanjutan.
- (3) SSK Tahun 2025-2029 berfungsi sebagai:
 - a. instrumen kebijakan pembangunan Sanitasi daerah jangka menengah;
 - b. rencana peningkatan kinerja pelayanan Sanitasi yang menerapkan pendekatan kelembagaan;
 - c. media internalisasi program dan kegiatan ke dalam program dan kegiatan perangkat daerah yang menangani sektor Sanitasi; dan
 - d. acuan pengelolaan anggaran bagi program peningkatan kinerja pelayanan Sanitasi.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. visi dan misi pembangunan Sanitasi Daerah Tahun 2025-2029;
- b. sasaran dan arah kebijakan pembangunan Sanitasi Daerah Tahun 2025-2029;
- c. rencana tindak pembangunan Sanitasi Daerah Tahun 2025-2029; dan
- d. kerangka pendanaan, kelembagaan, dan regulasi pembangunan Sanitasi Daerah Tahun 2025-2029.



Pasal 4

- (1) SSK Tahun 2025 - 2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. Bab I : Pendahuluan;
 - b. Bab II : Profil Sanitasi;
 - c. Bab III : Kerangka Pengembangan Sanitasi;
 - d. Bab IV : Strategi Pengembangan Sanitasi;
 - e. Bab V : Kondisi Faktual; dan
 - f. Bab VI : Program, Kegiatan, dan Indikasi Pendanaan Sanitasi.
- (2) Ketentuan mengenai isi dan uraian sistematika SSK Tahun 2025–2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Program, kegiatan dan indikasi pendanaan SSK Tahun 2025-2029 yang telah dilaksanakan pada Tahun 2025 sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, diakui dan dinyatakan sah sebagai bagian dari capaian target SSK Tahun 2025-2029.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Ngamprah
pada tanggal 16 Juli 2026
BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

JEJE RITCHIE ISMAIL

Diundangkan di Ngamprah
pada tanggal 16 Juli 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT,

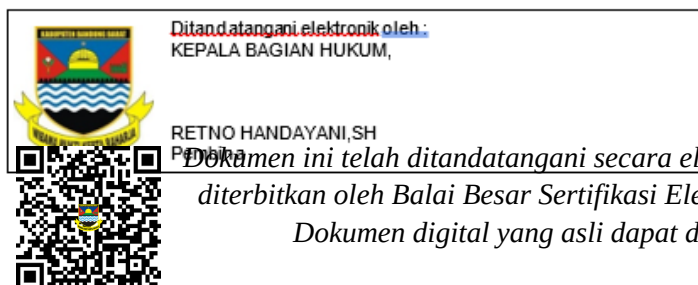
ttd.

ADE ZAKIR

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2026 NOMOR 27

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT



Ditandatangani elektronik oleh:
KEPALA BAGIAN HUKUM,

RETNO HANDAYANI, SH
Penanda

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang
diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara.

Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code.

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT
NOMOR 27 TAHUN 2026
TENTANG
STRATEGI SANITASI TAHUN 2025-2029

STRATEGI SANITASI
KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2025-2029



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Saat ini secara umum Indonesia dengan kondisi sanitasi masih berada diposisi bawah karena pemahaman penduduknya mengenai pentingnya sanitasi masih rendah. Pembangunan Sanitasi di Indonesia masih berada diurutan terbawah di antara negara-negara tetangga di Asia Tenggara. Disamping itu, memperhatikan kondisi sanitasi saat ini, pembangunan sanitasi perlu keberlanjutan dan keterpaduan atau integrasi dengan berbagai program agar hasil pembangunan sanitasi di daerah dapat lebih baik. Untuk itu penetapan target pembangunan sanitasi mutlak diperlukan agar upaya pembangunan tersebut dapat diselenggarakan dengan lebih terarah, dan secara berkala atau periodik sejalan perubahan perkembangan kondisi dan perubahan kependudukan sehingga perlu dilakukan pemutakhiran.

Selain itu pembangunan bidang sanitasi di berbagai daerah selama ini belum menjadi prioritas, padahal sanitasi merupakan salah satu pelayanan dasar yang sangat penting yang dapat berdampak pada kualitas kesehatan masyarakat yang pengaruhnya pada penyediaan anggaran kesehatan. Masyarakat dengan kehidupan sehat dapat memiliki produktivitas kerja yang baik.





Persoalan sektor sanitasi dihadapi oleh semua Kabupaten atau Kota di Indonesia, termasuk Kabupaten Bandung Barat. Kurangnya dukungan infrastruktur sanitasi yang memadai serta masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk melakukan pola hidup bersih menjadi salah satu penyebab rendahnya kualitas dan kuantitas sanitasi, baik dalam hal air limbah, persampahan, maupun drainase permukiman. Sanitasi layak merupakan kebutuhan dasar manusia dan menjadi salah satu capaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) pada sektor lingkungan hidup untuk memastikan masyarakat dapat mencapai akses air bersih dan sanitasi layak.

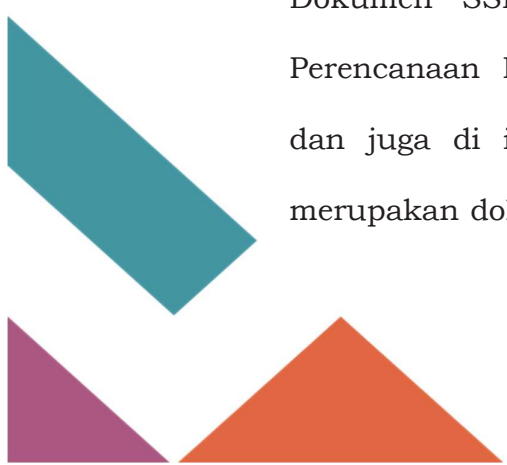
Salah satu upaya implementatif yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian dan mengatasi persoalan sanitasi di Kabupaten Bandung Barat antara lain melalui pemutakhiran dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) serta menerbitkan berbagai regulasi terkait sanitasi. Hal tersebut sangat penting untuk dapat menjadi dasar dalam menetapkan kebijakan dan strategi dalam rangka meningkatkan kualitas sanitasi di Kabupaten Bandung Barat, serta akselerasi pencapaian target akses sanitasi aman, selaras dengan target yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Bandung Barat, RPJMD Provinsi Jawa Barat, RPJMN, maupun dengan target SDGS di sektor sanitasi.





Strategi Sanitasi Kabupaten Bandung Barat (SSK) adalah dokumen rencana strategis jangka menengah yang berisi kebijakan dan strategi pembangunan sanitasi secara komprehensif pada tingkat Kabupaten yang disusun untuk penanganan sektor sanitasi yang didasarkan atas kondisi eksisting sanitasi di Kabupaten Bandung Barat. Dokumen SSK merupakan dokumen perencanaan strategis yang berisi profil sanitasi, kebijakan dan strategi serta program kegiatan pembangunan sanitasi secara komprehensif untuk memberikan arah yang jelas, tegas dan menyeluruh bagi pembangunan sanitasi di Kabupaten/kota. Dokumen SSK ini merupakan dokumen wajib yang harus disusun oleh Pemerintah Daerah dan berisi program dan kegiatan untuk lima tahun kedepan dalam mencapai target penyediaan sanitasi yang layak bagi masyarakat sesuai dengan target RPJMN.

Kedudukan SSK terhadap Dokumen Perencanaan Daerah adalah Dokumen SSK harus sejalan dengan dokumen RPJMD yang merupakan rujukan terhadap program dan kegiatan di Daerah, begitu pula dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Dokumen SSK diinternalisasikan ke dalam dokumen Perencanaan Daerah (RPJMD, RKPD, Renstra OPD, Renja OPD) dan juga di internalisasikan dengan dokumen anggaran. SSK merupakan dokumen hasil penjabaran operasional dari RPJMD





khususnya yang berkaitan dengan pembangunan sektor sanitasi yang terintegrasi, komprehensif, berkelanjutan dan komprehensif. Adapun Dokumen RTRW digunakan sebagai acuan penyusunan SSK, dimana untuk rencana ke depannya perkiraan dan proyeksi jumlah penduduk dan pembangunan infrastruktur sanitasi harus diperhitungkan dengan mengacu dan tidak bertentangan dengan kebijakan-kebijakan dalam RTRW.

Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) yang telah disepakati akan diterjemahkan kedalam rencana tindak tahunan (*annual action plan*). Isinya, informasi lebih rinci dari berbagai usulan kegiatan (program atau proyek) pengembangan layanan sanitasi yang disusun sesuai tahun rencana pelaksanaannya. Didalam penyusunan Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) Kabupaten Bandung Barat ini, merupakan bagian ketiga dari rangkaian proses pengembangan Strategi Sanitasi Kabupaten yang terdiri dari lima tahapan, yakni :

1. Pengenalan program dan pembentukan Pokja Sanitasi,
2. Penyusunan Buku Putih Sanitasi Kabupaten,
3. Penyusunan dokumen SSK, yang kemudian dilanjutkan dengan tahap
4. Penyusunan rencana tindak sanitasi, dan
5. Pemantauan atau Monitoring, serta Evaluasi.

Strategi sanitasi kabupaten juga dibutuhkan sebagai



pengikat Perangkat Daerah (PD) dan para pelaku pembangunan sanitasi lainnya untuk dapat terus bersinergi mengembangkan layanan sanitasi kabupatennya. Setelah disepakati, Strategi Sanitasi Kabupaten akan diterjemahkan ke dalam rencana tindakan tahunan (annual action plan). Isinya, informasi lebih rinci dari berbagai usulan kegiatan (program atau proyek) pengembangan layanan sanitasi kabupaten yang disusun sesuai tahun rencana pelaksanaannya.

Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) Kabupaten Bandung Barat berisi visi, misi, dan tujuan pembangunan sanitasi Kabupaten Bandung Barat berikut strategi-strategi pencapaiannya. Tiap-tiap strategi kemudian diterjemahkan menjadi berbagai usulan kegiatan berikut komponen-komponen kegiatan indikatifnya.

Cakupan suatu Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) akan mencakup strategi dan usulan kegiatan pengembangan sektor sanitasi yang terdiri dari :

1. Layanan sub sektor air limbah domestik,
 2. Layanan sub sektor persampahan,
 3. Layanan sub sektor drainase lingkungan,
 4. Layanan sub sektor air bersih, serta aspek Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).
- 



Pemerintah Kabupaten Bandung Barat telah menyusun dokumen strategi sanitasi kabupaten (SSK) pada tahun 2020 dengan periode strategi sanitasi kabupaten (SSK) 2020-2025 , namun sejalan dengan pertumbuhan dan perkembangan wilayah dan penduduk, perlu adanya review atau pemutakhiran dokumen SSK Kabupaten Bandung Barat di tahun 2024 ini.

Landasan dasar pemutakhiran SSK oleh karena adanya perubahan di lapangan terhadap ruang fisik, infrastruktur, kependudukan yang diluar ekspektasi dalam perencanaan, dan kebijakan tata ruang sehingga terjadi distorsi dengan dokumen perencanaannya. Pemutakhiran juga merupakan pemantapan dari perencanaan SSK periode sebelumnya yang telah lewat masa periode berlakunya, pemutakhiran dilakukan untuk menjaga keberlanjutan perencanaan sanitasi dan mengakomodir pencapaian target *Universal Access*.

Pemutakhiran Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) Kabupaten Bandung Barat yang berisi tentang pemetaan sanitasi skala kabupaten, kerangka pengembangan dan pentahapan pembangunan sanitasi dan strategi, serta kebutuhan program/kegiatan pembangunan sanitasi di kabupaten hingga 5 (lima) tahun kedepan. Oleh karena itu, dalam rangka menjamin terselenggaranya pelayanan sanitasi yang berkelanjutan, yang melibatkan berbagai sektor dan instansi terkait di Kabupaten, serta

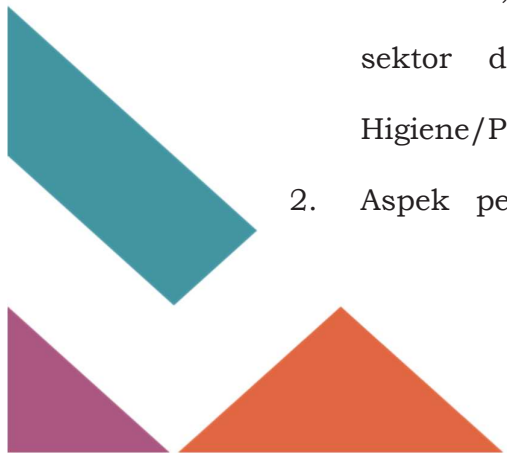


untuk lebih mengefektifkan dan mengefisienkan penggunaan berbagai sumber pendanaan maka perlu dilakukan sinkronisasi dan koordinasi pembangunan sanitasi, baik dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi.

Adapun kondisi sanitasi disusun berdasarkan data primer dan sekunder yang tersedia pada perangkat daerah dan stakeholders terkait. Untuk melengkapi data tersebut dilakukan beberapa kajian antara lain :

1. Study Environmental Health Risk Assesment (EHRA),
2. Kajian kelembagaan, kebijakan dan keuangan,
3. Kajian keterlibatan pihak swasta dalam pengelolaan sanitasi,
4. Kajian sanitasi dari lembaga pendidikan, dan
5. Kajian keterlibatan media serta kajian mengenai peran serta masyarakat dalam pembangunan sanitasi.

SSK Kabupaten Bandung Barat tersebut merupakan salah satu dokumen yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan pembangunan yang terjabarkan pada dua (2) aspek yaitu :

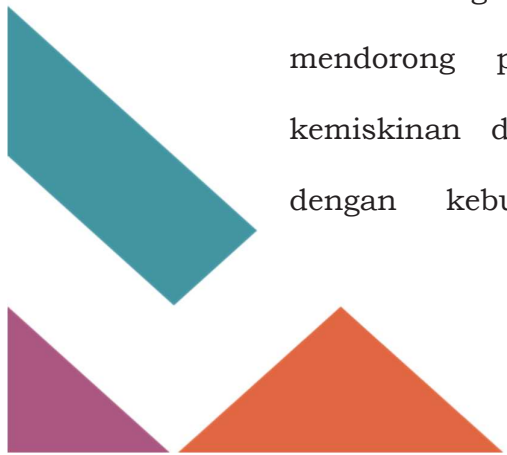
1. Aspek Teknis, yaitu mencakup strategi dan usulan kegiatan pengembangan mulai dari layanan sub sektor Air limbah Domestik, layanan sub sektor Persampahan, layanan sub sektor drainase lingkungan dan layanan sub sektor Higiene/PHBS;
 2. Aspek pendukung, yaitu mencakup strategi dan usulan
- 



kegiatan pengembangan sanitasi meliputi kebijakan daerah dan kelembagaan, keuangan, komunikasi, keterlibatan pelaku bisnis, pemberdayaan masyarakat, dan monitoring.

Adapun tiap aspek yang dikaji dalam muatan SSK Pemutakhiran Kabupaten Bandung Barat meliputi aspek teknis dan aspek pendukung (non teknis). Aspek teknis; mencakup strategi dan usulan kegiatan pengembangan sektor sanitasi yang terdiri dari: (a) layanan sub sektor air limbah domestik (b) layanan sub sektor persampahan (c) subsektor drainase lingkungan. Sementara aspek pendukung (non teknis) mencakup strategi dan usulan kegiatan pengembangan komponen berupa: (a) kebijakan dan kelembagaan (b) keuangan (c) komunikasi (d) keterlibatan sektor swasta (e) pemberdayaan masyarakat (f) monitoring dan evaluasi.

Kegiatan pemutakhiran SSK pada dasarnya adalah proses pemutakhiran data terkait profil sanitasi serta mengidentifikasi sejauh mana kemajuan yang telah dicapai dalam pembangunan sanitasi dari rencana yang telah disusun di dalam SSK sebelumnya sekaligus sebagai sarana untuk mengakomodir dan merumuskan kebutuhan pembangunan sanitasi kabupaten, yang secara spesifik sesuai dengan karakteristik dan potensi sehingga mampu mendorong pembangunan ekonomi lokal, penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kualitas pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan nyata khususnya dalam sektor sanitasi.





Diharapkan SSK Pemuktahiran dapat memberikan informasi mengenai kemajuan yang telah dicapai Kabupaten Subang dalam pembangunan sanitasi berdasarkan rencana yang disusun sebelumnya.

Penyusunan strategi pembangunan sanitasi tersebut selanjutnya akan sepenuhnya tergantung dari informasi yang dihasilkan dari proses ini dengan mempertimbangkan perkembangan atas kebijakan-kebijakan baru yang ada terkait sanitasi, terutama kebijakan ditingkat Pusat dan juga Provinsi mengingat dalam prosesnya hasil pemutakhiran SSK merupakan hasil konsolidasi dan integrasi dari berbagai dokumen perencanaan terkait sektor sanitasi, maka secara struktural dokumen SSK Pemutakhiran, akan menjadi rujukan bagi seluruh perangkat daerah dan instansi terkait dalam hal penganggaran dan pendanaan, baik pada tingkat Kabupaten, Provinsi, Pusat maupun dari sumber pendanaan lainnya.

Dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten Pemutakhiran merupakan dokumen perencanaan jangka menengah (5 tahunan) yang memberikan arah bagi pengembangan sanitasi di Kabupaten Subang. SSK ini selain untuk merealisasikan urusan wajib, juga menjadi wujud perhatian lebih dari Pemerintah Daerah Kabupaten terhadap pengelolaan sanitasi terutama untuk berkontribusi dalam pencapaian RPJMD dari pada sektor sanitasi. Oleh karena itu





dokumen SSK memiliki peran yang strategis dalam perencanaan pembangunan jangka menengah sektor sanitasi di tingkat kabupaten yang meliputi subsektor air limbah, subsektor persampahan, sub sektor drainase dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).

1.2. Maksud Dan Tujuan

Permasalahan sanitasi cukup dipandang penting, karena berdampak tidak hanya pada persoalan lingkungan, tetapi juga pada kesehatan masyarakat. Oleh karena itu penataan dan pembangunan sanitasi perlu dilakukan, perencanaan sanitasi akan mencakup lingkup wilayah yang luas oleh karena itu harus didasarkan pada strategi agar dengan ketersediaan anggaran yang ada dapat optimal. Untuk itu maksud dari pemutakhiran dokumen strategi sanitasi kabupaten (SSK) Bandung Barat yaitu akan melakukan kegiatan aktualisasi data untuk mendukung kegiatan penyusunan kembali dokumen perencanaan Strategis Sanitasi Kabupaten (SSK) untuk dapat dijadikan rujukan perencanaan pembangunan sanitasi di Kabupaten Bandung Barat 2025-2029.

Tujuan dari penyusunan dokumen ini adalah sebagai berikut

1. Review Dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten Bandung Barat
 2. Mendapatkan gambaran tentang profil sanitasi dan Strategi Sanitasi Kabupaten Bandung Barat yang komprehensif sehingga dapat menjadi dasar bagi penyusunan strategi dan
- 

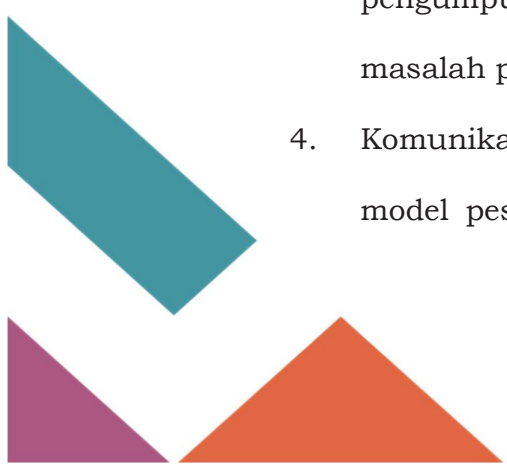


kebijakan sanitasi Kabupaten Bandung Barat.

3. Mengidentifikasi sejauh mana kemajuan yang telah dicapai dalam pembangunan sanitasi dari rencana yang telah disusun di dalam SSK sebelumnya;
4. Meningkatkan kualitas dokumen SSK yang sudah ada;
5. Sebagai salah satu syarat kelengkapan usulan (readiness criteria) dalam pengajuan usulan kegiatan yang pendanaannya bersumber dari APBN/DAK dan APBD Provinsi.

1.3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pelaksanaan kegiatan ini adalah sebagai berikut :

1. Teknis :Memetakan ketersediaan dan kondisi sarana dan prasarana sanitasi dalam mendukung layanan sanitasi Kabupaten Bandung Barat.
 2. Kelembagaan : Memetakan kondisi pelaksanaan peran, fungsi, dan tugas pengelolaan sanitasi yang dijalankan berbagai pihak, kebijakan sanitasi, tingkat koordinasi, dan kondisi layanan sanitasi.
 3. Keuangan : Memetakan besaran pendanaan, sistem pengumpulan dana dari masing-masing stakeholder, serta masalah pendanaan sanitasi.
 4. Komunikasi : Memetakan kegiatan advokasi, mobilisasi sosial, model pesan, saluran dan materi komunikasi sanitasi yang
- 

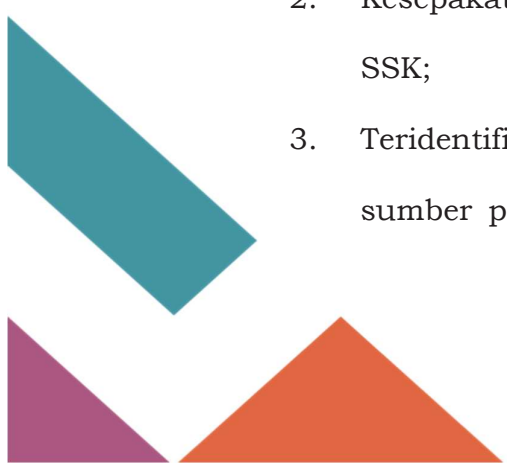


biasa digunakan di tingkat kabupaten.

5. Pemberdayaan masyarakat, jender dan kemiskinan : Memetakan kemampuan dan kemauan masyarakat untuk berkontribusi, dan pelibatan perempuan dan laki-laki dalam perencanaan, pengelolaan dan money sanitasi
6. Partisipasi sektor swasta : Mengidentifikasi kondisi partisipasi sektor swasta, dan lembaga non pemerintah dalam pengelolaan sanitasi
7. Survey Resiko Kesehatan Lingkungan : Penilaian resiko kesehatan lingkungan dengan mengumpulkan data sekunder dari OPD terkait untuk mengetahui situasi sanitasi tingkat rumah tangga dan lingkungan. Termasuk pemetaan akses masyarakat terhadap fasilitas sanitasi, dan hygiene serta hubungannya dengan perilaku hidup bersih dan sehat masyarakat

1.4. Sasaran Dan Output

Sasaran dari kegiatan ini adalah:

1. Kesepakatan rencana kerja penyusunan dan pemutakhiran SSK;
 2. Kesepakatan rencana kerja penyusunan dan pemutakhiran SSK;
 3. Teridentifikasinya program, kegiatan, besaran dan indikasi sumber pendanaan yang diperlukan untuk mencapai sasaran,
- 



serta tersusunya matriks monitoring dan evaluasi capaian SSK;

4. Tersusunnya dokumen SSK Kabupaten Bandung Barat 2025-2029

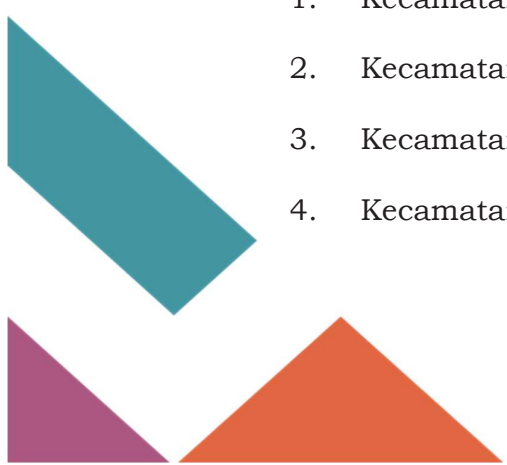
Keluaran dari kegiatan ini :

Keluaran atau Output dari kegiatan ini adalah tersusunnya dokumen Review Strategi Sanitasi Kabupaten Bandung Barat 2025-2029 yang tersusun dalam

1. Laporan Pendahuluan yang meliputi cakupan pelaksanaan, ruang lingkup pekerjaan, pendekatan dan metodologi serta Rencana kerja
2. Laporan Antara yang meliputi hasil pelaksanaan survey kondisi di lapangan sesuai dengan realisasi dalam kegiatan yang tercantum dalam Dokumen SSK sebelumnya
3. Dokumen SSK Kabupaten Bandung Barat 2025-2029

1.5. Cakupan wilayah

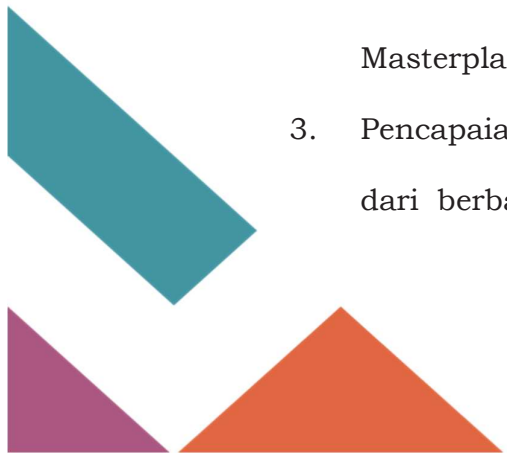
Cakupan wilayah dalam penyusunan Dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) Kabupaten Bandung Barat mencakup 16 Kecamatan dan 165 Desa :

1. Kecamatan Cikalong Wetan
 2. Kecamatan Cipeundeuy
 3. Kecamatan Padalarang
 4. Kecamatan Cipatat
- 

- 
5. Kecamatan Ngamprah
 6. Kecamatan Batujajar
 7. Kecamatan Cililin
 8. Kecamatan Saguling
 9. Kecamatan Cihampelas
 10. Kecamatan Sindangkerta
 11. Kecamatan Gunungghalu
 12. Kecamatan Rongga
 13. Kecamatan Cipongkor
 14. Kecamatan Lembang
 15. Kecamatan Cisarua
 16. Kecamatan parongpong.

1.6. Cakupan materi review SSK

Kegiatan penyempurnaan Dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) Kabupaten Bandung Barat meliputi review kondisi-kondisi sebagai berikut :

1. Kondisi sanitasi awal berdasarkan hasil Survey Resiko Kesehatan Lingkungan terakhir
 2. Target capaian yang di inginkan didalam pembangunan sanitasi yang dapat dilihat dari : Buku Putih, Masterplan, maupun Dokumen SSK sebelumnya
 3. Pencapaian pembangunan sanitasi saat ini yang dapat dilihat dari berbagai laporan kegiatan penyelenggaraan sanitasi di
- 



Kabupaten Bandung Barat

Adapun sektor lingkungan yang akan dikaji dalam muatan Pemutakhiran SSK Kabupaten Bandung Barat meliputi :

1. Layanan Sub sektor Air Limbah Domestik
2. Layanan Sub Sektor Persampahan
3. Sub Sektor Drainase lingkungan

1.7. Sistematika Pelaporan

Laporan Akhir yang disusun terdiri dari 6 bab meliputi

BAB I PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang pemutakhiran dokumen SSK Bandung Barat, substansi pemutakhiran dokumen SSK, maksud dan tujuan, ruang lingkup, keluaran serta sistematika pelaporan.

BAB II PROFIL SANITASI

Berisi tentang berisikan profil air limbah, persampahan, drainase serta PHBS.

BAB III KERANGKA PENGEMBANGAN

Berisi tentang konsep pengembangan sanitasi di wilayah Kabupaten Bandung Barat.

BAB IV STRATEGI PENGEMBANGAN SANITASI

Berisikan tentang rencana pengembangan sanitasi di wilayah Kabupaten Bandung Barat

BAB V KONDISI FAKTUAL SANITASI

Berisikan tentang kondisi-kondisi factual sanitasi di wilayah Kabupaten Bandung Barat.





BAB VI PROGRAM, KEGIATAN DAN INDIKASI PROGRAM SANITASI

Berisikan tentang kondisi-kondisi factual sanitasi diwilayah
Kabupaten Bandung Barat.



BAB II

PROFIL SANITASI

2.1. Selayang pandang berdirinya Kabupaten Bandung Barat

Pembentukan Kabupaten Bandung Barat sudah menjadi wacana sebelum terbitnya Undang-Undang Otonomi Daerah dan pemekaran Kabupaten Bandung dilakukan. Dengan mempertimbangkan wilayah yang relatif luas dan kompleksitas isu pembangunan serta permasalahan yang dihadapi di Kabupaten Bandung, maka saat itu Gubernur Jawa Barat mengeluarkan surat kepada Bupati Bandung untuk mengkaji rencana pembentukan kabupaten baru. Usulan gubernur waktu itu adalah pembentukan Kabupaten Padalarang yang mencakup Bandung Barat dan Kota Administratif Cimahi.

Terbentuknya Kabupaten Bandung Barat sebagai daerah otonom baru melalui suatu pertimbangan dan proses yang panjang, dengan kajian seksama dan memperhatikan aspirasi yang berkembang di masyarakat. Aspirasi dan keinginan masyarakat itu dituangkan secara formal dalam Surat Keputusan DPRD Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2004 tanggal 20 Agustus 2004 tentang Persetujuan DPRD Kabupaten Bandung terhadap Pembentukan Kabupaten Bandung Barat. Di tingkat provinsi, diterbitkan Surat Keputusan DPRD Propinsi Jawa Barat Nomor 135/Kep. DPRD-





7/2005 tentang persetujuan DPRD terhadap pembentukan Kabupaten Bandung Barat. Kemudian disusul dengan surat Gubernur Jawa Barat kepada Menteri Dalam Negeri bernomor 135.1/1197/Desen tertanggal 11 April 2005 perihal Usul Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat. Pada akhirnya terbentuk Kabupaten Bandung Barat melalui penetapan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat dengan pusat pemerintahan di Kecamatan Ngamprah yang disahkan oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 2 Januari 2007.

2.2. Gambaran Geografis Kabupaten Bandung Barat

Secara geografis posisi Kabupaten Bandung Barat terletak pada $60^{\circ}41'$ sampai dengan $70^{\circ}19'$ Lintang Selatan dan pada $107^{\circ}22'$ sampai dengan $108^{\circ}05'$ Bujur Timur, dengan batas-batas wilayahnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara :
Berbatasan dengan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Bandung Barat
 - Sebelah Selatan :
Berbatasan dengan Kabupaten Bandung dan Kabupaten Cianjur
 - Sebelah Timur :
- 



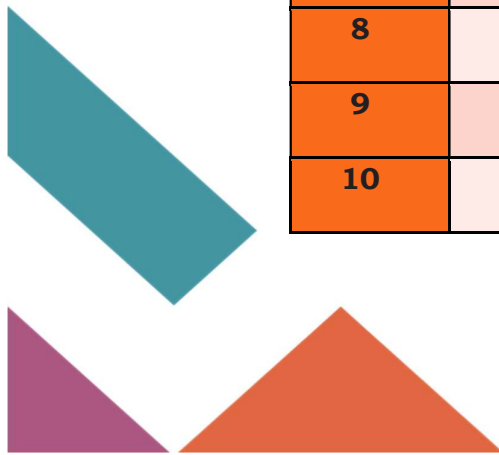
Berbatasan dengan Kabupaten Bandung, Kota Bandung dan Kota Cimahi

- Sebelah Barat :

Berbatasan dengan Kabupaten Cianjur.

Secara administratif, Kabupaten Bandung Barat mempunyai luas 1.305,77 km² yang terbagi dalam 16 kecamatan dan 165 desa/kelurahan. Kecamatan terluas adalah Kecamatan Gununghalu dengan luas 160,64 Km² atau 12,30% dari luas Kabupaten Bandung Barat. Sedangkan yang memiliki wilayah terkecil adalah Kecamatan Batujajar dengan luas 32,04 Km² atau 2,45% dari luas Kabupaten Bandung Barat.

No	Kecamatan	Luas (km ²)
1	Rongga	112,64
2	Gununghalu	155,47
3	Sindangkerta	106,30
4	Cililin	77,83
5	Cihampelas	47,04
6	Cipongkor	80,16
7	Batujajar	31,11
8	Saguling	51,58
9	Cipatat	125,98
10	Padalarang	51,63



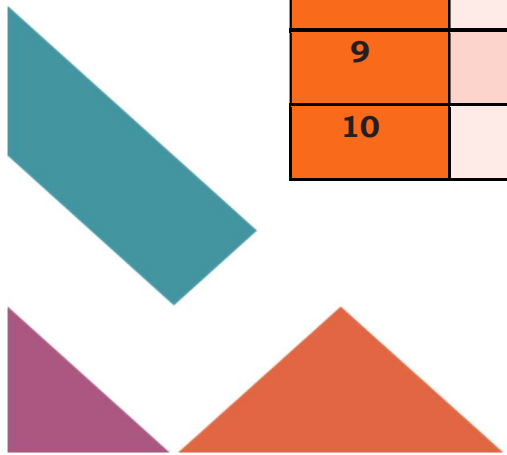


No	Kecamatan	Luas (km ²)
11	Ngamprah	35,65
12	Parompong	45,02
13	Lembang	98,22
14	Cisarua	55,63
15	Cikalongwetan	110,94
16	Cipeundeuy	102,19
JUMLAH		1,287,41

Sumber Data : Bandung Barat Dalam Angka (BPS 2024)

Persentase luas wilayah

No	Kecamatan	% Luas
1	Rongga	8,75%
2	Gununghalu	12,08%
3	Sindangkerta	8,26%
4	Cililin	6,05%
5	Cihampelas	3,65%
6	Cipongkor	6,23%
7	Batujajar	2,42%
8	Saguling	4,01%
9	Cipatat	9,79%
10	Padalarang	4,01%



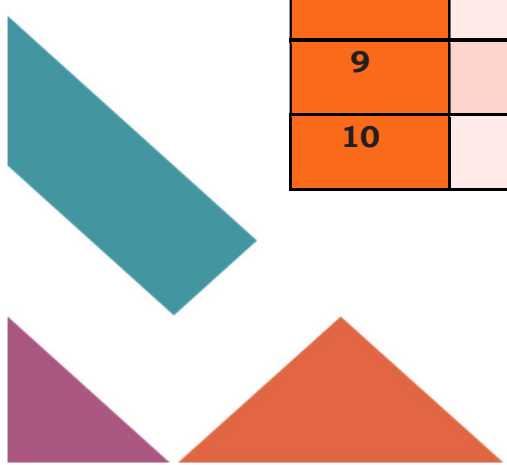


No	Kecamatan	% Luas
11	Ngamprah	2,77%
12	Parompong	3,50%
13	Lembang	7,63%
14	Cisarua	4,32%
15	Cikalongwetan	8,62%
16	Cipeundeuy	7,94%
JUMLAH		100 %

Sumber Data : Bandung Barat Dalam Angka (BPS 2024)

Jarak ke ibukota Kabupaten

No	Kecamatan	Jarak
1	Rongga	45,9
2	Gununghalu	50,9
3	Sindangkerta	40,5
4	Cililin	25,8
5	Cihampelas	15,5
6	Cipongkor	40,1
7	Batujajar	14,2
8	Saguling	24,8
9	Cipatat	24
10	Padalarang	7,3





No	Kecamatan	Jarak
11	Ngamprah	0
12	Parompong	13,5
13	Lembang	22,2
14	Cisarua	10,2
15	Cikalongwetan	24,2
16	Cipeundeuy	34,7

Sumber Data : Bandung Barat Dalam Angka (BPS 2024)

Curah Hujan

Bulan	Jumlah Curah Hujan	Jumlah Hari Hujan	Penyinaran Matahari
Januari	68,3	15	4,6
Februari	110,8	24	2,5
Maret	200,8	22	4,6
April	275,5	19	5,3
Mei	268,5	19	5,9
Juni	89,8	15	6,1
Juli	24	8	6,2
Agustus	29,7	6	7,3
September	18,2	4	7,3
Oktober	62,2	5	7,1
Nopember	239,3	21	4,2
Desember	366	25	5,1

Sumber Data : Bandung Barat Dalam Angka (BPS 2024)

2.3. Gambaran Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat

Berikut ini merupakan kondisi pemerintahan Desa,RW dan RT yang ada di wilayah Kabupaten Bandung Barat



No	Kecamatan	Jumlah Desa	RW	RT
1	Rongga	8	227	455
2	Gununghalu	9	158	546
3	Sindangkerta	11	122	513
4	Cililin	11	126	526
5	Cihampelas	10	101	482
6	Cipongkor	14	119	460
7	Batujajar	7	112	374
8	Saguling	6	52	188
9	Cipatat	12	225	740
10	Padalarang	10	208	776
11	Ngamprah	11	160	745
12	Parompong	7	118	435
13	Lembang	16	222	868
14	Cisarua	8	104	395
15	Cikalongwetan	13	198	720
16	Cipeundeuy	12	168	525
JUMLAH		165	2.320	8.748

Sumber Data : Bandung Barat Dalam Angka (BPS 2024)

2.4. Gambaran Kependudukan Kabupaten Bandung Barat

Berikut ini merupakan Gambaran kependudukan di wilayah Kabupaten Bandung Barat

No	Kecamatan	Jumlah penduduk (1000)
1	Rongga	63
2	Gununghalu	81,8
3	Sindangkerta	76,6
4	Cililin	99,4
5	Cihampelas	141,5
6	Cipongkor	104,9
7	Batujajar	113,6
8	Saguling	35,6
9	Cipatat	145,6
10	Padalarang	187,7
11	Ngamprah	183,3
12	Parompong	116,7
13	Lembang	203,2
14	Cisarua	82,3
15	Cikalongwetan	133,1
16	Cipeundeuy	91,4
JUMLAH		1.859,6

Sumber Data : Bandung Barat Dalam Angka (BPS 2024)



No	Kecamatan	% Jumlah penduduk
1	Rongga	3,39%
2	Gununghalu	4,40%
3	Sindangkerta	4,12%
4	Cililin	5,34%
5	Cihampelas	7,61%
6	Cipongkor	5,64%
7	Batujajar	6,11%
8	Saguling	1,91%
9	Cipatat	7,83%
10	Padalarang	10,09%
11	Ngamprah	9,86%
12	Parompong	6,28%
13	Lembang	10,93%
14	Cisarua	4,43%
15	Cikalongwetan	7,16%
16	Cipeundeuy	4,91%
JUMLAH		100%

Sumber Data : Bandung Barat Dalam Angka (BPS 2024)



No	Kecamatan	Kepadatan Penduduk per Km²
1	Rongga	559
2	Gununghalu	526
3	Sindangkerta	721
4	Cililin	1277
5	Cihampelas	3009
6	Cipongkor	1309
7	Batujajar	3652
8	Saguling	691
9	Cipatat	1155
10	Padalarang	3636
11	Ngamprah	5142
12	Parompong	2592
13	Lembang	2069
14	Cisarua	1479
15	Cikalongwetan	1200
16	Cipeundeuy	894

Sumber Data : Bandung Barat Dalam Angka (BPS 2024)



2.5. Gambaran Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Barat

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bandung Barat, merupakan alat operasional dalam mengkoordinasikan dan mengintegrasikan kegiatan-kegiatan pembangunan yang berkelanjutan, mensinkronkan kepentingan antar stakeholders, serta mampu menjabarkan kepentingan pembangunan regional dan nasional di daerah. Selain itu, rencana ini harus dapat dijadikan acuan bagi program-program pembangunan dan bagi perencanaan tata ruang daerah di tingkat yang lebih rendah dengan tidak melupakan rencana tata ruang wilayah perbatasan seperti Kabupaten Cianjur, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Subang, Kota Cimahi, Kota Bandung, Kabupaten Bandung, dan Kabupaten Sumedang.

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bandung Barat merupakan matra spasial dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bandung Barat, yang berfungsi sebagai penyelaras kebijakan penataan ruang Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota yang berbatasan, serta sebagai acuan bagi instansi Pemerintah Daerah dan masyarakat untuk mengarahkan lokasi, dan menyusun program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang di wilayah Kabupaten Bandung Barat.





1. Rencana Struktur Ruang

Rencana struktur ruang Kabupaten Bandung Barat dikembangkan untuk mengoptimalkan potensi masing-masing wilayah sesuai dengan peran dan fungsi wilayahnya, sehingga dapat memenuhi kebutuhan antara wilayah satu terhadap wilayah lainnya. Sistem pemenuhan kebutuhan ini diharapkan dapat berjalan sesuai dengan harapan dan menciptakan perkembangan ekonomi yang pesat.

Berdasarkan Permen ATR Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan RTRW, Struktur Ruang Wilayah Kabupaten adalah rencana yang mencakup sistem perkotaan wilayah kabupaten yang berkaitan dengan kawasan perdesaan yang menjadi wilayah pelayanannya. Jaringan prasarana wilayah kabupaten dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah kabupaten, selain untuk melayani kegiatan skala kabupaten yang meliputi: sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi dan kelistrikan, sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan sumber daya air, termasuk seluruh daerah hulu untuk bendungan atau waduk dari daerah aliran sungai (DAS), dan sistem jaringan prasarana lainnya. Rencana struktur ruang Kabupaten Bandung Barat merupakan kerangka tata ruang wilayah kabupaten, yang tersusun atas pusat-pusat kegiatan yang berhierarki satu sama lain berdasarkan peran dan fungsinya, yang saling terhubung satu

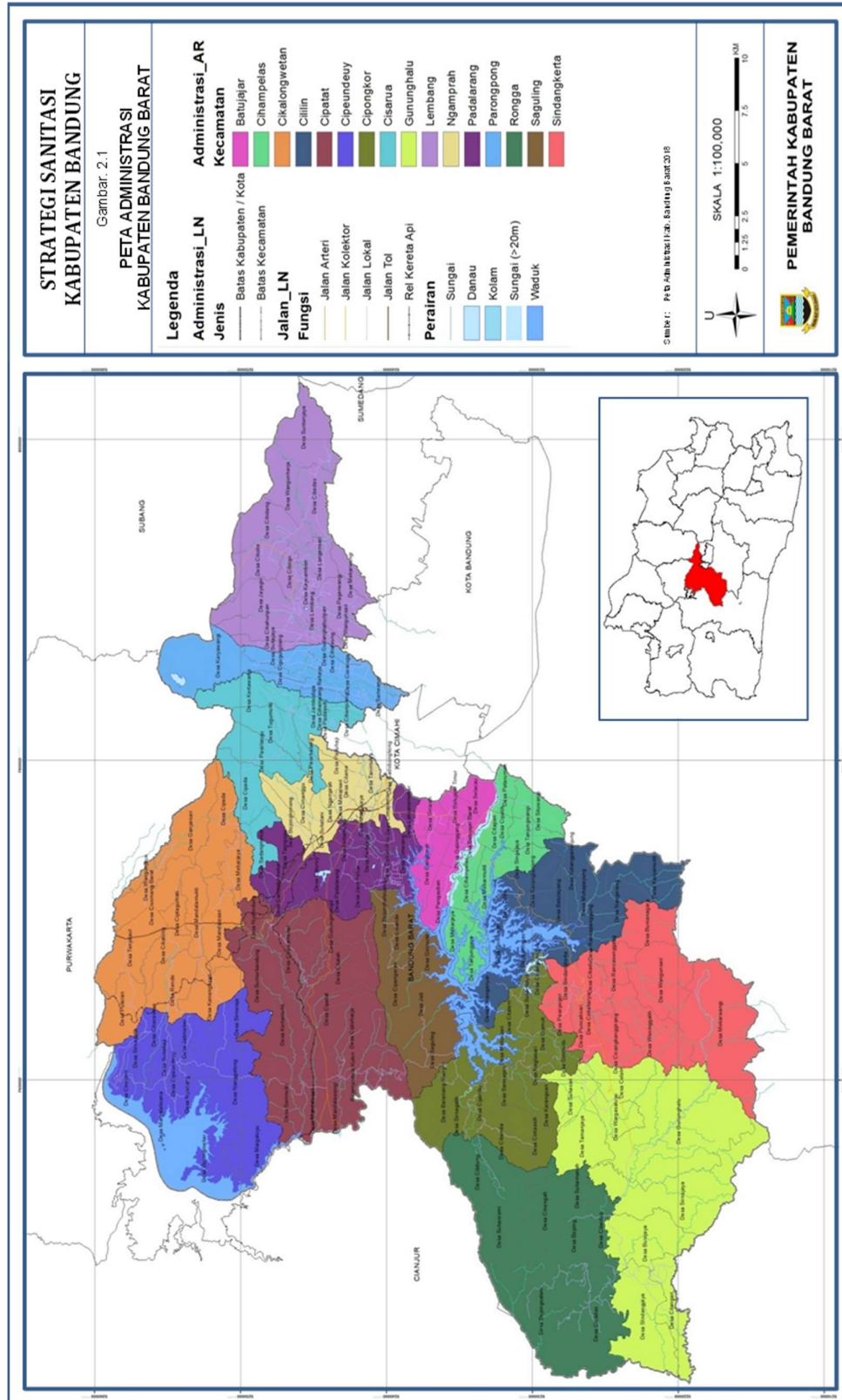




sama lainnya oleh sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten, terutama jaringan transportasi. Sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten meliputi: sistem prasarana transportasi, energi, telekomunikasi, dan sumber daya air yang mengintegrasikan dan memberikan layanan bagi fungsi kegiatan di wilayah Kabupaten Bandung Barat. Rencana struktur ruang wilayah kabupaten berfungsi:

- a. Sebagai arahan pembentuk sistem pusat kegiatan wilayah kabupaten yang memberikan layanan bagi kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan disekitarnya yang berada di dalam wilayah kabupaten.
- b. Sistem perletakan jaringan prasarana wilayah yang menunjang keterkaitannya serta memberikan layanan bagi fungsi kegiatan yang ada dalam wilayah kabupaten, terutama pada pusat-pusat kegiatan/ perkotaan yang ada.

Rencana struktur ruang Kabupaten Bandung Barat dibentuk untuk mampu mencapai tujuan sebagai berikut:



- 
- a. Mewujudkan Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Bandung Barat.
 - b. Memberikan pelayanan yang merata agar tercipta pertumbuhan dan perkembangan ekonomi yang memberikan dampak positif.
 - c. Menyeleraskan antara perkembangan penduduk dan kebutuhan kelengkapan sarana dan prasarana di setiap wilayah.
 - d. Mengoptimalkan keterbatasan ketersediaan sumberdaya yang ada, baik sumber-daya manusia, sumberdaya alam, sumberdaya binaan, maupun sumberdaya pembiayaan.
 - e. Pemecahan persoalan pengembangan wilayah
 - f. Mewujudkan aspirasi masyarakat.
 - g. Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten Bandung Barat terdiri atas:
 - Rencana pengembangan sistem pusat pelayanan; dan
 - Rencana pengembangan sistem jaringan prasarana wilayah

2. Rencana Pengembangan Sistem Perkotaan

Untuk mendistribusikan pembangunan di wilayah Kabupaten Bandung Barat, dibutuhkan pusat-pusat yang mendukung perkembangan tiap wilayah. Dengan pertimbangan utama keseimbangan wilayah, maka untuk Kabupaten Bandung Barat





ditentukan satu (1) pusat pertumbuhan primer dan empat (4) pusat pertumbuhan sekunder, yaitu:

1. Kecamatan Ngamprah, merupakan pusat pengembangan primer dengan orientasi kegiatan berupa pusat pemerintahan kabupaten, perdagangan, dan pelayanan masyarakat.
2. Kecamatan Padalarang, merupakan pusat pengembangan sekunder di bagian tengah dengan industri, perdagangan, dan permukiman sebagai orientasi pengembangan wilayahnya.
3. Kecamatan Lembang, merupakan pusat pengembangan sekunder di bagian utara sebelah timur dengan fokus pengembangan sektor pariwisata, permukiman, pertanian, kawasan lindung, dan konservasi.
4. Kecamatan Cikalongwetan, merupakan pusat pengembangan sekunder di bagian utara sebelah barat dengan perkebunan dan industri sebagai orientasi pengembangan wilayahnya.
5. Kecamatan Cililin, merupakan pusat pengembangan sekunder di bagian selatan dengan sektor pariwisata, perkebunan, konservasi, dan permukiman sebagai sektor andalannya.

Rencana sistem perkotaan yang akan diterapkan di Kabupaten Bandung Barat dilakukan berdasarkan rencana hierarki kota. Rencana hierarki kota di Kabupaten Bandung Barat ditentukan berdasarkan hasil analisis dan arahan kebijakan yang telah ditetapkan. Titik simpul (kota-kota) berfungsi sebagai pusat



pertumbuhan dan pusat-pusat pelayanan. Sistem pusat kegiatan wilayah kabupaten merupakan simpul pelayanan sosial, budaya, ekonomi dan/ atau administrasi masyarakat di wilayah kabupaten tersebut.

Rencana sistem pusat pelayanannya, terdiri dari: PKN, PKW, dan PKL yang berada pada wilayah kabupaten. Selain itu, terdapat pula sistem pusat-pusat yang melayani kecamatannya sendiri, yaitu:

- PPK (Pusat Pelayanan Kawasan) dan
- PPL (Pusat Pelayanan Lingkungan) yang berfungsi melayani beberapa desa.

Berdasarkan hal tersebut, dapat diterapkan rencana hierarki kota dan pusat pelayanan di Kabupaten Bandung Barat sebagai berikut.

No	Kecamatan	Hierarki	Pusat Pelayanan
1	Ngamprah - Padalarang	Hierarki 1	PKL
2	Cikalongwetan		
3	Lembang	Hierarki 2	PKLp
4	Cililin		
5	Cisarua	Hierarki 3	PPK
6	Batujajar		
7	Cipatat		
8	Cipeundeuy		
9	Cihampelas		
10	Saguling		



11	Sindangkerta	Hierarki 3	PPL
12	Cipongkor		
13	Gununghalu		
14	Rongga		
15	Parongpong		

Sumber data: RTRW Kabupaten Bandung Barat, tahun 2005-2025

3. Rencana Pengembangan Sistem Perdesaan

Pengembangan sistem permukiman perdesaan di Kabupaten Bandung Barat diarahkan pada usaha pemerataan pembangunan dan perkembangan wilayah sebagai salah satu usaha mencegah kesenjangan wilayah. Hal tersebut dilakukan karena mengingat terdapat limitasi strategis menyangkut kondisi geografis yang memengaruhi pola distribusi dengan tingkat kesulitan aksesibilitas yang cukup tinggi, ditandai dengan hambatan fisik kawasan dan sistem jaringan yang belum memadai.

Berdasarkan kondisi tersebut, maka pengembangan kawasan perdesaan di Kabupaten Bandung Barat adalah sebagai berikut:

1. Memilih desa-desa potensial menjadi desa-desa pusat pertumbuhan
2. Pengembangan aktivitas wisata yang mendukung pertanian, berupa agrowisata, agroindustri, dan agrobisnis yang terpadu dan saling terkait
3. Peningkatan sumberdaya manusia dan buatan, agar keberadaan manusia menjadi prioritas utama pengembangan wilayah pedesaan yang cenderung



terbelakang.

Berdasarkan hal tersebut, maka rencana pengembangan sistem pusat perdesaan di Kabupaten Bandung Barat diarahkan di seluruh kecamatan di Kabupaten Bandung Barat yang ditentukan berdasarkan pengembangan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL).

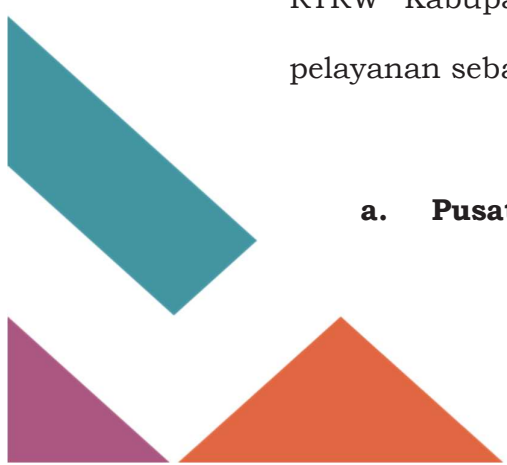
Pengembangan PPL di Kabupaten Bandung Barat meliputi:

1. Kecamatan Sindangkerta: Desa Pasirpogor, Desa Puncaksari, Desa Cikadu, Desa Cintakarya, Desa Cicangkan Girang, dan Desa Sindangkerta;
2. Kecamatan Cipongkor: Desa Cijenuk, Desa Sarinagen, dan Desa Cijambu;
3. Kecamatan Gununghalu: Desa Sinarjaya, Desa Bunijaya, dan desa Cilangsari;
4. Kecamatan Rongga: Desa Cinengah, Desa Cibitung, dan Desa Cibedug;
5. Kecamatan Parongpong: Desa Cihanjuangrahayu;
6. Kecamatan Saguling: Desa Cipageran.

4. Rencana Tata Jenjang Pusat Pelayanan

Tata jenjang pusat pelayanan (hierarki pelayanan) di dalam RTRW Kabupaten Bandung Barat, menetapkan jenjang pusat pelayanan sebagai berikut:

a. Pusat Kegiatan Nasional (PKN)





PKN merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi sebagai simpul utama kegiatan ekspor impor atau gerbang menuju kawasan internasional. PKN mengacu pada ketentuan RTRW Nasional, yaitu Kota Bandung sebagai pusat dari Kawasan Perkotaan Bandung Raya (Metropolitan Bandung Raya) berperan sebagai PKN.

b. Pusat Kegiatan Lokal (PKL)

PKL merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai pusat kegiatan industri dan jasa yang melayani skala kabupaten atau beberapa kecamatan, termasuk sebagai simpul transportasinya.

Kabupaten Bandung Barat direncanakan memiliki 3 PKL, yaitu: Kawasan Perkotaan Ngamprah, Padalarang, dan PKL Cikalongwetan.

Secara umum, pemilihan lokasi PKL berdasarkan hierarki kecamatan, yang masing-masing merupakan hierarki 1, kondisi eksisting wilayah, serta rencana pengembangan yang akan diterapkan di wilayah tersebut.

- PKL Kawasan Perkotaan Ngamprah menjadi pengembangan pusat pemerintahan Kabupaten Bandung Barat
- PKL Padalarang menjadi pengembangan kawasan perkotaan, fasilitas perkotaan, perdagangan dan



grosir, serta transportasi.

- PKL Cikalongwetan menjadi pengembangan pendukung pusat Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB), TOD Walini (Kota Baru Walini) atau pusat perkembangan perkotaan baru.

c. Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp)

PKLp merupakan kawasan perdesaan yang berpotensi menjadi pusat pertumbuhan baru dengan cakupan layanan beberapa kecamatan, dan juga sebagai simpul transportasi dengan terminal tipe C.

RTRW Kabupaten Bandung Barat, PKLp direncanakan untuk kecamatan-kecamatan: Kecamatan Lembang, dan Kecamatan Cililin.

d. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)

Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.

Kecamatan yang berperan sebagai PPK adalah : Kecamatan Cisarua, Kecamatan Batujajar, Kecamatan Cipatat, Kecamatan Cipeundeuy dan Kecamatan Cihampelas.

e. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)

Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa dan sebagai DPP (Desa



Pusat Pertumbuhan). Kecamatan yang berperan sebagai PPL adalah : Kecamatan Sindangkerta, Kecamatan Cipongkor, Kecamatan Gununghalu, Kecamatan Rongga dan Kecamatan Parongpong.

5. Rencana Pembagian Wilayah Pengembangan

Berdasarkan penentuan hierarki kota, homogenitas kawasan, serta interaksi antar wilayah, maka sistem perkotaan di Kabupaten Bandung Barat terdiri dari satu (1) pusat inti Wilayah Pengembangan (WP) dan empat Sub-Wilayah Pengembangan (SWP) sebagai berikut:

- a. Pusat inti Wilayah Pengembangan (WP) berada di Kecamatan Ngamprah-Padalarang dengan fungsi:
 - Ngamprah sebagai pusat kegiatan pemerintahan, dan
 - Padalarang sebagai pusat perdagangan dan jasa, Wilayah pelayanannya meliputi: Kecamatan Cipatat, Kecamatan Batujajar, dan Kecamatan Cihampelas.
 - b. SWP I berada di WP Cikalongwetan dengan pusat berada di Kawasan Perkotaan Cikalongwetan.
Wilayah pelayanannya: Kecamatan Cipeundeuy.
 - c. SWP II berada di WP Lembang dengan pusat berada di Kawasan Perkotaan Lembang.
Wilayah pelayanannya: Kecamatan Cisarua, dan Kecamatan Parongpong.
- 

- 
- d. SWP III berada di WP Cililin dengan pusat berada di Kawasan Perkotaan Cililin yang menjadi sub pusat kota. Wilayah pelayanannya: Kecamatan Cipongkor, Kecamatan Sindangkerta, Kecamatan Gununghalu, dan Kecamatan Rongga.

Untuk mewujudkan struktur ruang dan arah pengembangan di tiap wilayah pengembangan, maka perlu adanya fungsi pengembangan yang ditetapkan agar ada ketegasan dan kebijaksanaan pembangunan di masa mendatang. Penetapan fungsi dari setiap wilayah pengembangan didasarkan pada pertimbangan:

Hierarki kota atau kawasan perkotaan;

1. Jangkauan pelayanan perkotaan terhadap wilayah belakangnya;
2. Basis ekonomi kota atau kawasan perkotaan dalam wilayah yang lebih luas;
3. Kedudukan kota atau kawasan perkotaan tersebut dalam konteks regional.



No	Wilayah Pengembangan	Pusat Kegiatan/	DPP	Luasan (Ha)	Fungsi yang Dikembangkan	Fasilitas Penunjang
1	WP Ngamprah-Padalarang	PKL Perkotaan Ngamprah	Desa Bojongkoneng Desa Cilame Desa Cimanggu Desa Cimareme Desa Gadobangkong Desa Margajaya Desa Mekarsari Desa Ngamprah Desa Pakuhaji Desa Sukatani Desa Tanimulya	3.558,981	Pusat pemerintahan Kabupaten Bandung Barat, permukiman, perdagangan dan jasa, pertanian lahan basah dan lahan kering	1. Pemerintahan skala kabupaten 2. Pendidikan: SD, SMP, SMA, Perguruan Tinggi/Akademi 3. Kesehatan: RSU tipe B 4. Transportasi: Terminal tipe B 5. Ekonomi: Pasar, Perdagangan Grosir, dan Perkantoran (Bank) 6. Fasilitas Olahraga dan Rekreasi 7. Akomodasi: Hotel Berbintang
2	WP Ngamprah-Padalarang	PKL Perkotaan Padalarang	Desa Campakamekar Desa Ciburuy Desa Cimerang Desa Cipeundeuy Desa Jayamekar Desa Kertajaya Desa Kertamulya Desa Laksanamekar Desa Padalarang Desa Tagogapu	5.153,412	Perumahan, industri, perdagangan dan jasa, pariwisata dan RTH	1. Pendidikan: SD, SMP, SMA, Perguruan Tinggi/Akademi 2. Kesehatan: RSU tipe C 3. Transportasi: Terminal tipe C dan Stasiun KA 4. Peribadatan 5. Ekonomi: Pasar, Perdagangan Grosir, dan Perkantoran (Bank) 6. Fasilitas Olahraga dan Rekreasi 7. Akomodasi: Hotel



No	Wilayah Pengembangan	Pusat Kegiatan/	DPP	Luasan (Ha)	Fungsi yang Dikembangkan	Fasilitas Penunjang
3	SWP I (WP Cikalongwetan)	PKL Cikalongwetan	Desa Cikalong Desa Ciptagumati Desa Kanangasari Desa Mandalamukti Desa Mandalasari Desa Mekarjaya Desa Rende Desa Cipada Desa Ganjarsari Desa Wangunjaya Desa Cisomang	11.071,63	Permukiman, perdagangan dan jasa, pendidikan, pemeritahan, pertanian holtikultura, peternakan sapi, dan pariwisata	1. Pendidikan: SD, SMP, SMA, Perguruan Tinggi/ Akademi 2. Kesehatan: RSU tipe C 3. Transportasi: Terminal tipe C, Stasiun KA 4. Ekonomi: Pasar, perdagangan dan grosir, retail 5. Fasilitas peribadatan, olahraga, dan rekreasi 6. Akomodasi: Hotel melati
4	SWP II (WP Lembang)	PKLp Lembang	Desa Cibogo Desa Kayuambon Desa Lembang Desa Sukajaya Desa Gudangkahuripan Desa Wangunsari Desa Pagerwangi Desa Mekarwangi Desa Langensari Desa Cibodas Desa Suntenjaya Desa Wangunharja Desa Cikidang Desa Cikole Desa Jayagiri Desa Cikahuripan	9.809,921	Wisata, agrobisnis, permukiman perkotaan	1. Pendidikan: SD, SLTP, SMU 2. Kesehatan: RSU tipe C 3. Terminal tipe C 4. Peribadatan 5. Ekonomi: Pasar, perdagangan grosir, 6. Fasilitas Olahraga dan Rekreasi 7. Akomodasi: Hotel Berbintang dan Hotel Melati



No	Wilayah Pengembangan	Pusat Kegiatan/	DPP	Luasan (Ha)	Fungsi yang Dikembangkan	Fasilitas Penunjang
5	SWP III (WP Cililin)	PKLp Cililin	Desa Batulayang Desa Bongas Desa Budiharja Desa Cililin Desa Karanganyar Desa Karangtanjung Desa Nangerang Desa Rancapanggung Desa Karyamukti Desa Mukapayung Desa Kidangpananjung	7.767,707	Permukiman, Perikanan, pariwisata, dan konservasi energi	1. Pendidikan: SD, SLTP, SMU 2. Kesehatan: RSU tipe C 3. Terminal tipe C 4. Peribadatan 5. Ekonomi: Pasar, perdagangan grosir, 6. Fasilitas Olahraga dan Rekreasi 7. Akomodasi: Hotel Melati

Sumber: RTRW Kabupaten Bandung Barat, tahun 2005-2025

DPP Dan Fungsi Pengembangan

No	Pusat Pelayanan	DPP	Luasan (Ha)	Fungsi yang Dikembangkan	Fasilitas Penunjang
1	PPK Cisarua	Desa Jambudipa Desa Pasirhalang Desa Sadangmekar Desa Padaasih Desa Kertawangi Desa	5.553,539	Permukiman, perdagangan dan jasa, pertanian hortikultura, peternakan sapi dan pariwisata	Puskesmas dengan tempat perawatan, pendidikan, pasar, dan terminal tipe C.
2	PPK Batujajar	Desa Batujajar Barat Desa Batujajar Timur Desa Cangkorah Desa Galanggang Desa Giriasih Desa	3105.416	Permukiman, perdagangan dan jasa, dan pariwisata	Puskesmas dengan tempat perawatan, pendidikan, pasar, dan terminal tipe C
3	PPK Cipatat	Desa Cipatat Desa Ciptaharja Desa Cirawamekar Desa Citatah Desa Gunungmasigit Desa Kertamukti Desa Mandalasari Desa Mandalawangi Desa	12.569,14	Permukiman, perdagangan dan jasa, industry ekstraktif, perikanan	Puskesmas dengan tempat perawatan, pendidikan, pasar, dan terminal tipe C
4	PPK Cipeundeuy	Desa Ciharashas Desa Cipeundeuy Desa Jatimekar Desa Nanggaleng Desa Nyenang Desa Sirnagalih Desa Sirnaraja Desa Sukahaji Desa Ciroyom Desa	10.194,49	Permukiman, perdagangan dan jasa, pertanian, perikanan, dan industry	Puskesmas dengan tempat perawatan, pendidikan, pasar, dan terminal tipe C



No	Pusat Pelayanan	DPP	Luasan (Ha)	Fungsi yang Dikembangkan	Fasilitas Penunjang
5	PPK Cihampelas	Desa Cihampelas Desa Cipatik Desa Citapen Desa Mekarjaya Desa Mekarmukti Desa Singajaya Desa Tanjungjaya Desa Tanjungwangi Desa Situwangi	4.695,06 6	Permukiman, perdagangan dan jasa, perikanan, dan pariwisata	Puskesmas dengan tempat perawatan, pendidikan, pasar, dan terminal tipe C
6	PPL Parongpong	Desa Cigugurgirang Desa Cihanjuang Rahayu Desa Cihanjuang Desa Sariwangi Desa Ciwaruga Desa Cihideung	4.495,24 5	Permukiman, perdagangan dan jasa, pertanian, dan pariwisata	Puskesmas dengan tempat perawatan, pendidikan, pasar, dan terminal
7	PPL Sindangkert a	Desa Cicangkanggiran Desa Cikadu Desa Cintakarya Desa Pasirpogor Desa Puncaksari Desa Rancasenggang Desa Sindangkerta Desa Weninggalih Desa Mekarwangi Desa Wangunsari Desa Buninagara	10.607,0 5	Permukiman, perdagangan dan jasa, pertanian, dan perikanan	Puskesmas dengan tempat perawatan, pendidikan, pasar, dan terminal tipe C
8	PPL Cipongkor	Desa Cicangkanghilir Desa Cijambu Desa Cijenuk Desa Citalem Desa Girimukti Desa Karangsari Desa Mekarsari Desa Neglasari Desa Sarinagen Desa Sukamulya Desa Baranang Siang Desa Sirnagalih Desa Cibenda	7996.41	Permukiman, perdagangan dan jasa, konservasi pertanian	Puskesmas dengan tempat perawatan, pendidikan, pasar, dan terminal tipe C





No	Pusat Pelayanan	DPP	Luasan (Ha)	Fungsi yang Dikembangkan	Fasilitas Penunjang
9	PPL Gununghalu	Desa Bunijaya Desa Celak Desa Gununghalu Desa Sukasari Desa Tamanjaya Desa Wargasaluyu Desa Sindangjaya Desa Cilangari Desa Sirnajaya	15.507,56	Permukiman, perdagangan dan jasa, konservasi pertanian	Puskesmas, sub terminal, pendidikan, pasar
10	PPL Rongga	Desa Bojong Desa Cibedug Desa Cinengah Desa Sukamanah Desa Cibitung Desa Sukaresmi Desa Bojongsalam Desa Cicadas	11.233,07	Permukiman, perdagangan dan jasa, konservasi pertanian	Puskesmas, sub terminal, pendidikan, pasar

Sumber: RTRW Kabupaten Bandung Barat, tahun 2005-2025

2.6. Gambaran Hasil EHRA Tahun 2022

Studi penilaian Risiko Kesehatan Lingkungan (Environmental Health Risk assessment / EHRA) adalah sebuah studi partisipatif di Kabupaten / Kota untuk memahami kondisi fasilitas sanitasi dan higienitas serta perilaku- perilaku masyarakat pada skala rumah tangga. Hasil pengolahan dan analisis data yang dapat menggambarkan penetapan area beresiko dari masing-masing wilayah kabupaten/kota sampai dengan tingkat desa yang selanjutnya dimanfaatkan untuk penyusunan dan pemutakhiran Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK) sebagai bahan review kebijakan dan advokasi untuk menuju penyehatan sanitasi total



yang layak dan aman yang bermuara pada peningkatan derajat kesejahteraan masyarakat.

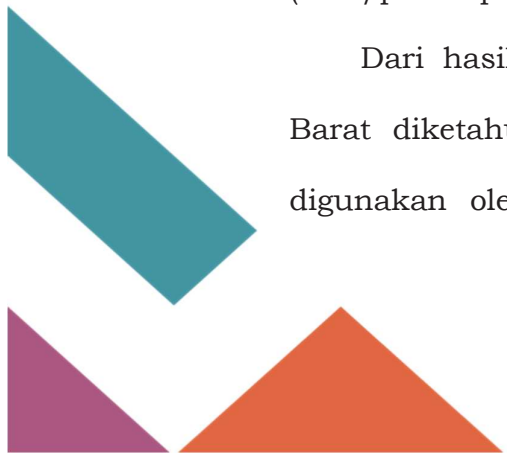
Adapun hasil studi EHRA yang telah dilaksanakan Pokja PKP Kab Bandung Barat secara singkat dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Air Bersih

Indeks risiko sanitasi sumber air di Kabupaten Bandung Barat berdasarkan studi EHRA tahun 2022 terdiri dari variabel sumber air yang digunakan merupakan sumber air terlindungi, sumber air tidak terlindungi dan juga dari aspek kelangkaan air.

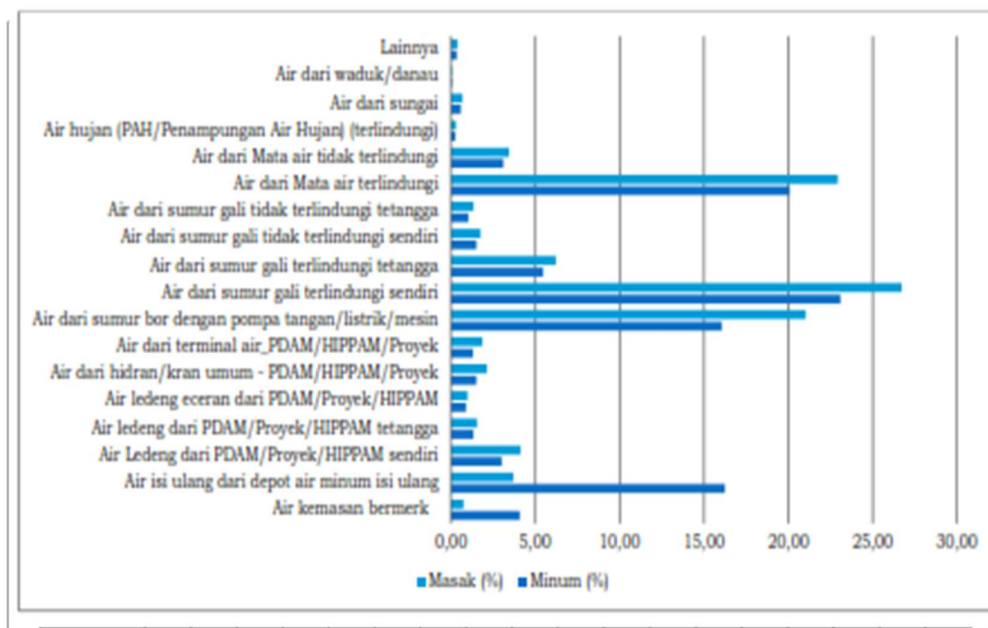
Adapun yang dimaksud dengan sumber air terlindungi adalah sumber air bersih yang konstruksi dan proses penyalurannya terpelihara dari bahan kontaminasi dari luar baik secara fisik, kimia maupun bakteriologis. Adapun sumber air (improved source) yang digunakan antara lain air isi ulang, air kemasan, air ledeng dari PDAM/Proyek/HIPPAM, air dari hidran/kran umum, air dari terminal, air dari sumur bor pompa tangan/listrik/mesin, air sumur gali, mata air, air hujan (PAH/penampungan air hujan).

Dari hasil studi EHRA tahun 2022 di Kabupaten Bandung Barat diketahui bahwa sumber air bersih yang paling banyak digunakan oleh masyarakat secara umum adalah Sumur Gali



Terlindungi, Mata Air Terlindungi dan Sumur Bor dengan pompa tangan atau pompa listrik. Sumber sumber air tersebut merupakan tiga besar sumber air diantara sumber lainnya yang digunakan masyarakat untuk minum, kegiatan hygiene sanitasi pribadi seperti mandi dan gosok gigi serta mencuci peralatan dan memasak.

Sedangkan untuk memenuhi kebutuhan air minum sebagian besar responden menggunakan air minum bersumber dari sumur gali (SGL) terlindungi milik sendiri (23,08%), kemudian persentase besar lainnya responden memilih menggunakan mata air terlindungi (20,08%), Depot Air Minum Isi Ulang (16,24%) serta Air Sumur Bor Pompa (16,04%).





Akses air bersih di Kab Bandung Barat sebagian besar mengakses sumber air bersih yang digunakan untuk kegiatan personal hygiene yaitu gosok gigi (27,62%), mandi (27,55%), cuci peralatan (27,33%), masak (26,71), minum (23,06) dari Sumur Gali Terlindungi milik sendiri. Untuk kegiatan minum sebagian besar menjawab Sumur Gali Terlindungi (SGL) sendiri sebesar 23,06%, air dari mata air terlindungi (20,06%), dari Depot Air Minum /Isi Ulang (16,24%) serta dari air sumur bor (16,04%). Sedangkan untuk memasak sebagian besar masyarakat menggunakan sumber air dari sumur gali, diikuti sumber air dari mata air terlindungi, air sumur bor.

2. Air Limbah Domestik

Persentase keluarga yang memiliki jamban pribadi sebanyak 94%, namun disamping itu masih ada yang menggunakan jamban saudara (3%), MCK umum (2%) dan masih ada yang berpraktik BAS (1%). Sedangkan untuk penyaluran akhir tinja adalah 42% tangki septik buatan sendiri , 27% kloset leher angsa dengan cubluk, 21% kloset leher angsa dengan fabrikasi SNI. Namun, dari 42% yang memiliki tangki septik dengan buatan sendiri dan 21% dari fabrikasi SNI ternyata 85% nya masih dikategorikan tangki septik tidak aman.

3. Genangan Air/Banjir

Kabupaten Bandung Barat ini termasuk dalam kategori



sebagian besar wilayahnya daratan tinggi, hanya sekitar 1,2% responden yang menyatakan adanya genangan air atau banjir dan sebagian besar menyatakan tidak pernah ada genangan air atau banjir di sekitar lingkungannya (97,4%).

4. Persampahan

Sampah di Kabupaten Bandung Barat sebagian besar dikelola dengan cara dibakar (44%), sebagian besar lainnya telah dilakukan pemilahan (16,9%), dan 13,6% dikumpulkan dan dibuang ke TPS. Namun masih terdapat 2,3% yang membuang sampahnya ke sungai dan 3,7% dibuang ke lahan kosong. Sebanyak 69% penduduk menyatakan telah memilah sampah.

5. Perilaku Higiene dan Sanitasi

Praktik cuci tangan pakai sabun sebagian besar (66,95%) tidak melakukan praktik cuci tangan pakai sabun pada seluruh waktu penting secara simultan dan bersamaan, namun sebagian besar responden (96%) menyatakan mencuci tangan sebelum makan dan prosesntase kecil masyarakat berperilaku CTPS ketika selesai menceboki anak/bayi (37,71%), sebelum menyuapi anak sebesar 1,26%.

6. Indeks Risiko Sanitasi (IRS)

Hasil analisa IRS sebagian besar berada pada air limbah domestik dengan nilai rerata 90,02. Nilai tertinggi risiko limbah domestik ada pada desa Kayuambon Kec lembang, Desa Celak Kec





Gununghalu, Cililin Kec Cililin, Neglasari Kec Cipongkor. IRS tertinggi sumber air rerata berjumlah 22,28 dan risiko sumber air tertinggi ada di Desa Mukapayung Kec Cililin. Desa Mukapayung mengalami risiko tertinggi dari jenis sumber air dan kelangkaan air yang masih terjadi di Desa Mukapayung. Selanjutnya IRS persampahan, rerata nilai IRS persampahan sebesar 72,8 sedangkan nilai tertinggi 100 berada di Desa Karangsari Kec Cipongkor, Sirnagalih Kec Cipeundeuy, Wangusari Kec 74 Sindangkerta, Kidangpananjung Kec Cililin, Cikalong Kec Cikalongwetan, Rancasenggang Kec Sindangkerta, Sukahaji, Cipada, Sukaresmi, Karangsari, Sirnagalih.



BAB III

KERANGKA PENGEMBANGAN

3.1. Visi Dan Misi Sanitasi

Visi dan misi merupakan suatu kondisi yang ingin dituju, melalui serangkaian kegiatannya. Visi dan misi menjadi janji Kepala Daerah dan Wakilnya sewaktu kampanye dan akan diwujudkan disaat mulai memerintah melalui RPJMD, oleh karena itu akan menjadi sumber inspirasi bagi pengembangan kegiatan yang ada di Dinas dan Instansi. Visi dan misi akan memberikan arah yang jelas dan terukur dengan periode pencapaiannya, sehingga pada akhir periode perencanaan tersebut dapat dilakukan evaluasi pencapaiannya.

Evaluasi pencapaian program dan kegiatan menjadi ukuran keberhasilan dari program atau proyek dari kegiatan yang telah dilakukan, kekurangan, atau kegiatan yang belum direalisasikan akan menjadi pertimbangan sebagai kegiatan yang akan dialokasikan pada periode berikutnya. Dalam kaitannya dengan pembangunan sektor sanitasi, Kabupaten Bandung Barat telah merumuskan visi dan misi sanitasi yang merupakan hasil kolaborasi pemikiran SKPD dan dari berbagai stakeholder terkait. Visi dan misi sanitasi Kabupaten Bandung Barat sangat erat kaitannya dengan visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten



Bandung Barat itu sendiri sebagaimana yang tercantum dalam RPJMD.

Pembangunan sanitasi selain didasarkan atas visi dan misi sanitasi, juga melalui perumusan oleh Pokja Sanitasi Kabupaten Bandung Barat, yaitu merumuskan adanya tujuan, indikator dan strategi pengembangan sektor sanitasi baik dalam jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang. Rumusan visi dan misi, tujuan, sasaran dan strategi sanitasi Kabupaten Bandung Barat telah memperhatikan isu-isu strategis yang termuat dalam dokumen-dokumen sanitasi sebelumnya (BPS, SSK dan MPS).

Perumusan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Bandung Barat yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung Barat dengan visi dan misi yang ada pada masing-masing sub sektor sanitasi di Kabupaten Bandung Barat.

Berikut ini merupakan Visi Dan Misi Sanitasi Kabupaten Bandung Barat :



Visi Kabupaten Bandung Barat	Misi Kabupaten Bandung Barat	Visi Sanitasi Kabupaten Bandung Barat	Misi Sanitasi Kabupaten Bandung Barat
Mewujudkan masyarakat yang Cerdas, Rasional, Maju, Agamis Dan Sehat Berbasis pada pengembangan dan pemberdayaan potensi wilayah	1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui kualitas birokrasi dalam melayani masyarakat. 2. Meningkatkan kualitas pelayanan prima dalam bidang pendidikan dan kesehatan yang terjangkau bagi semua lapisan masyarakat. 3. Meningkatkan kemandirian dan daya saing ekonomi masyarakat, untuk optimalisasi penyerapan tenaga kerja dan penanggulangan kemiskinan; 4. Memantapkan pengelolaan prasarana dan sarana, sumberdaya alam dan lingkungan hidup melalui pembangunan berkelanjutan; 5. Meningkatkan kesalehan dan modal sosial berdasarkan nilai agama dan kearifan budaya local 6. Meningkatkan pemberdayaan pemerintahan dan masyarakat desa.	<i>“Terwujudnya Kabupaten Bandung Barat yang sehat dan nyaman melalui pembangunan sanitasi yang berkualitas serta ramah lingkungan</i>	MISI AIR LIMBAH • Meningkatkan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah. • Meningkatkan peran masyarakat dan swasta dalam pengelolaan air limbah. • Meningkatkan dan mengembangkan sumber pendanaan dalam penyelenggaraan sistem pengelolaan air limbah permukiman. • Membuat peraturan Daerah (Perda) tentang pengelolaan sektor air limbah.



			MISI PERSAMPAHAN • Meningkatkan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan. • Menyediakan Lokasi TPA lengkap dengan sarana dan prasarana pendukung. • Meningkatkan SDM di Bidang Persampahan. • Meningkatkan peran masyarakat dan swasta dalam pengelolaan persampahan. • Meningkatkan jangkauan dan kualitas pelayanan sistem pengelolaan persampahan.
			MISI DRAINASE • Menyusun Masterplan Drainase • Meningkatkan pembangunan drainase • Meningkatkan peran masyarakat dan swasta dalam pengelolaan Drainase • Mendorong peningkatan kemampuan pembiayaan bagi pembangunan drainase menuju kearah kemandirian daerah





			• Membuat Peraturan Daerah (Perda) yang terkait dengan pengelolaan drainase.
			MISI PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT • Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berperilaku Hidup Bersih dan Sehat melalui promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat • Mendorong peningkatan peran masyarakat dan swasta dalam peningkatan PHBS • Mendorong peningkatan kemampuan pembiayaan untuk peningkatan kegiatan PHBS. • Membuat Peraturan Daerah (Perda) tentang Perilaku Hidup Bersih dan Sehat.

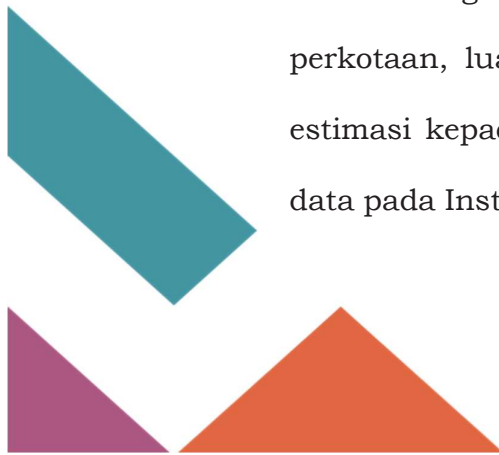


3.2. Tahap Pengembangan Sanitasi

Pembangunan sanitasi dalam lingkup kabupaten tentunya cakupannya luas dan besar, sehingga untuk dapat mencapainya perlu ada strategi. Strategi layanan sanitasi perlu dijalankan agar dapat mencapai tujuan dan sasaran pembangunan sanitasi yang tepat atau bermuara sesuai pada pencapaian Visi dan Misi Sanitasi Kabupaten Bandung Barat. Kabupaten Bandung Barat merumuskan strategi layanan sanitasi berdasarkan pada isu-isu utama dan menjadi strategis dalam pelaksanaannya karena berdampak akan mendukung mengatasi persoalan lainnya yang dihadapi pada saat ini.

Perumusan pentahapan pengembangan atau pembangunan sanitasi dilakukan terlebih dahulu dengan melakukan analisis yang menggunakan instrumen yang telah tersedia, yaitu: instrumen Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK). Analisa tersebut menggunakan data mengenai kondisi ekstrim di daerah yaitu adanya genangan, kondisi CBD saat ini dan akan datang (sesuai arahan RTRW).

Penentuan prioritas didasarkan pada tingkat area beresiko, kondisi tingkat layanan sanitasi, fungsi peruntukan kawasan perkotaan, luas wilayah terbangun dengan kepadatannya untuk estimasi kepadatan penduduk 5 tahun kedepan. Dari hasil input data pada Instrumen SSK dapat diketahui sistem dan zona sanitasi





untuk setiap desa/kelurahan.

Berdasarkan perumusan pentahan dan prioritas sebagaimana dijelaskan pda alinea diatas, maka strategi layanan sanitasi dikembangkan melalui pentahapan dan zonasi, dengan pentahapan sebagai berikut :

1. Tahap jangka pendek

Tahapan jangka pendek merumuskan kegiatan yang bersifat segera dilakukan untuk mengatasi persoalan yang mendesak perlu segera diatasi karena berdampak berat, dan pencapaian kerjanya untuk 2 tahun dari tahap awal pelaksanaan rencana, yaitu tahun 2025 s/d 2026

2. Tahap jangka menengah

Tahapan jangka menengah merumuskan kegiatan yang bersifat belum terselesaikan sebagaimana yang telah dirumuskan dan diamanatkan dalam SSK pertama. Kegiatannya bersifat perlu segera dilakukan untuk mengatasi persoalan yang bersifat tidak mendesak. Jangka waktu untuk diselesaikan dalam 5 tahun dari tahap awal pelaksanaan rencana (n+5).

3. Tahap jangka panjang,

Tahapan jangka panjang merumuskan kegiatan yang bersifat pengembangan lebih lanjut menuju kondisi sanitasi di daerah yang ingin dituju sebagaimana visi dan





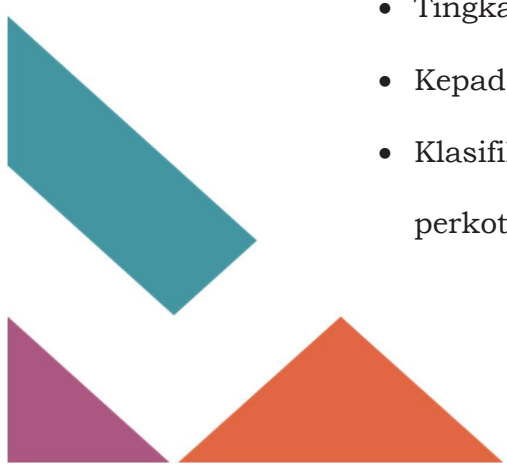
misi Kepala Daerah dan Wakilnya.

3.3. Tahapan Pengembangan Sanitasi

Tahapan pengembangan sanitasi akan mencakup 3 hal, yaitu tentang air limbah domestik, persampahan, dan drainase lingkungan.

A. Tahapan Pengembangan Air Limbah Domestik

Pengelolaan prasarana dan sarana air limbah pada setiap daerah mempunyai karakteristik yang berbeda, baik tingkat pelayanan, jenis dan jumlah pelayanannya. Di dalam SSK Kabupaten Bandung Barat pada periode lalu ini telah dilakukan penentuan wilayah prioritas pengembangan sistem pengelolaan air limbah. Beberapa kriteria telah digunakan dalam penentuan prioritas tersebut dan masih selaras untuk digunakan, yaitu:

- Data kondisi ekstrem,
 - Wilayah CBD (Center of Business Development) saat ini dan pengembangan yang akan datang berdasarkan arahan RTRW,
 - Prioritas berdasarkan tingkat area beresiko resiko 3 dan 4,
 - Kondisi air tanah,
 - Tingkat layanan sanitasi (air limbah),
 - Kepadatan penduduk,
 - Klasifikasi fungsi pengembangan kawasan (sebagai perkotaan atau perdesaan).
- 



Berdasarkan kriteria tersebut melalui instrumen SSK dihasilkan pengelolaan air limbah dalam perencanaan untuk pengembangan perencanaan jangka menengah (5 tahun). Di mana pengelolaan air limbah domestik dapat dilakukan melalui 4 (empat) sistem yaitu:

- Sistem pengolahan air limbah stempat skala individual (on site);
- Sistem pengolahan air limbah stempat skala komunal
- Sistem pengolahan air limbah domestik terpusat pada kawasan kepadatan sedang (off site kepadatan sedang)
- Sistem pengolahan air limbah domestik terpusat skala kota (off site sistem per-kotaan).

Sistem pengelolaan air limbah yang telah terstruktur tersebut selanjutnya dapat dibuatkan suatu peta yang menggambarkan kebutuhan dan pengembangan sistemnya, peta tersebut terbagi dalam beberapa zonasi, dimana zona-zona tersebut jika dirangkaikan akan menjadi dasar didalam perencanaan pengembangan sanitasi air limbah domestik jangka panjang, yang pada akhirnya akan menjadi sistem pengelolaan air limbah terpusat (off site sistem).

Dalam dokumen SSK juga melakukan penentuan wilayah prioritas didalam pengembangan sistem pengelolaan air limbah (apakah on site maupun off site) secara umum. Beberapa kriteria



telah digunakan dalam penentuan prioritas tersebut, sebagaimana halnya telah disebutkan pada alinea diatas, yaitu analisa yang mencakup :

- Kepadatan penduduk,
- Klasifikasi fungsi kawasan (perkotaan atau perdesaan),
- Karakteristik tata guna lahan/Center of Business Development (CBD) (komersial atau rumah tangga), serta
- Resiko kesehatan lingkungan.

Rencana pengembangan tersebut diilustrasikan sebagai berikut:

Zona 1, merupakan area dengan tingkat resiko sangat kecil yang dapat diatasi dalam jangka pendek dengan pilihan sanitasi setempat dalam skala rumah tangga (household based).

Tahapan penanganannya dengan kegiatan utama untuk ada perubahan perilaku dan pemicuan (dalam peta desa/kelurahan yang termasuk zona 1 ditampilkan dalam warna hijau muda).

Zona 2, merupakan area dengan tingkat resiko kecil namun perlu diatasi, dan dapat dilakukan dalam jangka pendek dengan pilihan sanitasi setempat dalam skala rumah tangga (household based).

Zona 3, merupakan area dengan tingkat resiko menengah yang dapat diatasi dalam jangka pendek dengan perubahan perilaku yang dilakukan dengan program-program pemicuan



(CLTS).

Tahapan penganannya oleh karena area tersebut merupakan daerah padat penduduk, maka pemilihan sistemnya adalah system komunal (dalam peta desa/ kelurahan yang termasuk zona 2 ditampilkan dalam warna kuning)

Zona 4, merupakan area dengan tingkat resiko tinggi yang diatasinya dalam jangka panjang dengan perubahan perilaku, dilakukan melalui program-program pemicuan (CLTS).

Tahapan penganannya oleh karena area tersebut daerah padat dan penduduk di kawasan padat, maka pemilihan sistemnya adalah system off-site kepadatan sedang. (dalam peta desa/kelurahan yang termasuk zona 3 ditampilkan dalam warna merah).



B. Tahapan Pengembangan Persampahan

Persampahan merupakan permasalahan yang rata-rata dihadapi oleh Pemerintah Daerah/Kota, dan sampah rumah tangga merupakan salah satu jenis sampah yang dominan, khususnya di wilayah perkotaan. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk pengelolaan sampah merupakan salah satu kendala dalam pengendalian pencemaran oleh sampah, di samping permasalahan keterbatasan sarana dan prasarana persampahan yang menyebabkan masyarakat seringkali membuang sampah sembarangan dan membakar sampah.

Menyadari bahwa masalah sampah rumah tangga tidak bisa diselesaikan hanya oleh Pemerintah, maka sudah saatnya masyarakat berperan aktif untuk menanganinya melalui pemilahan sampah dan komposting. Masyarakat diharapkan dapat membiasakan diri untuk mengikuti program 3R (Reduce-Reuse-Recycle). Pengelolaan persampahan dilaksanakan dengan sistem berikut :

1. Pengurangan sampah.

Penanganan dan pengurangan sampah dimulai dari sumbernya, penanganan ini banyak dilakukan di masyarakat melalui sistem TPS-3R.

2. Pengumpulan sampah dan penyapuan.

Kegiatan ini dilakukan oleh masing-masing unit



penghasil sumber sampahnya, sampah yang terkumpul dilakukan pengangkutan dari lingkungan tersebut ke tempat penampungan sampah komunal, kemudian petugas mengambil sampah dari tempat pengumpulan komunal tersebut untuk dibawa ke TPS yang selanjutnya dibawa ke TPA

3. Pengangkutan sampah.

Dilakukan dari TPS menuju TPA dilakukan oleh petugas dari dinas/instansi pengelolaan persampahan.

Mengacu pada kriteria dalam Standar Pelayanan Minimum (SPM), maka wilayah pengembangan pelayanan persampahan di Kabupaten Bandung Barat diklasifikasikan dengan 2 (dua) kriteria utama dalam penetapan prioritas penanganan persampahan saat ini, perumusan berdasarkan hasil analisa yang meliputi:

- Tata guna lahan/klasifikasi wilayah (komersial/CBD,
- Permukiman,
- Fasilitas umum, terminal, dan sebagainya), dan
- Berdasarkan kepadatan penduduk.

Dari hasil penentuan wilayah dan kebutuhan pelayanan persampahan di Kabupaten Bandung Barat terdapat 4 (empat) zona yang terdiri dari:

- **Zona 1**, merupakan area padat dan kawasan bisnis (CBD) karena itu harus terlayani penuh 100%.



Pola pelayanannya disertai dengan dilengkapi adanya penyapuan jalan (*full coverage dan street sweeping*), sampah yang terkumpul harus segera diatasi dengan pilihan sistem langsung ke TPA dalam jangka waktu pendek.

- **Zona 2**, merupakan area padat namun bukan kawasan bisnis (*Central Business District/CBD*) karena itu harus terlayani penuh 100% (*full coverage*).

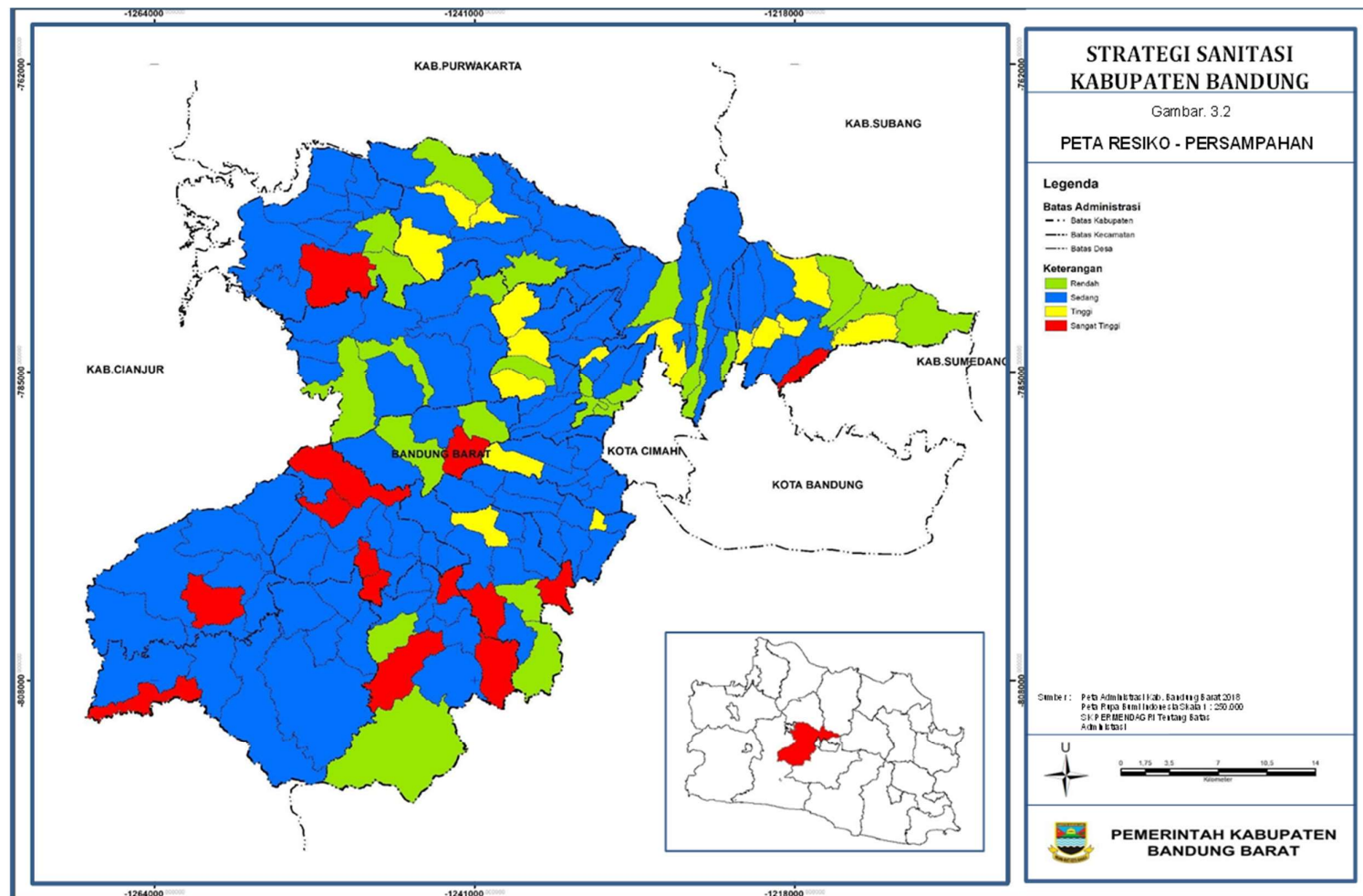
Pola pelayanannya diatasi dengan pilihan system tidak langsung ke TPA, tetapi dengan waktu tetap dalam jangka waktu pendek.

- **Zona 3**, merupakan area yang dalam jangka waktu menengah (*medium term action*) harus terlayani 100%.

Pola pelayanannya dilakukan dengan sistem tidak langsung, yaitu dari sumber ke TPS, dan baru kemudian ke TPA.

- **Zona 4**, merupakan area yang harus terlayani dengan sistem tidak langsung.

Pola pelayanannya yaitu dari rumah tangga ke Tempat Pengumpulan Sementara (TPS), kemudian baru dilakukan pengangkutan ke Tempat Pengolahan Akhir (TPA), dari waktu relatif ada keleluasaan tetapi tetap menjaga tidak terjadi pembusukan.





C. Tahapan Pengembangan Drainase Lingkungan

Pengelolaan drainase pada daerah yang dengan kondisi alamnya mendukung pola pengaliran grafitasi secara alamiah, sebagaimana pada wilayah dengan tipografi dan kemiringan relatif tinggi maka sistem drainase kurang diperhatikan, karena pada wilayah tersebut hampir tidak ada banjir. Namun dalam hal dampak lingkungan masalah drainase dapat berakibat terjadi longsor, atau dalam jangka panjang dapat terjadi pergerakan tanah.

Dampak lingkungan terkait drainase penyebab utamanya sering oleh faktor manusia yang melakukan perubahan tata guna lahan dengan mengabaikan ketentuan dan aturan, selain tentunya faktor alam dengan daya dukungnya. Masterplan Drainase Kabupaten Bandung Barat sudah mendesak diperlukan karena perencanaan yang ada masih terkait dengan disain wilayah Bandung Raya, sehingga banyak penyesuaian untuk konsep pengembangan Kabupaten Bandung Barat sebagai daerah otonom.

Dalam menentukan wilayah pengembangan saluran drainase yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing wilayah di tingkat desa/kecamatan, maka perlu disusun prioritas pengembangan sistem drainase. Selanjutnya fokus dalam hal penataan drainase lingkungan ini adalah dalam lingkup di kawasan permukiman dan kawasan pengembangan khusus lainnya, dimana dalam hal penentuan daerah prioritasnya akan disusun didasarkan atas 5



(lima) kriteria seleksi yang mengacu ke SPM, yaitu:

- Kepadatan penduduk,
- Tata guna lahan (fungsi pengembangan kawasan sebagai perdagangan, jasa, maupun permukiman),
- Fungsi wilayah sebagai perkotaan atau perdesaan,
- Daerah genangan air hujan, menjadi prioritas berdasarkan tingkat resiko.
- Tingkat resiko kesehatan.

Perencanaan penanganan drainase di Kabupaten Bandung Barat oleh faktor fisik topografi dan kondisi wilayah 97% aman dari banjir, maka menjadi langkah untuk masa yang akan datang. Dapat dijelaskan dengan membagi wilayah dengan kriteria zona penanganan sebagai berikut:

Zona 1, Penanganan Jangka Pendek Terhadap Genangan.

Dilakukan pada area dengan tingkat resiko yang relatif besar untuk terjagi genangan jika terjadi hujan, diprediksi masih dapat diatasi dan pembangunan tidak terlalu berat sehingga dapat dilakukan inplementasinya dalam jangka pendek.

Zona 2, Penanganan Jangka Menengah Terhadap Genangan.

Dilakukan pada area dengan tingkat resiko menengah yang penangananya perlu diatasi dengan perencanaan yang seksama menyangkut sistem jaringan mikro-sekunder. Penanganan pembangunan relatif berat dan dengan jangkauan



relatif panjang atau luas sehingga didalam di inplementasinya dapat memakan waktu beberapa tahun anggaran.

Zona 3, Penanganan Jangka Menengah Ke Jangka Panjang Terhadap Antisipasi Terjadi Banjir.

Dilakukan pada area dalam skala makro wilayah oleh karena walau saat ini relatif aman terhadap banjir, namun dari posisi geografis topografi yang berada di dataran tinggi dengan kemiringan tinggi masalah air bandang dapat sewaktu-waktu terjadi bahkan pergerakan tanah atau longsor, sehingga perlu mempersiapkan sistem drainase wilayah. Perencanaan dan implemen-tasi rencana pada sistem drainase skala wilayah memerlukan waktu jangka menengah ke arah jangka panjang.

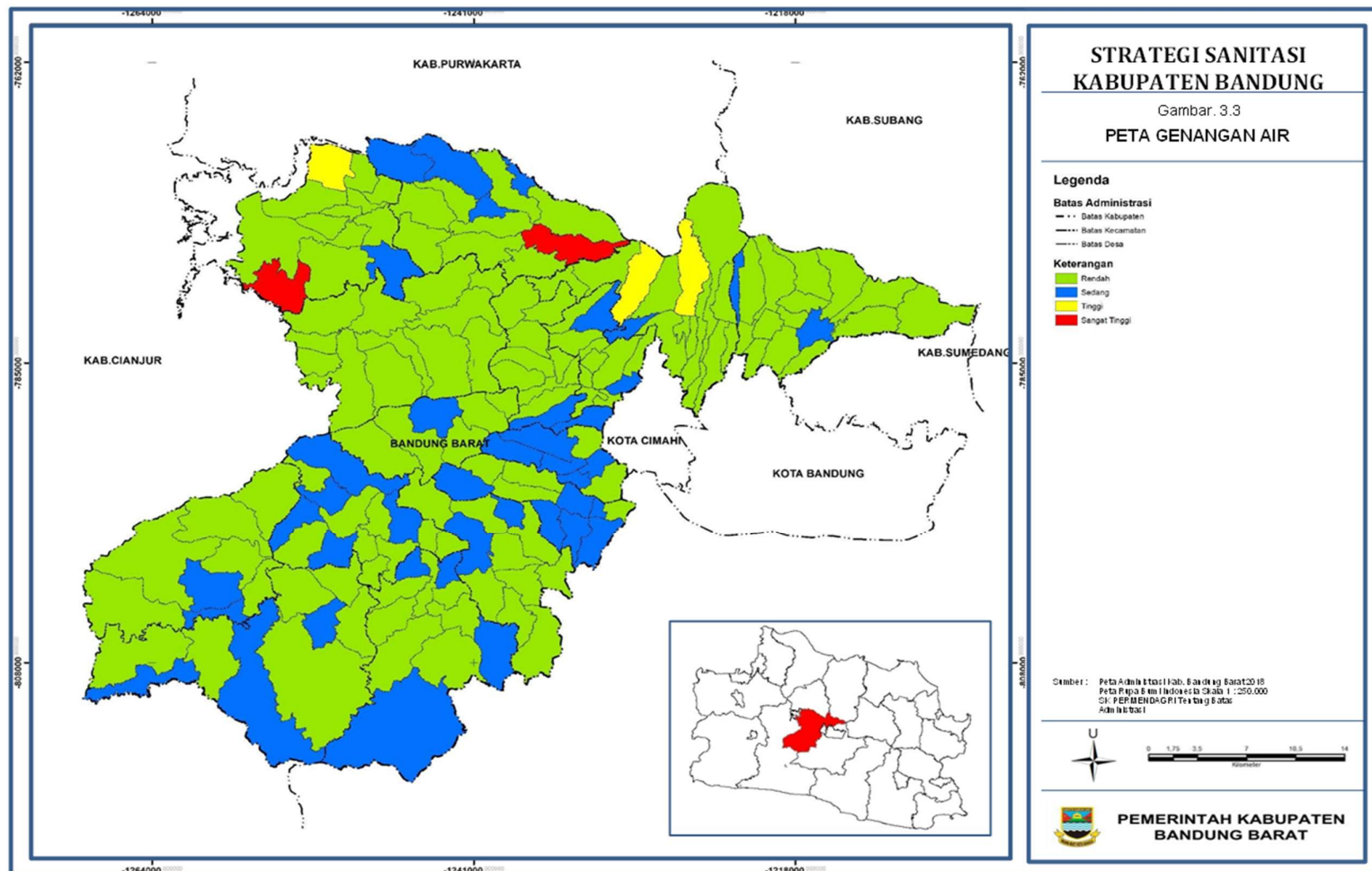
Zona 4,Penanganan Jangka Panjang Terhadap Antisipasi Terjadi Banjir, Longsor, dan Pergerakan Tanah.

Dilakukan pada area dalam radius skala makro wilayah mencakup wilayah konservasi di hulu. Oleh karena dalam sistem drainase sungai adalah bagian dari drainase sebagai sistem primernya, maka pada jaringan sungai juga perlu diperhatikan agar fungsinya tetap aman, termasuk penataan jalur hijau sungai.

Dalam penataan sistem sungai sebagai drainase di bagian hulu, maka akan ada kewenangan Pusat dan Provinsi sebagai bagian tanggung jawab, termasuk dengan wilayah



perbatasan perlu ada koordinasi. Dari posisi geografis topografi yang berada di dataran tinggi dengan kemiringan tinggi masalah air bandang dapat sewaktu-waktu terjadi, sehingga perlu mempersiapkan sistem drainase wilayah. Oleh karena perencanaan dan implementasi rencana dapat lintas antar Pemerintahan, maka memerlukan waktu jangka panjang.





BAB IV

STRATEGI PENGEMBANGAN

Strategi Percepatan Pengembangan Sanitasi didefinisikan sebagai upaya agar pembangunan sanitasi mudah diwujudkan, untuk mencapai tujuan tersebut akan ditempuh dengan berbagai cara atau pendekatan. Perumusan tujuan perlu ditetapkan sehingga tujuannya menjadi jelas terhadap apa-apa yang hendak dicapai didalam pengelolaan sanitasi. Tujuan tersebut dirumuskan salah satunya berdasarkan hasil dari penetapan tahapan Pengembangan Sanitasi. Terdapat beberapa pengertian dari tujuan, diantaranya adalah sesuatu yang ingin dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu, mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategi.

Sasaran adalah tujuan yang hendak dicapai, yaitu sebagai hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dan dalam kurun waktu yang ditargetkan atau jelas. Dengan adanya sasaran yang telah ditetapkan, maka strategi untuk mencapainya dapat disusun dengan memperhatikan hasil identifikasi dari isu-isu strategis yang sudah terkaji di dalam Buku Putih Sanitasi. Terutama mengenai isu permasalahan strategis yang mendesak, dan Posisi Pengelolaan Sanitasi Saat ini. Tujuan dan



sasaran pengembangan sanitasi

4.1. Arah Pengembangan Air Limbah Domestik

1. Tujuan

Ditinjau dari faktor internal, ada beberapa kelemahan mengenai Pengelolaan Air Limbah Domestik, diantaranya :

- Mengacu cakupan penggunaan jamban pribadi sebesar 94% dan sisanya 6 % penggunaan jamban umum atau MCK, dimana pengolahan menggunakan cubluk masih sangat dominan yaitu sebesar 42%
- Penggunaan septictank baru 85% dan persentase yang tidak aman sebesar 6%.
- Belum memiliki Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja (IPLT).
- Terhadap buangan bekas mandi dan cuci penggunaan SPAL (Saluran Pembuangan Air Limbah 85 %, dan persoalannya adalah pada pengolahannya.
- Belum ada UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah) yang khusus mengelola air limbah domestik di Kabupaten Bandung Barat.
- Dalam hal keuangan, proporsi anggaran yang tersedia masih terbatas dibandingkan dengan kebutuhan untuk sarana dan prasarana air limbah.

Ditinjau dari faktor eksternal belum mengoptimalkan peluang



sumber dana untuk pengelolaan air limbah domestik baik bersumber dari dana APBN ataupun CSR, ataupun dana hibah yang bersumber dari dana lainnya. Beberapa peluang tersebut antara lain :

- Berbagai peluang program dari pusat dan donatur mengenai air limbah belum dioptimalkan, baik itu untuk sistem on site maupun untuk sistem off site.
- Peluang lainnya dalam aspek keuangan, yaitu saat ini peluang pendanaan CSR yang bersumber dari BUMN dan sektor swasta belum termanfaatkan dengan baik.

Selain dalam hal teknis operasional dan keuangan, peluang lainnya dalam pengelolaan air limbah domestik adalah dalam hal pelibatan masyarakat/PMJK (Pemberdayaan Masyarakat dengan Pelibatan Jender dan Kemiskinan) dan sektor swasta. Ketersediaan kader, LSM dan kelompok masyarakat peduli lingkungan yang saat ini telah ada sebenarnya dapat menjadi peluang dalam pengelolaan air limbah domestik.

2. Sasaran

Pengembangan air limbah domestik hingga tahun 2029 ditetapkan tujuan berupa tercapainya standar pelayanan minimal untuk pengelolaan air limbah domestik dengan sistem on-site serta meningkatnya cakupan layanan pengelolaan air limbah domestik dengan sistem off-site. Terkait tujuan tersebut, sasaran yang



ditetapkan dalam pengelolaan air limbah domestik, yaitu:

- Meningkatnya cakupan pelayanan pengelolaan air limbah domestik dengan sistem on-site menjadi 70 % pada tahun 2029.
- Menciptakan pelayanan off site pengelolaan air limbah domestik dari 0 % menjadi 20 % pada tahun 2029.

Untuk pengelolaan air limbah domestik dengan sistem off-site, target sasaran ditetapkan lebih rendah dari standar pelayanan minimal yang disyaratkan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 14 PRT/M/2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Penetapan target pengelolaan air limbah domestik sistem off-site di Kabupaten Bandung Barat yang berada di bawah standar tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan daerah dalam pendanaan sanitasi.

3. Strategi

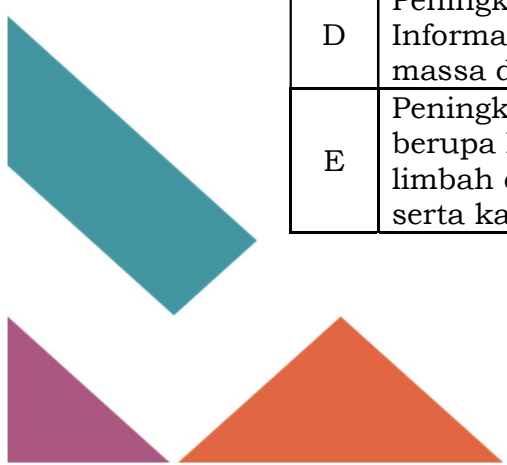
Berikut ini merupakan hasil penilaian Analisa SWOT terhadap kondisi sanitasi

NO	FAKTOR	BOBOT	RATING	JUMLAH
	LINGKUNGAN INTERNAL			
	Kekuatan			
A	Adanya Pembangunan MCK dan MCK (<i>plus</i>)	0,21	4	0,86
B	Sudah adanya Out Plan	0,21	4	0,86
C	Adanya Dokumen RPJMD	0,14	3	0,43



NO	FAKTOR	BOBOT	RATING	JUMLAH
D	Adanya Dokumen RTRW	0,21	3	0,64
E	Adanya Media Komunikasi yang dapat dimanfaatkan untuk sosialisasi	0,21	3	0,64
	JUMLAH	1,00		3,43
	Kelemahan			
A	Belum Adanya IPLT/IPAL Komunal	0,20	4	0,80
B	Belum adanya Master Plan dan DED	0,20	4	0,80
C	Belum Adanya Perda khusus limbah	0,20	4	0,80
D	Belum ada lembaga khusus yg menangani air limbah	0,20	3	0,60
E	Belum memanfaatkan media lokal untuk sosialisasi	0,20	3	0,60
	JUMLAH	1,00		3,60
	SELISIH KEKUATAN - KELEMAHAN			- 0,17

NO	FAKTOR	BOBOT	RATING	JUMLAH
	LINGKUNGAN EKSTERNAL			
	Peluang			
A	Pengembangan Pengelolaan Limbah dengan sistem Komunal	0,27	3	0,82
B	Sudah Diusulkan Perencanaan Master Plane IPLT dan IPAL	0,18	3	0,55
C	Peningkatan Pembiayaan Pengelolaan Air Limbah	0,27	2	0,55
D	Peningkatan media Informasi melalui media massa dan elektronik	0,09	2	0,18
E	Peningkatan Kualitas berupa Bintek air limbah dan penyaluran serta kampanye air	0,18	3	0,55





NO	FAKTOR	BOBOT	RATING	JUMLAH
	limbah di tingkat masyarakat			
	JUMLAH	1,00		2,64
	Tantangan			
A	Penyamaan persepsi mengenai pengelolaan khusus air limbah belum jelas SKLPD yang akan mengelolanya	0,21	3	0,64
B	Regulasi serta kebikajakan mengenai air limbah belum ada	0,21	4	0,86
C	Kemampuan APBD dalam membiayai pengelolaan Air Limbah belum maksimal	0,21	2	0,43
D	Pengaturan pengelolaan media yang belum jelas	0,14	3	0,43
E	Peran dan keaktifan SKPD dalam pengelolaan Air Limbah terus ditingkatkan	0,21	3	0,64
	JUMLAH	1,00		3,00
	SELISIH PELUANG - TANTANGAN			- 0,36

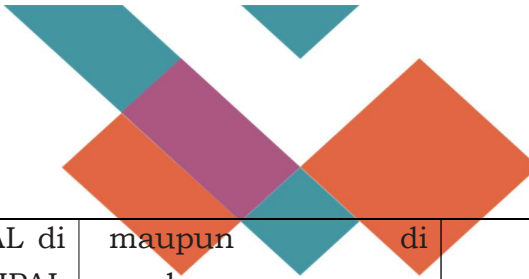
Hasil Penilaian analisis SWOT menunjukkan hasil sebagai berikut:

- Analisis nilai pada kondisi internal organisasi menunjukkan nilai kekuatan-kelemahan adalah 0,17.
- Analisis nilai pada kondisi eksternal organisasi menunjukkan nilai peluang-tantangan adalah 0,36.

Beberapa isu strategis terkait limbah domestik berdasarkan analisa SWOT antara lain :

- 
- Pertumbuhan penduduk yang makin berkembang setiap tahunnya sehingga mengakibatkan bertambahnya produktivitas air limbah
 - Sistem pengolahan air limbah belum memiliki Instalasi pengolahan limbah terpusat, baik lumpur tinja maupun limbah rumah tangga
 - Kurangnya koordinasi antar SKPD terkait pengolahan air limbah domestik sehingga peran dan perhatian pemerintah sangat kurang dirasakan dalam mengatasi permasalahan ini
 - Perlu digalakkan komitmen bersama antara pemerintah dan masyarakat untuk bersama-sama menanggulangi permasalahan limbah domestik dan perlu adanya kontrol dari legislatif
 - Masih kurangnya dukungan media komunikasi dalam mempromosikan kegiatan perilaku hidup bersih dan sehat
 - Pembiayaan yang belum maksimum
 - Belum adanya keterlibatan Dunia Usaha yang peduli terhadap pengelolaan air limbah
 - Regulasi kebijakan terkait limbah belum ada
- 

Tujuan	Sasaran		Strategi
	Pernyataan Sasaran	Indikator Sasaran	
1.Peningkatan akses ke prasarana dan sarana jamban / MCK. 2.Tercapainya Standar Pelayanan Minimal pengelolaan air limbah domestik untuk perbaikan kesehatan masyarakat. 3.Menciptakan pengelolaan air limbah domestik dengan sistem off site di Kabupaten Bandung Barat.	1.Pengolahan air limbah dengan sistem: - On site / setempat Individual. - On site / setempat komunal / MCK umum. 2.Jangka panjang menggunakan sistem off site / terpusat medium. Berlanjut menjadi Off site/ terpusat jangka panjang, untuk: kawasan perdagangan, wisata, dan CBD.	1.Sudah tidak ada yang melakukan BABs. 2.Penggunaan cubluk yang semula 43,3 %, akan berkurang. 3.Penggunaan tangki septik yang aman secara teknis akan meningkat : - pembangunan IPAL komunal. - pembangunan IPLT. 4.Meningkatnya cakupan layanan pengelolaan air limbah domestik, baik diperkotaan	1.Memprioritaskan pembangunan sanitasi bagi kelompok masyarakat MBR. 2.Meningkatkan penggunaan tanki septik bersuspek aman oleh rumah tangga. 3.Perencanaan tersistem dalam Masterplan Pengelolaan Air Limbah Domestik, tahun 2025. 4.Memiliki perencanaan DED untuk pembangunan sarana dan prasarana air limbah yang diprogramkan.



	3.Membangun IPAL di Cipatat dan IPAL Batujajar.	maupun di perdesaan.	
Kelembagaan .Meningkatkan kapasitas kelembagaan pengelola prasarana dan sarana air limbah domestik.	1.Peningkatan kapasitas kelembagaan pengelola prasarana dan sarana air limbah domestik : Dinas dan UTPD, 2.Mendorong peningkatan kemauan politik (<i>political will</i>) para pemangku kepentingan untuk	1.Srtuktur dan penerapan penanganan yang melibatkan secara proporsi tanggungjawab masyarakat, swasta, perusahaan di wilayah tempatnya. 2.Mendorong pembentukan dan perkuatan institusi pengelola air limbah	1.Meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar organisasi perangkat daerah dalam pengelolaan air limbah domestik 2.Mengoptimalkan kelembagaan dan aparatur dalam pengelolaan air limbah domestik



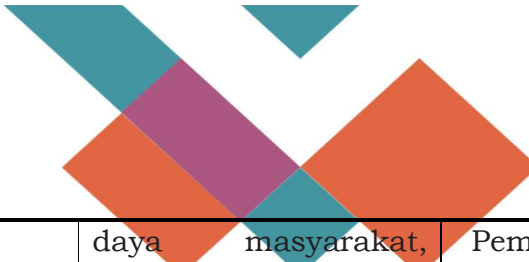


	memberikan prioritas yang lebih tinggi terhadap pengelolaan air limbah permukiman	permukiman.	
Peraturan Pengembangan perangkat peraturan dan perundangan penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik.	1.Memiliki peraturan perundangan Daerah yang mengatur sistem pengelolaan air limbah domestik. 2.Tersedianya perangkat peraturan untuk sistem kerja sama dalam pengelolaan air limbah domestik dengan pihak ketiga.	1.Sosialisasi ke masyarakat akan pentingnya kesehatan dengan menjaga lingkungan, dan berperan aktif turut mengelola air limbah domestik. 2.Advokasi kepada instansi, perusahaan, dunia usaha, sekolah, dan masyarakat.	Meningkatkan efektifitas peraturan daerah dalam mengatur pengelolaan air limbah domestik.
Masyarakat/Publik			





Peningkatan peran masyarakat, dan dunia usaha / swasta dalam penyelenggaraan sistem pengelolaan air limbah domestik sesuai proporsinya.	Meningkatkan peran dunia usaha / swasta dalam pengelolaan air limbah yang ada di wilayahnya.	Peningkatan partisipasi masyarakat, dan dunia usaha / swasta dalam penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik melalui penyediaan jamban / MCK komunal, dan tangki septik komunal..	1.Meningkatkan keterlibatan masyarakat dan sektor swasta dalam pengelolaan air limbah domestik yang berwawasan lingkungan. 2.Melakukan sosialisasi dan penyuluhan mengenai pengelolaan air limbah domestik yang dilakukan secara kontinyu. 3.Memfasilitasi pembentukan dan perkuatan kelembagaan pengelola air limbah permukiman ditingkat masyarakat. 4.Kerjasama dengan media dan sistem komunikasi yang ada dalam sosialisasinya.
Pembiayaan			
1.Meningkatkan dan	1.Sumber pendanaan	Meningkatnya sumber	1.Pembiayaan bersama



mengembangkan sumber pendanaan untuk pem-bangunan prasarana dan sarana air limbah domestik yang kontinyu setiap tahunnya. 2.Pengembangan alternatif sumber pendanaan pengelolaan bagi air limbah domestik.	pembangunan prasarana dan sarana air limbah pemukiman meningkat. 2.Mendorong berbagai alternatif sumber pembiayaan untuk mendukung pengelolaan air limbah domestik.	daya masyarakat, swasta / perusahaan, maupun sekolah dalam berpartisipasi untuk lingkungan.	Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat. 2.Pembiayaan bantuan dari swasta yang beroperasi di Kabupaten Bandung Barat, serta bantuan dari Luar Negeri yang tidak mengikat.
--	---	--	--





4.2. Arah Pengembangan Persampahan

1. Tujuan

Sektor persampahan dalam analisa memiliki keunggulan dan kelemahan, baik itu ditinjau dari faktor internal maupun ditinjau dari faktor eksternal. Berdasarkan hasil analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunity and Threat), dari faktor internal pengelolaan persampahan Kabupaten Bandung Barat memiliki beberapa kekuatan (strength) dan kelemahan (weakness).

- Aspek kekuatan dalam pengelolaan persampahan, yaitu:

Aspek kelembagaan, dimana saat ini telah tersedia organisasi dan regulasi pengelolaan persampahan berupa perda retribusi dan perda pengelolaan sampah.

- Aspek kelemahan dalam pengelolaan persampahan, yaitu:

Tidak ada otoritas penuh dalam pengambilan kebijakan dalam pengelolaan persampahan oleh bidang yang khusus mengelola persampahan dan kebersihan.

Kelemahan lain dalam pengelolaan persampahan yaitu belum efisiennya ritasi pengangkutan sampah.

2. Sasaran

Sasaran dalam pengelolaan persampahan meliputi pengelolaan sampah rumah tangga, pengangkutan sampah, pemilhan atau pemisahan sampah rumah tangga.

Pada saat ini sekitar 2,3% sampah masih dibuang ke Sungai

atau kali, 3,7% di buang ke lahan kosong. Sasaran dalam penanganan sampah yaitu mengurangi hal tersebut di atas serta meningkatkan jumlah persentase dari dari dikumpulkan dan di buang ke TPS. Serta meningkatkan pemilahan sampah menuju 80% dari awal 69%.

3. Strategi

Berikut ini merupakan hasil penilaian Analisa SWOT terhadap kondisi persampahan.

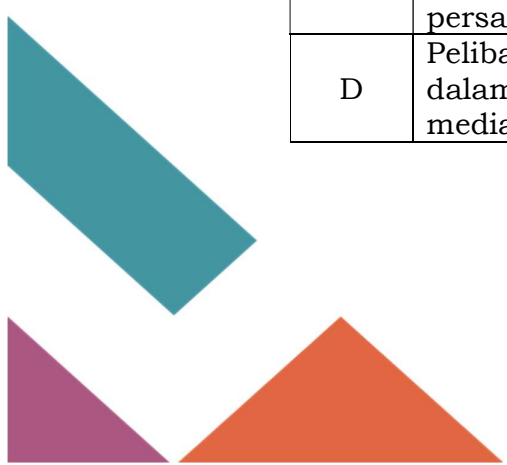
NO	FAKTOR	BOBOT	RATING	JUMLAH
	LINGKUNGAN INTERNAL			
	Kekuatan			
A	Ada TPA Regional di Kabupaten Bandung Barat	0,2	4	0,8
B	Sudah ada UPTD khusus persampahan	0,2	4	0,8
C	Anggaran Pembiayaan persampahan sudah mncapai rata-rata 5 % per tahun	0,2	4	0,8
D	Sudah ada media informasi berupa papan infrmasi dan baliho	0,2	4	0,8
E	Sudah ada PERDA persampahan	0,2	4	0,8
	JUMLAH	1		4,00
	Kelemahan			
A	Belum terstruktur secara sistem didalam koordinasi pengelolaan Persampahan dengan baik baik dari	0,15	4	0,62



NO	FAKTOR	BOBOT	RATING	JUMLAH
	pemerintah hingga masyarakat.			
B	Regulasi Kelembagaan belum lengkap mengingat belum dipersiap-kan Perda nya	0,23	2	0,46
C	Pembiayaan masih di standarkan untuk skala kota kecil	0,23	4	0,92
D	Media hanya bersifat papan informasi saja (baliho)	0,15	2	0,31
E	Jumlah armada dan personil persampahan belum mampu menjangkau dan melayani pengelolaan persampahan se wilayah jauh	0,23	2	0,46
	JUMLAH	1,00		2,77
	SELISIH KEKUATAN-KELEMAHAN			1,23



NO	FAKTOR	BOBOT	RATING	JUMLAH
	LINGKUNGAN EKSTERNAL			
	Peluang			
A	Peningkatan TPA dari Open Dumping ke Sanitary Landfill	0,23	4	0,92
B	Adanya Lembaga Peduli /LSM yang konsen terhadap Sampah	0,23	3	0,69
C	Peningkatan Pembiayaan dengan fokus peningkatan kualitas TPA dan Infrastruktur Persampahan	0,23	4	0,92
D	Peningkatan media Informasi melalui media massa dan elektronik	0,08	2	0,15
E	Penambahan jumlah armada dan personil petugas persampahan serta sarana TPS	0,23	2	0,46
	JUMLAH	1,00		3,15
	Tantangan			
A	Koordinasi antar SKPD masih lemah dalam pengelolaan persampahan	0,23	4	0,92
B	Kurangnya tenaga ahli dan tenaga manajemen persampahan	0,15	3	0,46
C	Peningkatan biaya APBD khusus persampahan	0,15	2	0,31
D	Pelibatan masyarakat dalam pengembangan media informasi	0,23	3	0,69





NO	FAKTOR	BOBOT	RATING	JUMLAH
E	Peningkatan peran serta masyarakat melalui peningkatan TPST dan TPS di tingkat kecamatan	0,23	3	0,69
	JUMLAH	1,00		3,08
	SELISIH PELUANG-TANTANGAN			0,08

Dari hasil penilaian analisis SWOT menunjukkan hasil sebagai berikut :

- Analisis nilai pada kondisi internal organisasi menunjukkan nilai selisih kekuatan kelemahan adalah 1,23.
- Analisis nilai pada kondisi eksternal organisasi menunjukkan nilai selisih peluang Tantangan adalah 0,08.

Untuk mengatasi permasalahan subsektor persampahan isu strategis yang perlu dikembangkan adalah antara lain :

- Penanggulangan persampahan bukan hanya menjadi tanggungjawab pemerintah saja tetapi menjadi tanggungjawab bersama, bersinergi untuk penanganan masalah persampahan
- Lemahnya pendanaan menjadi perhatian khusus bagi kalangan pengambil kebijakan untuk menganggarkan lebih bagi pengelolaan persampahan

- 
- Sarana dan Prasarana yang tersedia belum mampu melayani pengolahan sampah
 - Keterbatasan kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) personil kebersihan
 - Regulasi kebijakan menyangkut pengelolaan persampahan belum maksimal

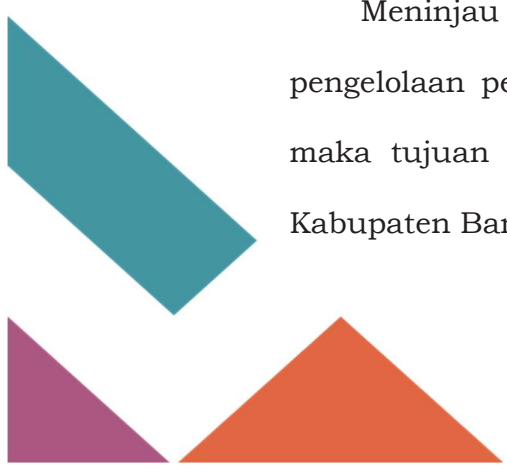
Beberapa peluang yang dimiliki Kabupaten Bandung Barat antara lain:

- Adanya LSM dan kelompok masyarakat yang aktif dan peduli dalam mengelola persampahan, serta
- Adanya peluang pendanaan pengelolaan persampahan dari program dan pendanaan dari pusat dan lembaga donor.

Sedangkan tantangan yang dihadapi antara lain:

- Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam mengelola persampahan skala rumah tangga maupun skala lingkungan,
- Belum ada peran serta swasta dalam mengelola persampahan.

Meninjau kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan pengelolaan persampahan di Kabupaten Bandung Barat di atas, maka tujuan yang ditetapkan dalam pengelolaan persampahan Kabupaten Bandung Barat hingga tahun 2029 yaitu:



- 
- Terwujudnya standar pelayanan minimal untuk pengelolaan persampahan pada tahun 2029.
 - Untuk mencapai tujuan tersebut ditetapkan sasaran berupa meningkatnya pemilahan sampah dari 69% menjadi 80% di tahun 2029
 - Meningkatnya cakupan layanan persampahan dengan sistem penanganan berbasis masyarakat dari 13.6 % pada tahun 2024 menjadi 30 % pada tahun 2029.



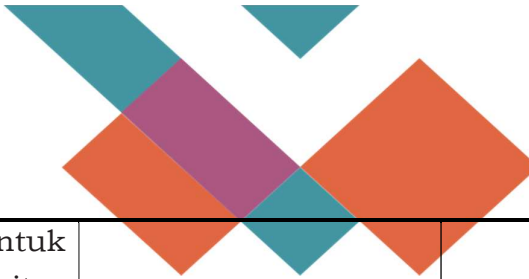
Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi
	Pernyataan Sasaran		
-Pengurangan timbulan sampah semaksimal mungkin dimulai dari sumbernya. -Terwujudnya Standar Pelayanan Minimal untuk pengelolaan persampahan pada tahun 2025.	1.Mengurangi timbulan sampah hingga 40% menjadi sampah yang terkelola. 2.Pelayanan sampah semula 13,6% dalam 5 tahun menjadi : -Penanganan langsung 30% -Penanganan tak langsung 35%.	Memberikan pelayanan persampahan merata di 16 wilayah kecamatan.	1.Meningkatan kuantitas infrastruktur persampahan. 2.Meningkatan kuantitas armada sampah :dum truk, gerobak / motor bak sampah. 3.Membangun/Mencari Alternatif mengingat TPA yang ada sudah Overload 4.Meningkatkan cakupan pelayanan TPS di setiap kecamatan dan ada pembangunan. 5.Pembuatan / Revisi Masterplan Persampahan agar inovasi dalam sistem cakupan dan sistem pengelolaannya.
Kelembagaan Meningkatkan	1.Peningkatan	1.Mendorong	1.Meningkatkan koordinasi dan





kapasitas kelembagaan dalam pengelolaan serta pelayanan prasarana dan sarana persampahan.	kapasitas kelembagaan pengelolaan prasarana dan sarana persampahan : Dinas dan UTPD. 2.Mendukung peran masyarakat, LSM, dan koperasi bank sampah turut serta dalam pengelolaan sampah, usaha daur ulang, atau pemanfaatan sampah domestik. 3.Mendorong peningkatan kemauan politik (<i>political will</i>) para pemangku kepen-	pembentukan dan perkuatan institusi pengelola persampahan. 2.Muncul inovasi pengelolaan sampah : a.Optimalisasi pelaksanaan pola 3R. b.Membagi tanggungjawab persampahan per sistem wilayah pelayanan TPST. c.Inovasi sampah dapat menjadi bahan baku komoditi ekonomi.	kerjasama antar organisasi perangkat daerah dalam pengelolaan persampahan. 2.Mengoptimalkan kelembagaan dan aparatur dalam pengelolaan persampahan.
---	--	--	---





	tingan untuk memberikan prioritas yang lebih agar usaha persampahan dapat menjadi kegiatan usaha yang layak secara ekonomi.		
Peraturan Pengembangan perangkat peraturan dan perundangan penyelenggaraan yang mendukung pengelolaan persampahan.	1.Mendorong pemerintah untuk menyiapkan peraturan, kewenangan dalam pengelolaan bersama sistem persampahan. 2.Tersedianya perangkat peraturan untuk sistem kerja sama dalam pengelolaan	1.Sosialisasi ke masyarakat akan penting-nya kesehatan dengan menjaga lingkungan, dan berperan aktif turut mengelola persampahan. 2.Advokasi kepada instansi, perusahaan, dunia usaha, sekolah, dan	Meningkatkan efektifitas peraturan daerah dalam mengatur pengelolaan persampahan.





	persampahan dengan pihak ketiga.	masyarakat.	
Masyarakat/Publik 1.Peningkatan peran masyarakat, dan dunia usaha, swasta, dan perusahaan agar turut dalam penyelenggaraan sistem pengelolaan sampah domestik sesuai proporsinya.	1.Meningkatkan partisipasi masyarakat, serta peran dunia usaha, swasta, dan perusahaan dalam pengelolaan sampah melalui pemilahan di sumbernya. 2.Membentuk pola hubungan kerja sama yang luas dalam pengelolaan sampah dan pemanfaatan sampah.	1.Pemilahan sampah pola sederhana di tingkat rumah tangga menjadi 40%. 2.Peningkatan peran masyarakat, dan dunia usaha, swasta, dan perusahaan di dalam penyelenggaraan sistem pengelolaan sampah: - Munculnya komoditi produk dari bahan baku sampah. - Munculnya “barang” yang dibutuhkan	1.Meningkatkan keterlibatan masyarakat dan sektor swasta dalam pengelolaan sampah domestik yang berwawasan lingkungan. 2.Melakukan kegiatan sosialisasi dan penyuluhan mengenai pengelolaan/pemilahan sampah domestik yang dilakukan secara kontinyu. 3.Memfasilitasi pembentukan dan perkuatan kelembagaan pengelola persampahan ditingkat masyarakat. 4.Kerjasama dengan media dan sistem komunikasi yang ada





		dari hasil daur ulang sampah.	dalam sosialisasinya.
Pembiayaan 1.Meningkatkan dan mengembangkan sumber pendanaan untuk prasarana dan sarana persampahan yang kontinyu setiap tahun-nya. 2.Pengembangan alternatif sumber pendanaan untuk pengelolaan persampahan.	1.Sumber pendanaan dapat meningkat di dalam pengelolaan persampahan. 2.Mendorong berbagai alternatif sumber pembiayaan untuk mendukung pengadaan prasarana dan sarana.	1.Meningkatnya sumber daya masyarakat, swasta / perusahaan, maupun sekolah dalam ber-partisipasi untuk lingkungan. 2.Meningkatkan peran tanggung-jawab masyarakat, swasta / dunia usaha untuk bersama dengan pemerintah mengelola persampah-an di wilayahnya.	1.Pembiayaan bersama Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat. 2.Pembiayaan bantuan dari swasta yang beropersional di Kabupaten Bandung Barat, serta bantuan dari Luar Negeri yang tidak mengikat. 3.Mendorong peningkatan pengelolaan sampah berbasis masyarakat.



4.3. Arah Pengembangan Drainase

Secara internal pengelolaan drainase Kabupaten Bandung Barat masih lemah dengan kondisinya yang memerlukan penanganan secara seksama, intensif, dan berkelanjutan. Hal ini ditunjukkan dengan hasil analisa SWOT sub-sektor drainase, dimana kekuatannya lebih besar dibandingkan dengan kelemahannya. Disisi lain, kendala yang menghadang adalah kondisi eksternal karena beberapa ancaman masih dominan dibandingkan dengan peluang yang. Kondisi ini menyebabkan pengelolaan yang harus dilaksanakan adalah memanfaatkan kekuatan yang ada untuk meraih peluang sekaligus mengurangi ancaman yang kemungkinan terjadi

NO	FAKTOR	BOBOT	RATING	JUMLAH
	LINGKUNGAN INTERNAL			
	Kekuatan			
A	Program Pembersihan Drainase sudah ada	0,21	3	0,64
B	Manajemen pengelolaan serta kebijakan akan pengelolaan drainase sudah terlaksana	0,21	3	0,64
C	Porsi pendanaan APBD khusus drainase sudah di anggarakan	0,14	2	0,29
D	Media informasi mengenai pengelolaan drainase	0,21	3	0,64



NO	FAKTOR	BOBOT	RATING	JUMLAH
	masih bersifat informasi			
E	Peran aktif masyarakat dalam pembersihan drainase sudah baik	0,21	3	0,64
	JUMLAH	1,00		2,86
	Kelemahan			
	Belum jelasnya target pengelolaan drainase makro kabupaten	0,21	4	0,86
	Koordinasi mengenai pengelolaan drainase belum jelas	0,21	4	0,86
	Kurangnya porsi APBD untuk drainase, alokasi setiap tahun tidak merata	0,14	3	0,43
	Sifat masih informasi di SKPD yang bersangkutan	0,21	3	0,64
	Kurangnya keinginan untuk meningkatkan penyuluhan, dan bintek ke masyarakat mengenai pengelolaan drainase	0,21	3	0,64
	JUMLAH	1,00		3,43
	SELISIH KEKUATAN-KELEMAHAN			- 0,57





NO	FAKTOR	BOBOT	RATING	JUMLAH
	LINGKUNGAN EKSTERNAL			
	Peluang			
A	Keinginan SKPD terkait untuk meningkatkan kinerja dalam pengelolaan drainase	0,21	2	0,43
B	Perencanaan yang baik dalam manajemen pengelolaan drainase utamanya SKPD khusus menangani pengelolaan drainase	0,21	2	0,43
C	Peningkatan pembiayaan pengelolaan drainase	0,14	2	0,29
D	Peningkatan jenis media informasi untuk pengelolaan drainase	0,21	3	0,64
E	Penyuluhan dan bimbingan kepada masyarakat dalam pengelolaan bidang drainase.	0,21	3	0,64
	JUMLAH	1,00		2,43
	Tantangan			
A	Master plane Drainase belum Ada.	0,15	4	0,62
	Regulasi serta kebijakan yang mengatur pengelolaan drainase belum jelas	0,23	4	0,92





NO	FAKTOR	BOBOT	RATING	JUMLAH
	Peningkatan pembiayaan drainase belum signifikan	0,15	3	0,46
	Media Komunikasi telah masuk dalam program media massa dan elektronik	0,23	2	0,46
	Peningkatan partisipatif masyarakat melalui bintek dan penyuluhan	0,23	3	0,69
	JUMLAH	1,00		3,15
	SELISIH PELUANG - TANTANGAN			- 0,73

Penilaian analisis SWOT menunjukkan hasil sebagai berikut :

- Analisis nilai pada kondisi internal organisasi menunjukkan nilai kekuatan- kelemahan adalah 0,57.
- Analisis nilai pada kondisi eksternal organisasi menunjukkan nilai peluang- tantangan adalah 0,73.

Isu strategisnya adalah antara lain :

- Bertambahnya jumlah penduduk menyebabkan pertambahan produktivitas limbah yang dihasilkan, maka harus diantisipasi. Kemampuan drainase dalam menampung air buangan memiliki keterbatasan sehingga harus dipikirkan perencanaan jangka panjangnya.
- Kelembagaan yang kurang kuat dalam memprogramkan

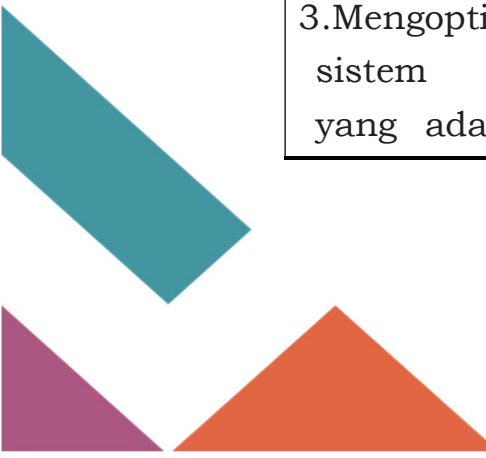


kegiatan pengelolaan drainase sehingga berpengaruh pada pola kehidupan masyarakat.

- Kurangnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan drainase yang berbasis masyarakat.
- Masih kurangnya dukungan media komunikasi dalam mendukung sosialisasi pengelolaan drainase, terutama dalam hal peningkatan kesadaran seluruh komponen, pemerintah, masyarakat dan dunia usaha/swasta.
- Makin meluasnya area genangan air akibat tingginya curah hujan.



Tujuan	Sasaran		Strategi
	Pernyataan Sasaran	Indikator Sasaran	
1.Menciptakan pengelolaan drainase yang baik, untuk perbaikan kesehatan masyarakat 2.Air limbah bekas mandi dan cuci atau <i>gray water</i> dapat terkelola dalam sistem air limbah domestik. 3.Mengoptimalkan sistem drainase yang ada, dengan	Saluran drainase air hujan menjadi ter-struktur dalam sistem : - Sistem drainase primer. - Sistem drainase jalan. - Sistem drainase sekunder skala wilayah, skala kawasan, - drainase	1.Berkurangnya wilayah / kawasan banjir di perkotaan maupun perdesaan. 2.Pelayanan drainase dapat menjangkau seluruh lingkungan permukiman baik di daerah perkotaan maupun	1.Meningkatan fasilitas drainase, mengembangkan kebutuhan saluran drainase : -Sistem drainase jalan, -Sistem drainase sekunder -Sistem drainase tersier. 2.Pembuatan / revisi Masterplan Drainase agar ada penataan sistem hulu – hilir secara terintegrasi. 3.Meningkatan / optimalisasi kapasitas daya





cara: - rehab (perbaikan) saluran, dan - pemeliharaan.	perkotaan dandrainase perdesaan, serta -drainase di kawasan khusus.	perdesaan.	tampung air agar sesuai kebutuhan debit disalurkan. 4.Menyusun program agar pencapaian sasaran penataan dan pembangunan drainase pelaksanaan-nya kegiatan terpadu, efisien, dan efektif.
Kelembagaan 1.Meningkatkan kapasitas kelembagaan pengelola prasarana dan sarana drainase.	1.Peningkatan kapasitas kelembagaan kewenangan pengelolaan terkait drainase	1.Mendorong pembentukan maupun pada penguatan institusi Dinas dan Instansi dengan sistem	1.Meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar organisasi perangkat daerah dalam pengelolaan drainase. 2.Mengoptimalkan





2.Penguatan kelembagaan dalam membuat program kegiatan pembangunan dan pemeliharaan drainase.	adalah DPUPR. 2.Mendorong peningkatan kemauan politik (<i>political will</i>) para pemangku kepentingan untuk memberikan prioritas yang lebih agar Dinas dan Instansi dapat menjalankan operasional secara baik.	koordinasi yang baik, untuk: - pengelolaan drainase primer. - pengelolaan drainase sekunder. - pengelolaan drainase jalan. 2.Membagi tanggungjawab dan kewenangan dalam pengelolaan drainase secara kolektif. 3.Terpeliharanya fungsional	kelembagaan dan aparatur dalam penge-lolaan drainase dalam sistem pengelolaan terstruktur: -saluran primer / sungai -sistem drainase jalan -saluran sekunder -saluran tersier. 3.Optimalisasi peran stakeholder di tingkat Kabupaten dalam upaya mendorong perubahan perilaku masyarakat dalam pengelolaan drainase.
---	---	--	---





		saluran drainase, kapasitasnya, dan kelancaran dalam penyaluran air hujan.	
Peraturan 1. Pengembangan perangkat peraturan dan perundangan penyelenggaraan yang mendukung pengelolaan drainase secara ber-sistem. 2. Regulasi kebijakan penanganan drainase.	1. Mendorong pemerintah untuk menyiapkan peraturan, kewenangan dalam koor-dinasi pengelolaan sistem jaringan drainase. 2. Tersedianya perangkat peraturan untuk sistem kerja sama dalam pengelolaan drainase karena melibatkan	1. Sosialisasi peraturan ke masyarakat akan pentingnya kesehatan dengan menjaga lingkungan, dan berperan aktif turut mengelola drainase: 2. Advokasi kepada instansi, perusahaan, dunia usaha, sekolah, dan masyarakat.	1. Meningkatkan efektifitas peraturan daerah dalam mengatur pengelolaan drainase. 2. Mendorong pemerintah untuk menyiapkan peraturan dan kewenangan dalam pengembangan sistem drainase yang efektif, efisien dan menjaga keberkelanjutannya.





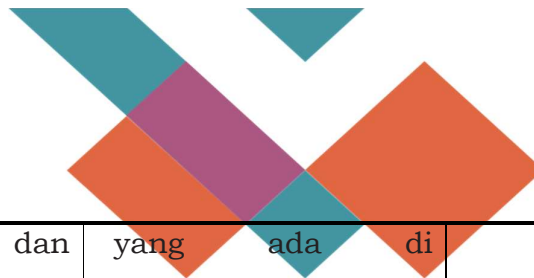
	beberapa Dinas / Instansi sesuai objek yang akan dikelolanya.		
Masyarakat/Publik .Peningkatan peran masyarakat, dan dunia usaha, swasta, dan perusahaan agar turut dalam penyelenggaraan sistem pengelola-an drainase sesuai proporsinya.	1.Meningkatkan peran masyarakat, dunia usaha, swasta, dan perusahaan dalam pengembangan sistem pengelolaan drainase yang ada atau melintas di wilayah / kawasannya. 2.Membentuk pola hubungan kerja sama yang luas dalam pengelolaan drainase terutama drainase tersier yang	1.Deklarasi stop buang sampah dan limbah ke saluran drainase. 2.Gerakan bersih lingkungan dan menggerakan kerja bakti disetiap wilayah untuk membersihkan saluran. 3.Peningkatan peran masyarakat, dan du- nia usaha, swasta, dan perusahaan di dalam penyeleng- garaan sistem	1.Meningkatkan keterlibatan masyarakat dan sektor swasta dalam pengelolaan drainase terutama pada saluran tersier yang menjadi tanggungjawabnya. 2.Melakukan kegiatan sosialisasi dan penyuluhan secara kontinyu mengenai pentingnya drainase, selain menjaga agar tidak banjir, juga mencegah longsor dan gerakan tanah pada kawasan yang memiliki kemiringan terjal. 3.Kerjasama dengan media dan sistem komunikasi yang ada





	menjadi tanggung jawab masyarakat setempat.	drainase.	dalam sosialisasinya.
Pembiayaan 1.Meningkatkan dan mengembangkan sumber pendanaan untuk pengelolaan drainase secara kontinyu setiap tahunnya. 2.Pengembangan alternatif sumber pendana-an untuk pengelolaan drainase.	1.Sumber pendanaan dapat meningkat di dalam alokasi anggaran drainase dari : - APBD Kabupaten; - APBD Provinsi; - APBN, - Dana hibah dan dana lainnya . 2.Mendorong alternatif sumber pembiayaan untuk mendukung pengadaan	1.Meningkatnya sumber daya masyarakat, swasta / perusahaan, maupun sekolah dalam berpartisipasi untuk lingkungan. 2.Meningkatkan peran tanggungjawab masyarakat, swasta / dunia usaha untuk bersama dengan pemerintah mengelola drainase	1.Pembiayaan bersama Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat. 2.Pembiayaan bantuan dari swasta yang beropersional di Kabupaten Bandung Barat, serta bantuan dari Luar Negeri yang tidak mengikat. 3.Mendorong peningkatan pengelolaan drainase tersier secara mandiri berbasis masyarakat.





	prasarana dan sarana drainase.	yang ada di wilayahnya.	
--	--------------------------------	-------------------------	--



BAB V

KONDISI FAKTUAL

5.1. Air Limbah Domestik

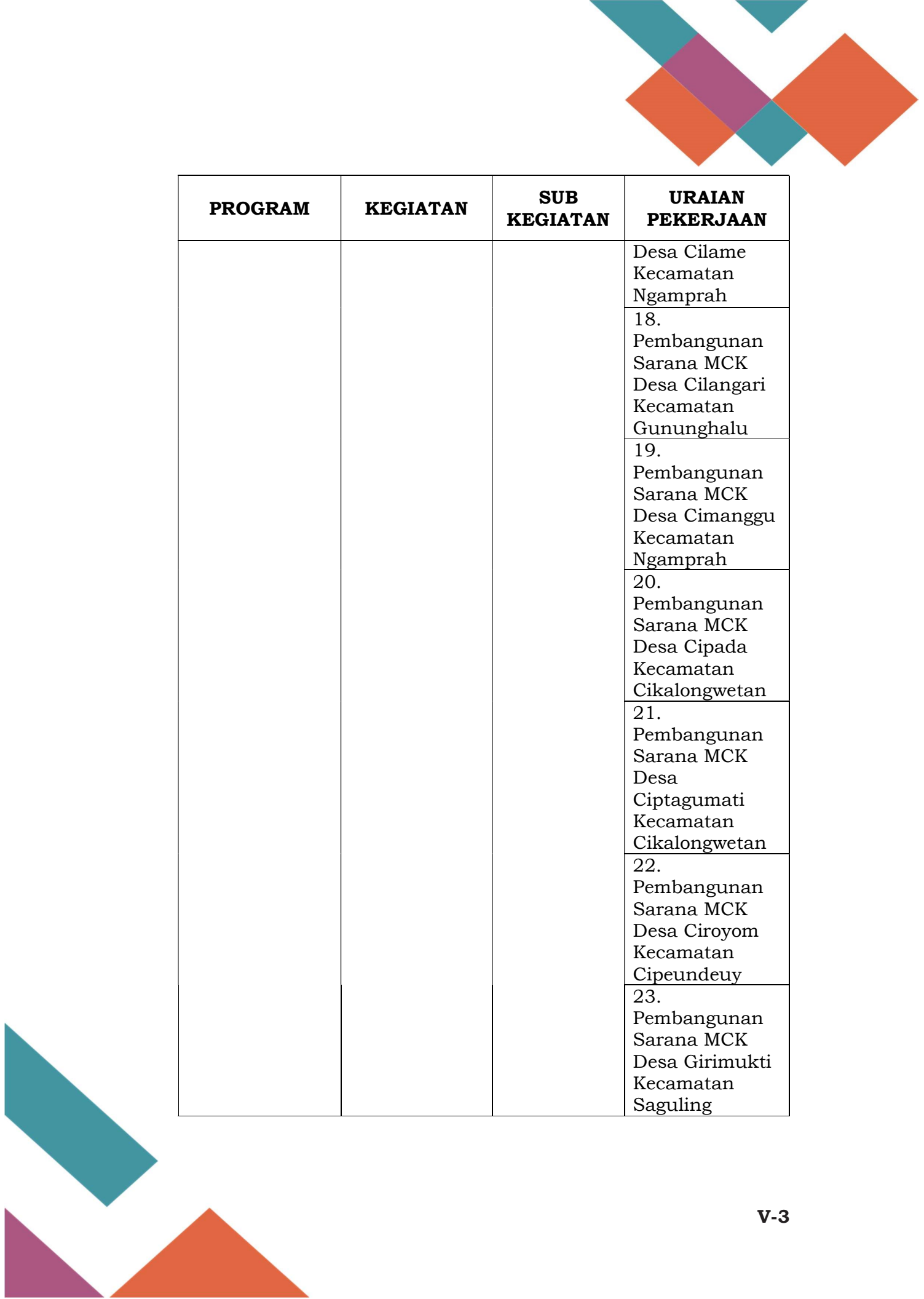
Berikut ini realisasi penanganan air limbah Domestik di wilayah Kabupaten Bandung Barat

Tahun 2021

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	URAIAN PEKERJAAN
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	7. Pembangunan Sarana MCK Desa Baranangsiang Kecamatan Cipongkor
			8. Pembangunan Sarana MCK Desa Bojongsalam Kecamatan Rongga
			9. Pembangunan Sarana MCK Desa Bongas Kecamatan Cililin
			10. Pembangunan Sarana MCK Desa Budiharja Kecamatan Cililin



PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	URAIAN PEKERJAAN
			11. Pembangunan Sarana MCK Desa Buninagara Kecamatan Sindangkerta
			12. Pembangunan Sarana MCK Desa Cicadas Kecamatan Rongga
			13. Pembangunan Sarana MCK Desa Cicangkanggira ng Kecamatan Sindangkerta
			14. Pembangunan Sarana MCK Desa Cihanjuangrahy u Kecamatan Parongpong
			15. Pembangunan Sarana MCK Desa Cikalong Kecamatan Cikalongwetan
			16. Pembangunan Sarana MCK Desa Cikole Kecamatan Lembang
			17. Pembangunan Sarana MCK



PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	URAIAN PEKERJAAN
			Desa Cilame Kecamatan Ngamprah
			18. Pembangunan Sarana MCK Desa Cilangari Kecamatan Gununghalu
			19. Pembangunan Sarana MCK Desa Cimanggu Kecamatan Ngamprah
			20. Pembangunan Sarana MCK Desa Cipada Kecamatan Cikalongwetan
			21. Pembangunan Sarana MCK Desa Ciptagumati Kecamatan Cikalongwetan
			22. Pembangunan Sarana MCK Desa Ciroyom Kecamatan Cipeundeuy
			23. Pembangunan Sarana MCK Desa Girimukti Kecamatan Saguling



PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	URAIAN PEKERJAAN
			24. Pembangunan Sarana MCK Desa Gudangkahurip an Kecamatan Lembang
			25. Pembangunan Sarana MCK Desa Jatimekar Kecamatan Cipeundeuy
			26. Pembangunan Sarana MCK Desa Kidangpananju ng Kecamatan Cililin
			27. Pembangunan Sarana MCK Desa Mekarjaya Kecamatan Cihampelas
			28. Pembangunan Sarana MCK Desa Mekarmukti Kecamatan Cihampelas
			29. Pembangunan Sarana MCK Desa Mekarwangi Kecamatan Lembang



PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	URAIAN PEKERJAAN
			30. Pembangunan Sarana MCK Desa Mekarwangi Kecamatan Sindangkerta
			31. Pembangunan Sarana MCK Desa Nanggeleng Kecamatan Cipeundeuy
			32. Pembangunan Sarana MCK Desa Nanggerang Kecamatan Cililin
			33. Pembangunan Sarana MCK Desa Ngamprah Kecamatan Ngamprah
			34. Pembangunan Sarana MCK Desa Nyalindung Kecamatan Cipatat
			35. Pembangunan Sarana MCK Desa Pasirlangu Kecamatan Cisarua





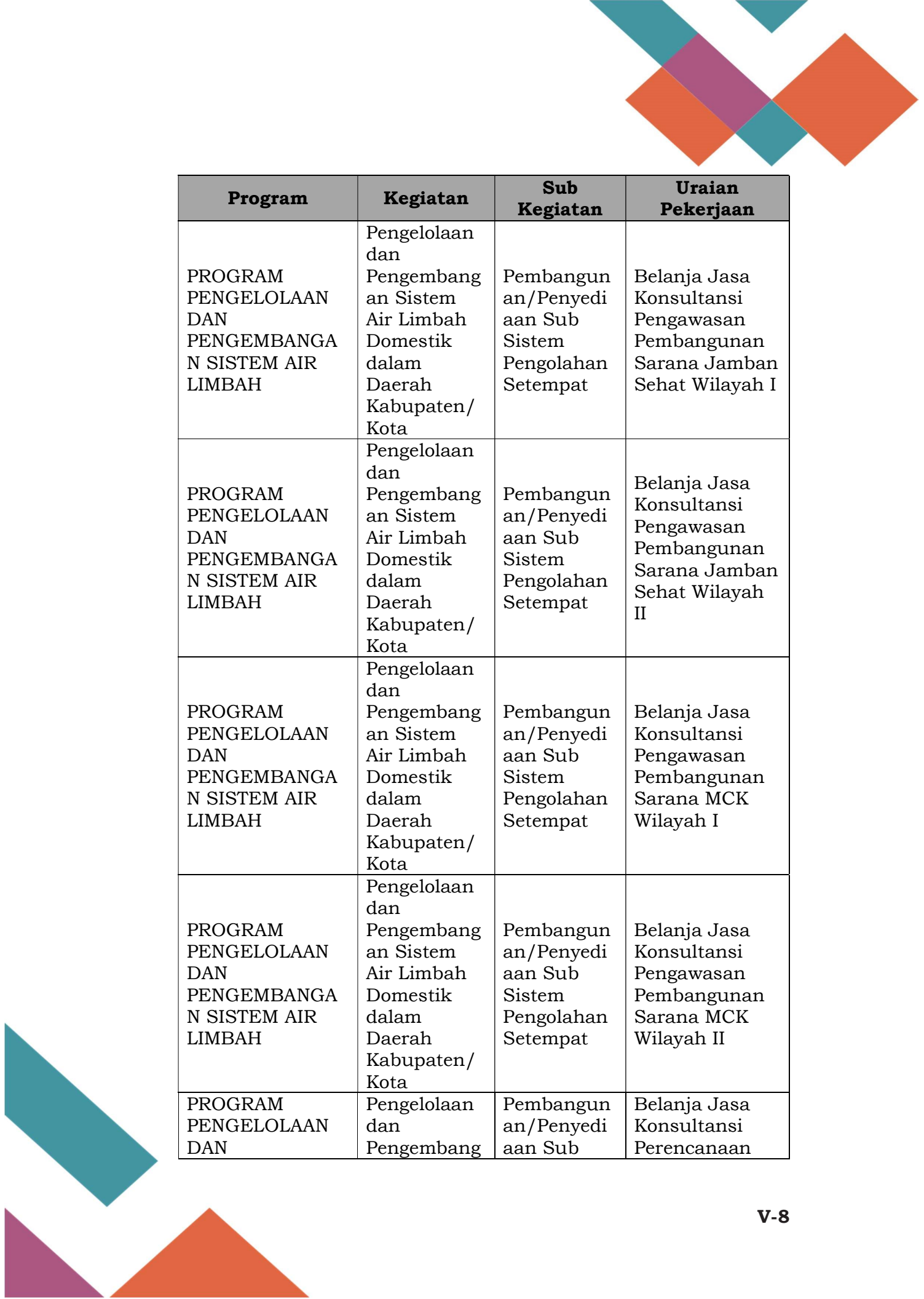
PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	URAIAN PEKERJAAN
			36. Pembangunan Sarana MCK Desa Puncaksari Kecamatan Sindangkerta
			37. Pembangunan Sarana MCK Desa Rajamandala Kulon Kecamatan Cipatat
			38. Pembangunan Sarana MCK Desa Sindangkerta Kecamatan Sindangkerta
			39. Pembangunan Sarana MCK Desa Sirnagalih Kecamatan Cipongkor
			40. Pembangunan Sarana MCK Desa Sirnajaya Kecamatan Gununghalu
			41. Pembangunan Sarana MCK Desa Sukamanah Kecamatan Rongga



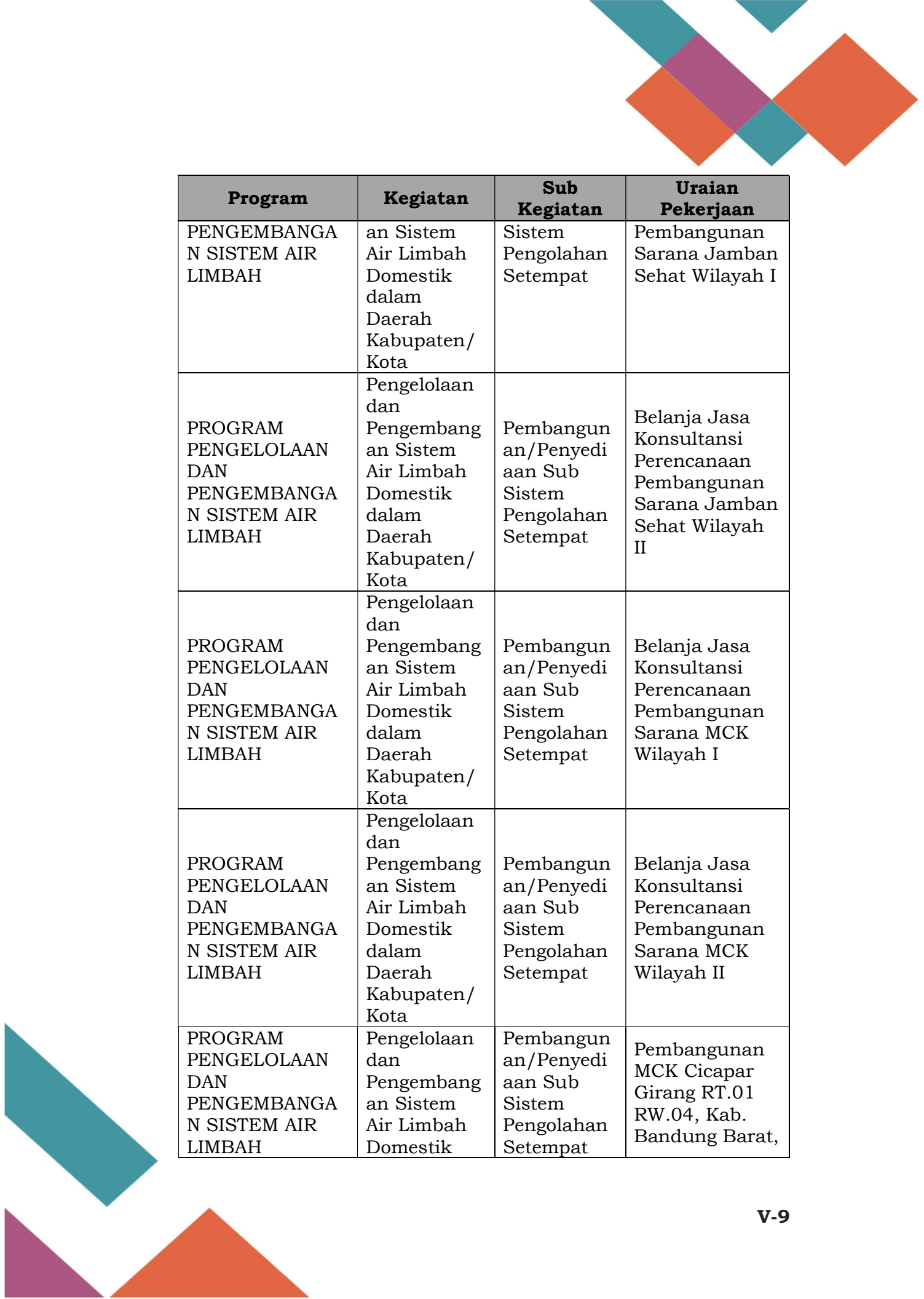
PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	URAIAN PEKERJAAN
			42. Pembangunan Sarana MCK Desa Suntenjaya Kecamatan Lembang
			43. Pembangunan Sarana MCK Desa Wangunsari Kecamatan Lembang
			44. Pembangunan Sarana MCK Desa Weninggalih Kecamatan Sindangkerta
			45. Pembangunan Sarana MCK Kegiatan P2WKSS
			46. Pembangunan Sarana MCK Madinatul Furqon Desa Jambudipa Kecamatan Cisarua
			47. Pembuatan Sarana MCK Desa Cinengah Kecamatan Rongga



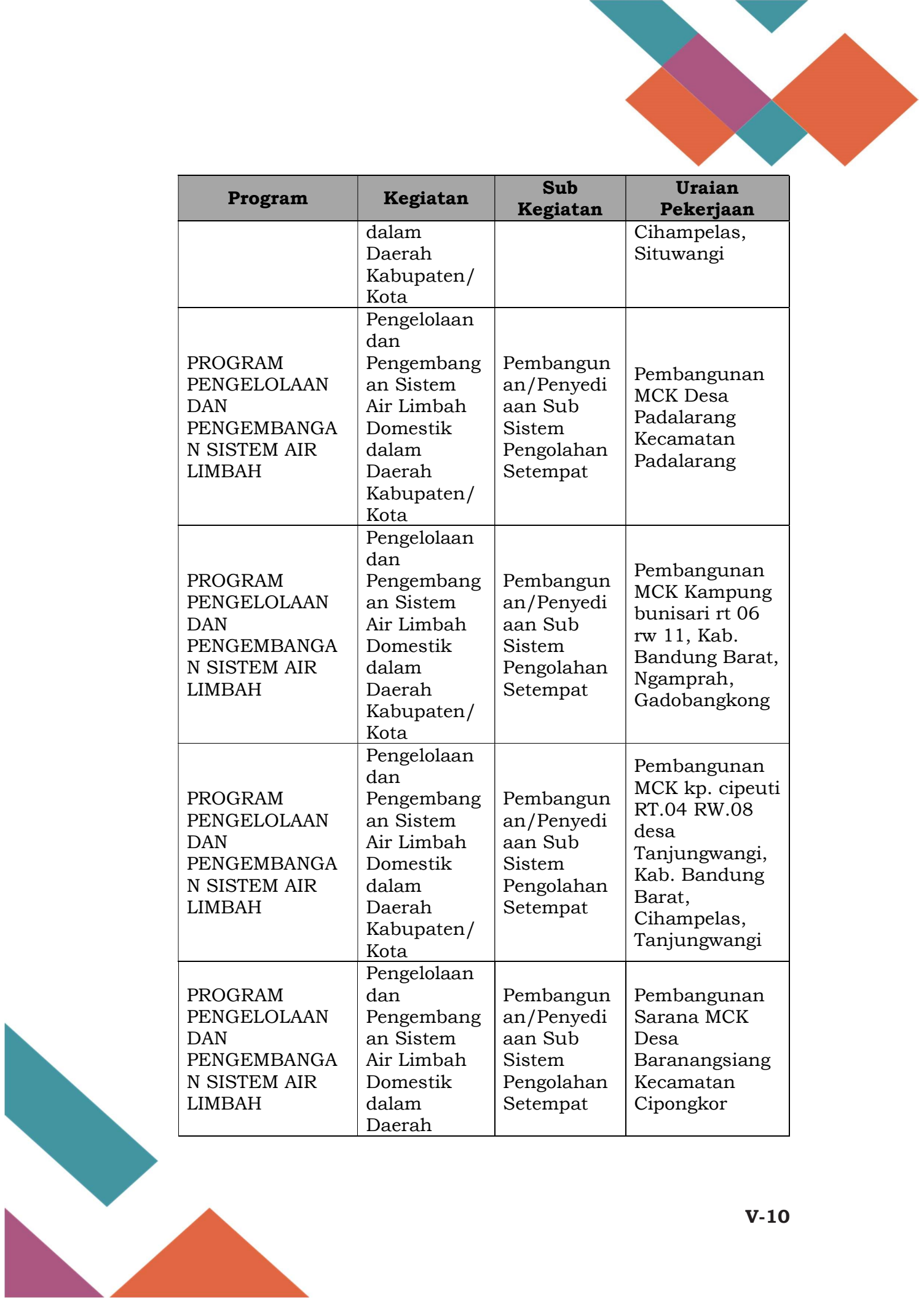
Tahun 2022



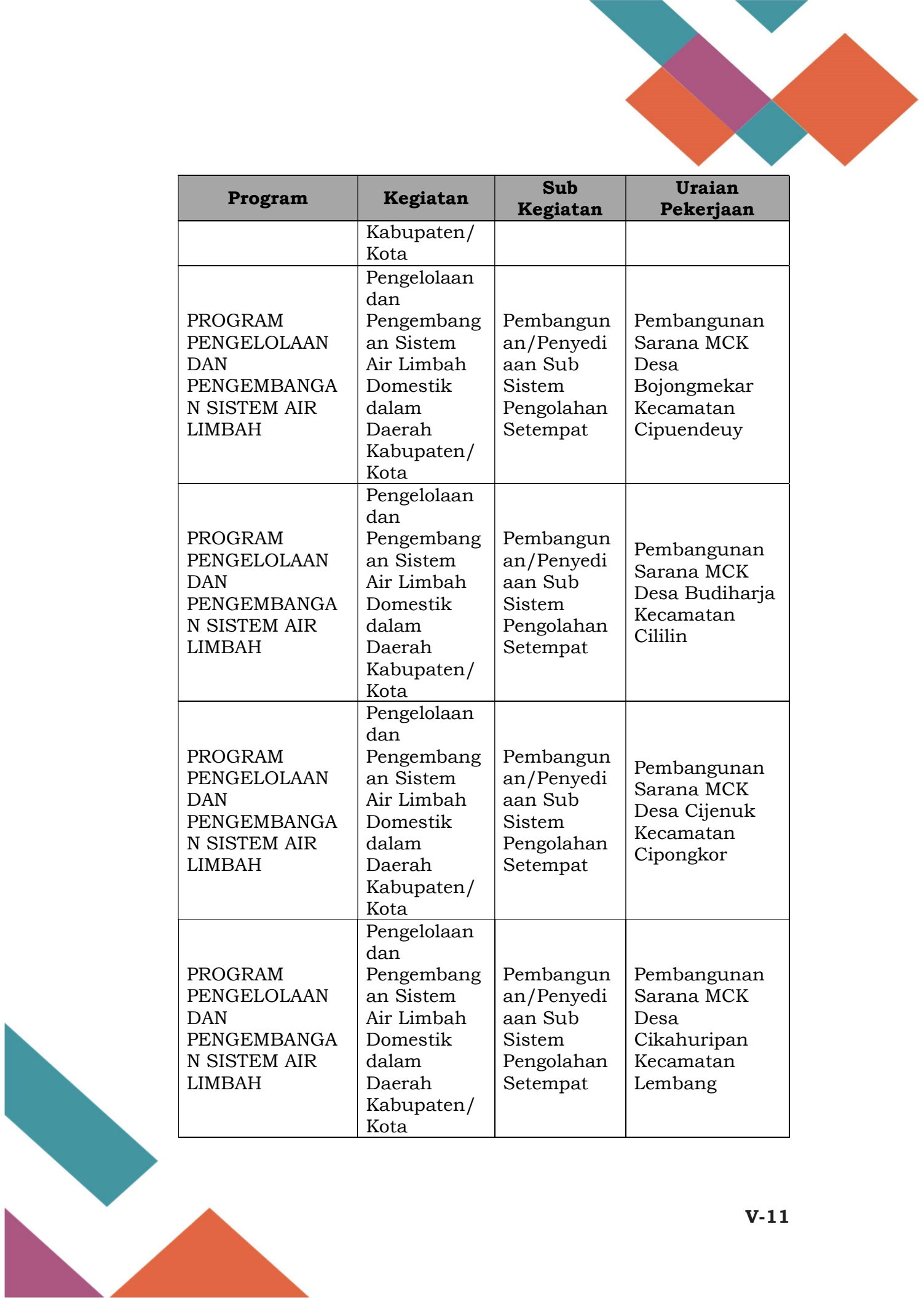
Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian Pekerjaan
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Pembangunan/ Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Sarana Jamban Sehat Wilayah I
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Pembangunan/ Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Sarana Jamban Sehat Wilayah II
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Pembangunan/ Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Sarana MCK Wilayah I
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Pembangunan/ Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Sarana MCK Wilayah II
PROGRAM PENGELOLAAN DAN	Pengelolaan dan Pengembangan	Pembangunan/ Penyediaan Sub	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan



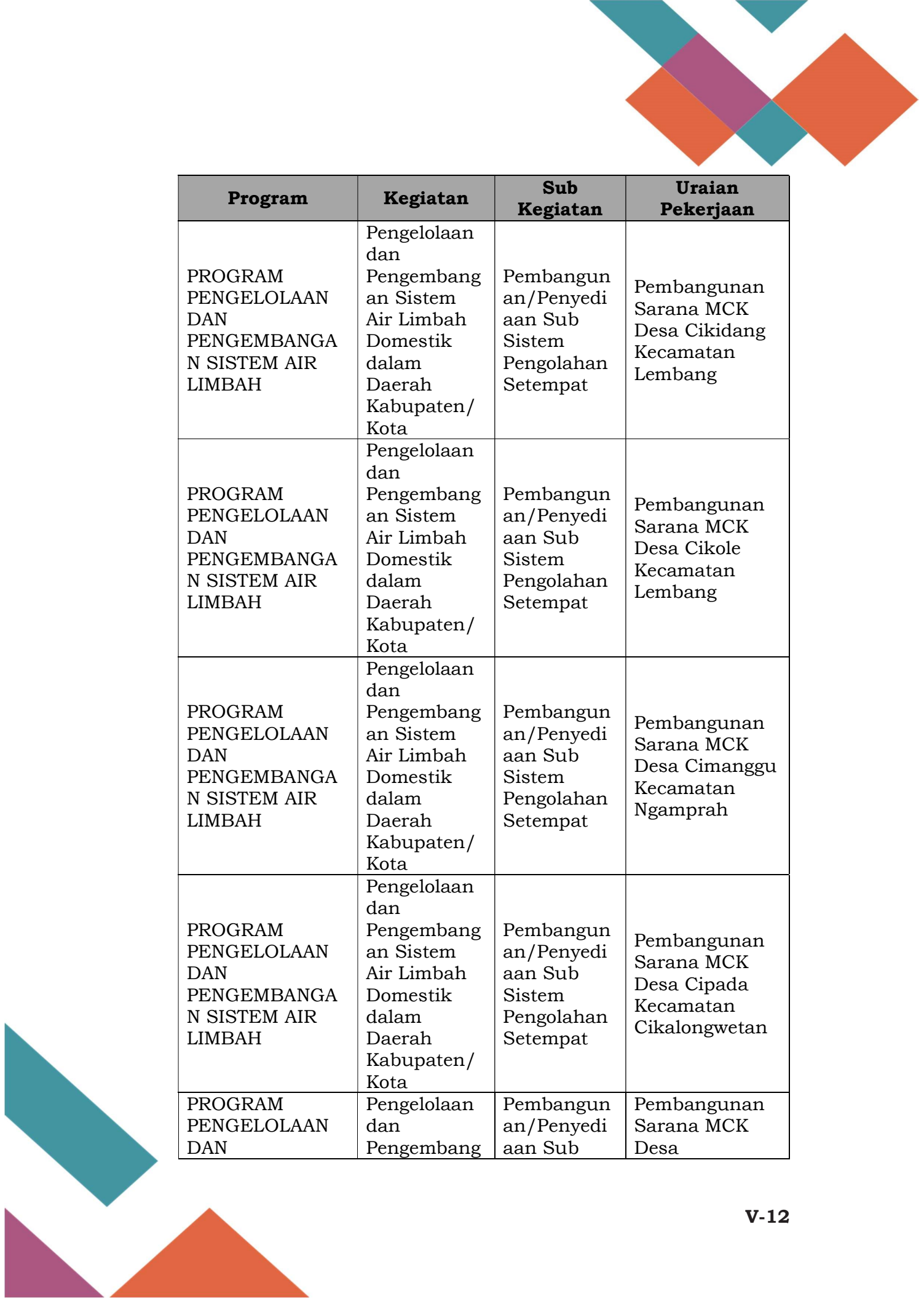
Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian Pekerjaan
PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	an Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Sistem Pengolahan Setempat	Pembangunan Sarana Jamban Sehat Wilayah I
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Pembangunan/ Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Sarana Jamban Sehat Wilayah II
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Pembangunan/ Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Sarana MCK Wilayah I
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Pembangunan/ Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Sarana MCK Wilayah II
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik	Pembangunan/ Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Pembangunan MCK Cicapar Girang RT.01 RW.04, Kab. Bandung Barat,



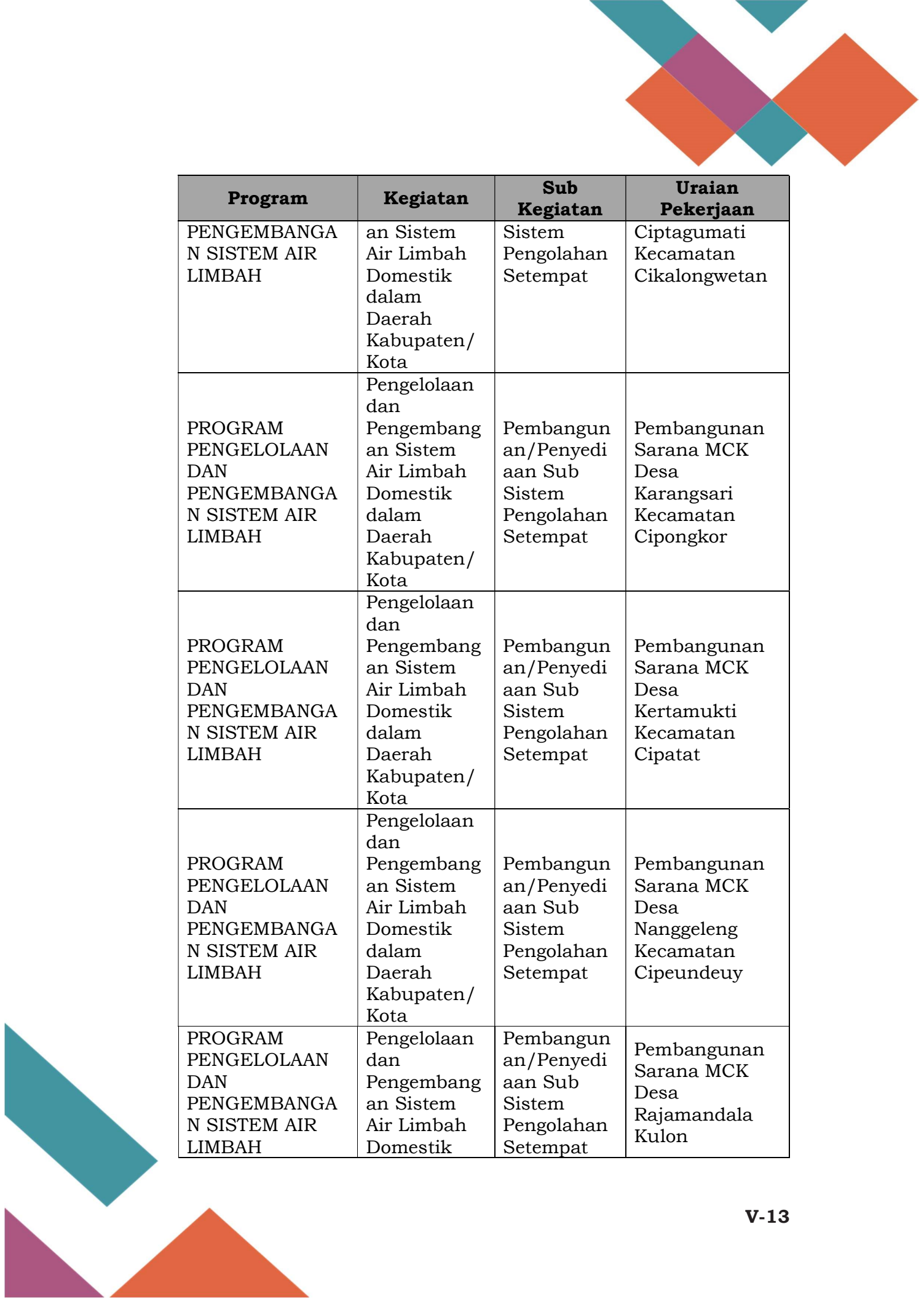
Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian Pekerjaan
	dalam Daerah Kabupaten/ Kota		Cihampelas, Situwangi
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Pembangunan/ Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Pembangunan MCK Desa Padalarang Kecamatan Padalarang
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Pembangunan/ Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Pembangunan MCK Kampung bunisari rt 06 rw 11, Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Gadobangkong
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Pembangunan/ Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Pembangunan MCK kp. cipeuti RT.04 RW.08 desa Tanjungwangi, Kab. Bandung Barat, Cihampelas, Tanjungwangi
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah	Pembangunan/ Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Pembangunan Sarana MCK Desa Baranangsiang Kecamatan Cipongkor



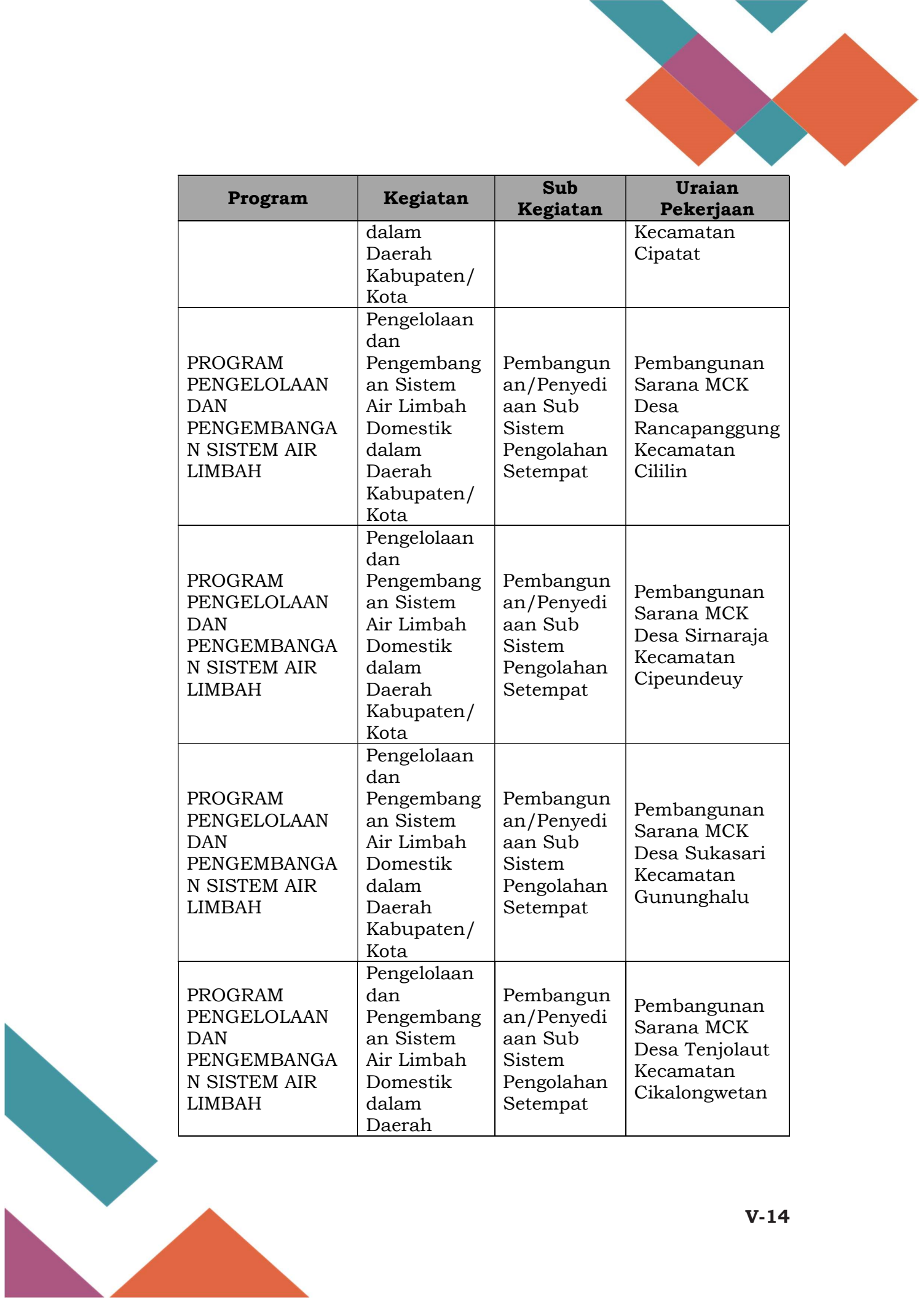
Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian Pekerjaan
	Kabupaten/ Kota		
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Pembangunan/ Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Pembangunan Sarana MCK Desa Bojongmekar Kecamatan Cipuendeuy
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Pembangunan/ Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Pembangunan Sarana MCK Desa Budiharja Kecamatan Cililin
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Pembangunan/ Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Pembangunan Sarana MCK Desa Cijenuk Kecamatan Cipongkor
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Pembangunan/ Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Pembangunan Sarana MCK Desa Cikahuripan Kecamatan Lembang



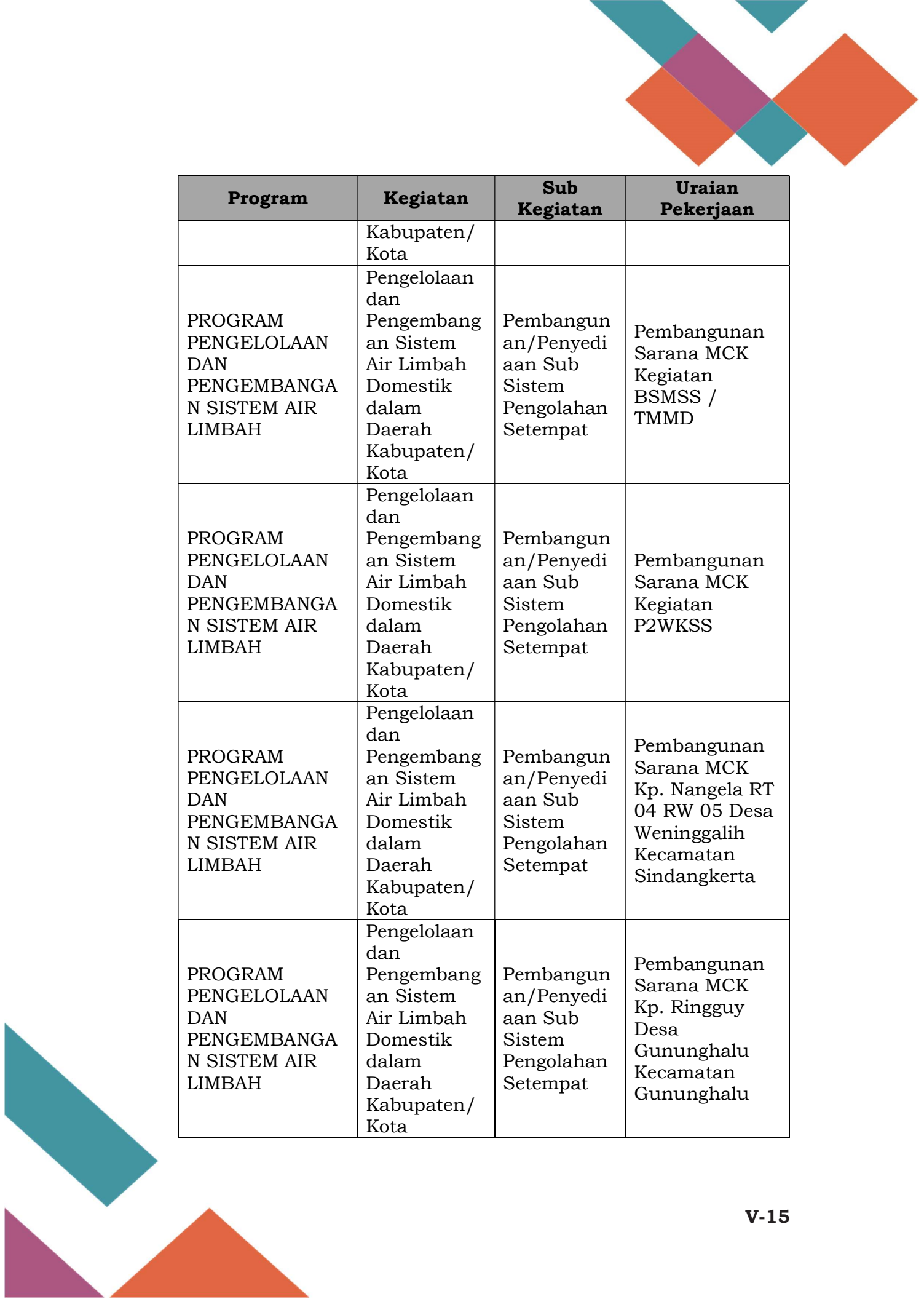
Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian Pekerjaan
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Pembangunan/ Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Pembangunan Sarana MCK Desa Cikidang Kecamatan Lembang
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Pembangunan/ Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Pembangunan Sarana MCK Desa Cikole Kecamatan Lembang
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Pembangunan/ Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Pembangunan Sarana MCK Desa Cimanggu Kecamatan Ngamprah
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Pembangunan/ Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Pembangunan Sarana MCK Desa Cipada Kecamatan Cikalongwetan
PROGRAM PENGELOLAAN DAN	Pengelolaan dan Pengembangan	Pembangunan/ Penyediaan Sub	Pembangunan Sarana MCK Desa



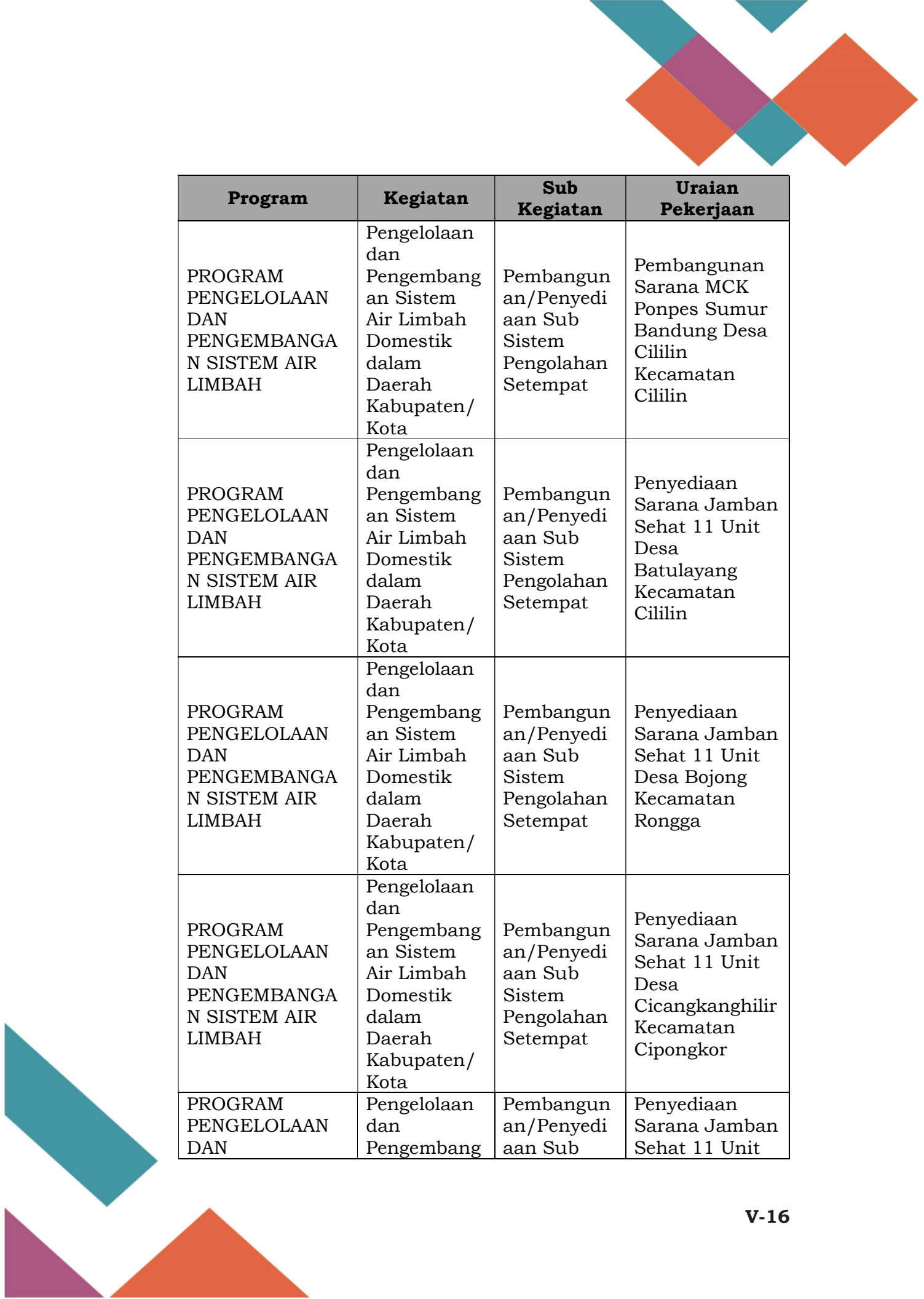
Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian Pekerjaan
PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	an Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Sistem Pengolahan Setempat	Ciptagumati Kecamatan Cikalongwetan
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Pembangunan/ Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Pembangunan Sarana MCK Desa Karangsari Kecamatan Cipongkor
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Pembangunan/ Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Pembangunan Sarana MCK Desa Kertamukti Kecamatan Cipatat
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Pembangunan/ Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Pembangunan Sarana MCK Desa Nanggaleng Kecamatan Cipeundeuy
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik	Pembangunan/ Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Pembangunan Sarana MCK Desa Rajamandala Kulon



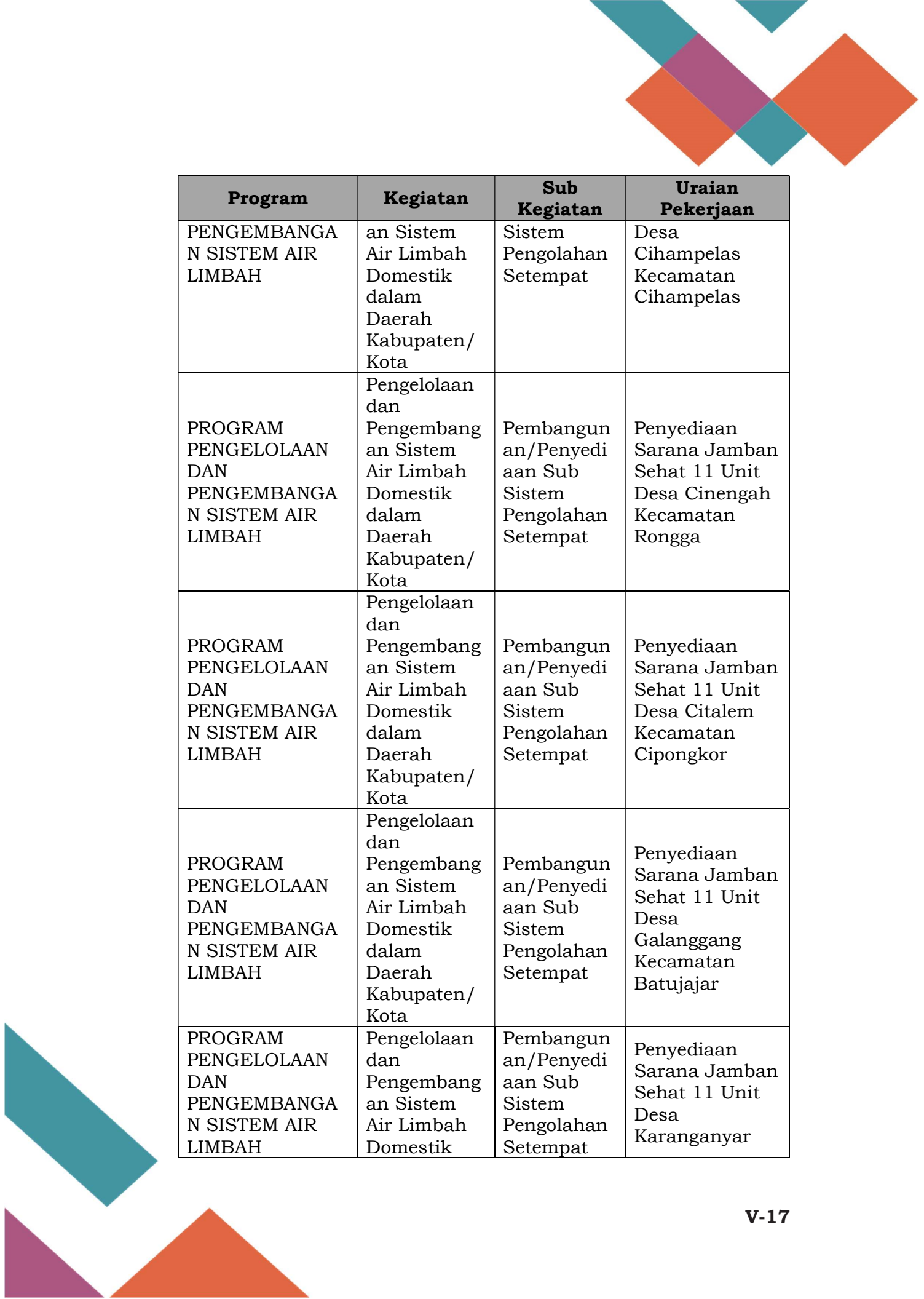
Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian Pekerjaan
	dalam Daerah Kabupaten/ Kota		Kecamatan Cipatat
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Pembangunan/ Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Pembangunan Sarana MCK Desa Rancapanggung Kecamatan Cililin
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Pembangunan/ Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Pembangunan Sarana MCK Desa Sirnaraja Kecamatan Cipeundeuy
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Pembangunan/ Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Pembangunan Sarana MCK Desa Sukasari Kecamatan Gununghalu
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah	Pembangunan/ Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Pembangunan Sarana MCK Desa Tenjolaut Kecamatan Cikalongwetan



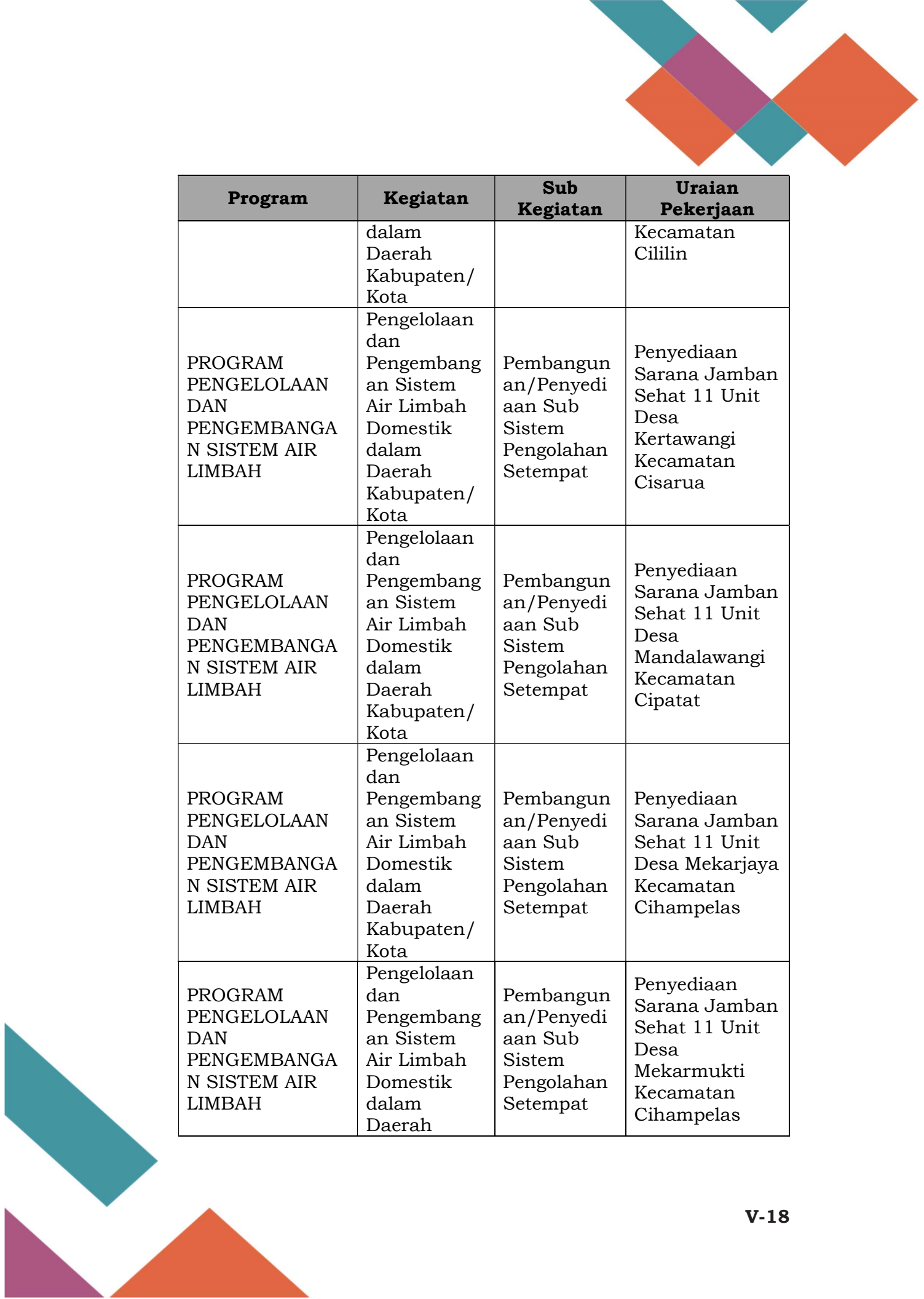
Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian Pekerjaan
	Kabupaten/ Kota		
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Pembangunan/ Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Pembangunan Sarana MCK Kegiatan BSMSS / TMMD
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Pembangunan/ Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Pembangunan Sarana MCK Kegiatan P2WKSS
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Pembangunan/ Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Pembangunan Sarana MCK Kp. Nangela RT 04 RW 05 Desa Weninggalih Kecamatan Sindangkerta
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Pembangunan/ Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Pembangunan Sarana MCK Kp. Ringguy Desa Gununghalu Kecamatan Gununghalu



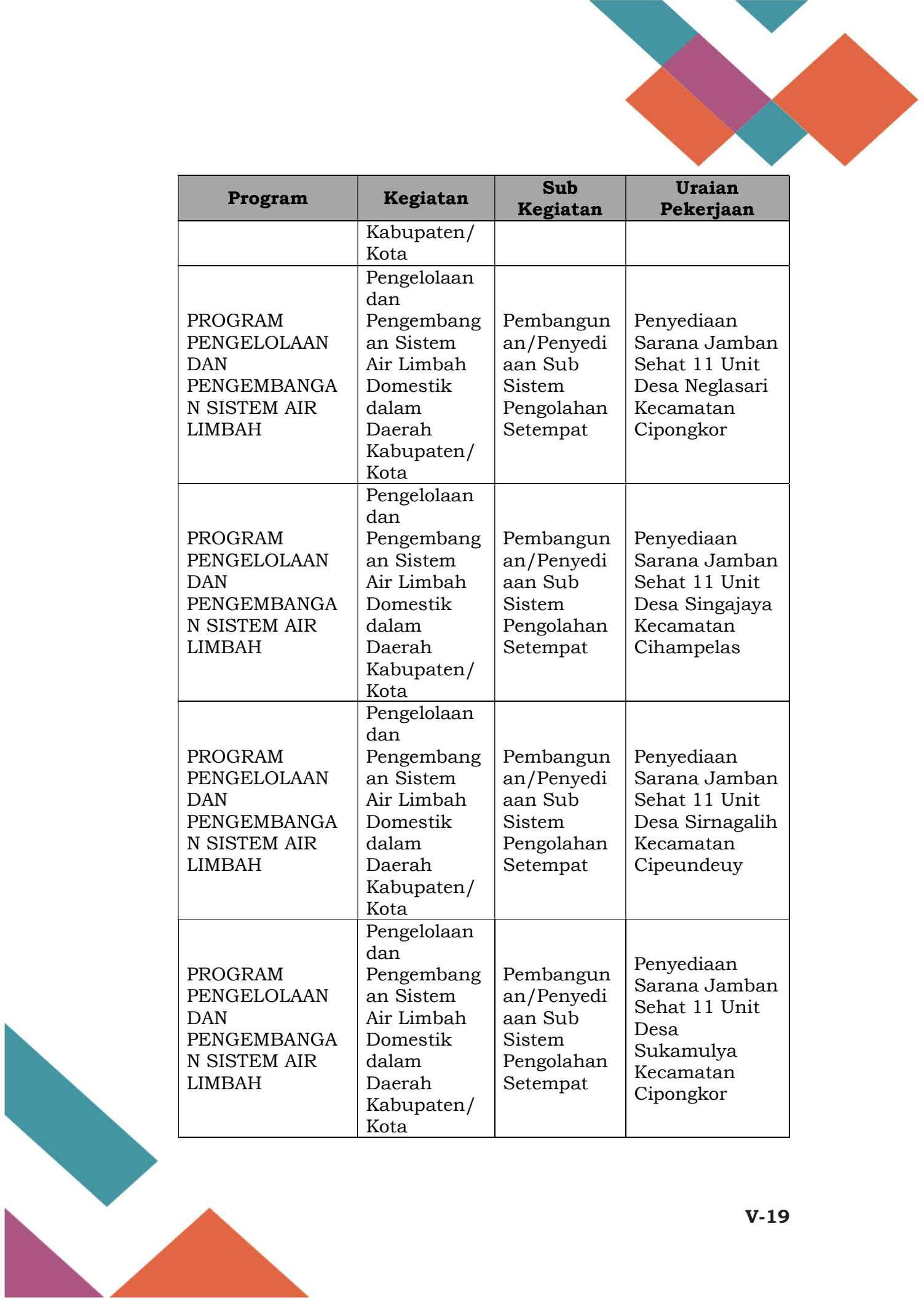
Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian Pekerjaan
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Pembangunan/ Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Pembangunan Sarana MCK Ponpes Sumur Bandung Desa Cililin Kecamatan Cililin
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Pembangunan/ Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Penyediaan Sarana Jamban Sehat 11 Unit Desa Batulayang Kecamatan Cililin
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Pembangunan/ Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Penyediaan Sarana Jamban Sehat 11 Unit Desa Bojong Kecamatan Rongga
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Pembangunan/ Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Penyediaan Sarana Jamban Sehat 11 Unit Desa Cicangkanghilir Kecamatan Cipongkor
PROGRAM PENGELOLAAN DAN	Pengelolaan dan Pengembangan	Pembangunan/ Penyediaan Sub	Penyediaan Sarana Jamban Sehat 11 Unit



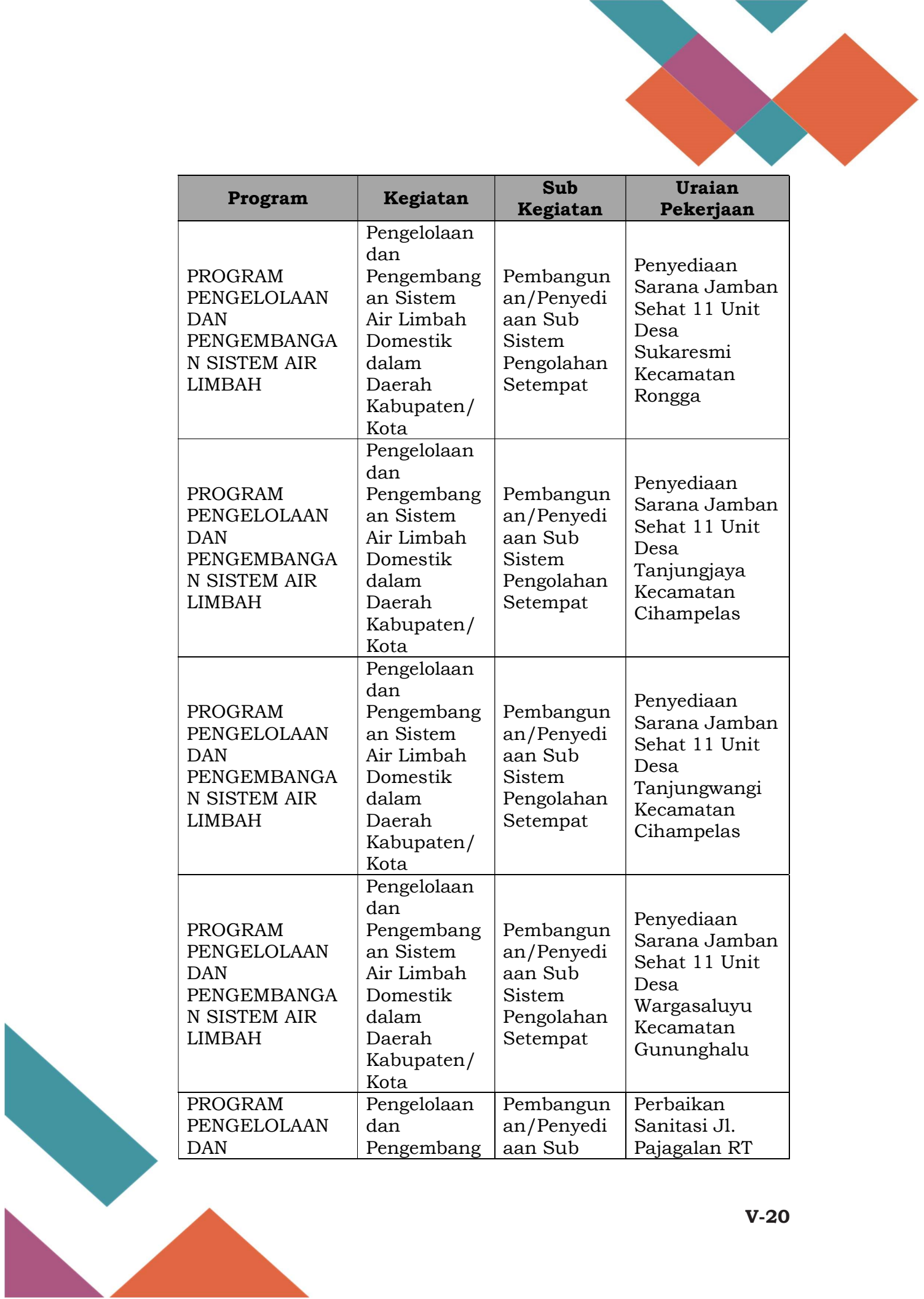
Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian Pekerjaan
PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	an Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Sistem Pengolahan Setempat	Desa Cihampelas Kecamatan Cihampelas
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Pembangunan/ Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Penyediaan Sarana Jamban Sehat 11 Unit Desa Cinengah Kecamatan Rongga
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Pembangunan/ Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Penyediaan Sarana Jamban Sehat 11 Unit Desa Citalem Kecamatan Cipongkor
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Pembangunan/ Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Penyediaan Sarana Jamban Sehat 11 Unit Desa Galanggang Kecamatan Batujajar
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik	Pembangunan/ Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Penyediaan Sarana Jamban Sehat 11 Unit Desa Karanganyar



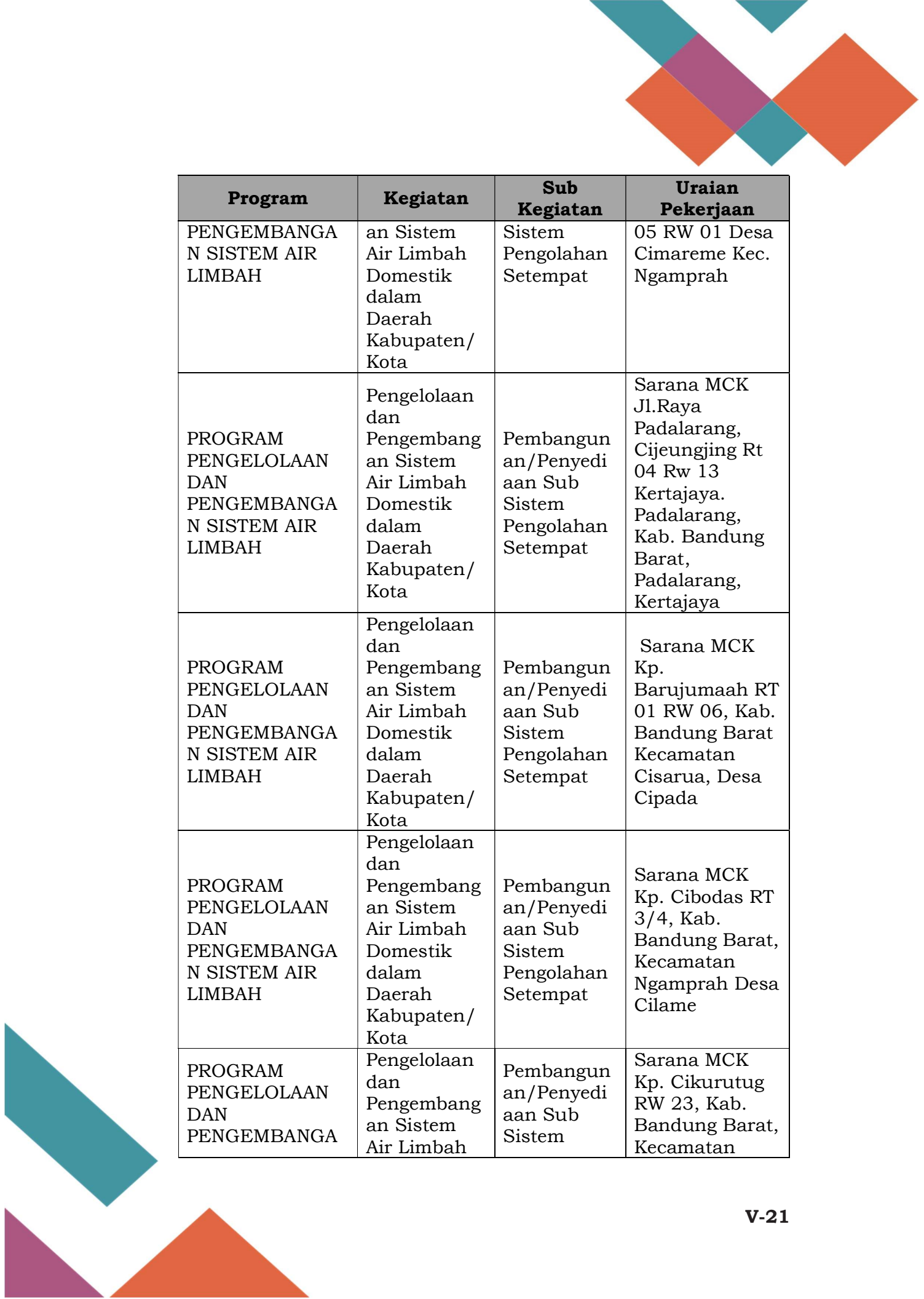
Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian Pekerjaan
	dalam Daerah Kabupaten/ Kota		Kecamatan Cililin
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Pembangunan/ Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Penyediaan Sarana Jamban Sehat 11 Unit Desa Kertawangi Kecamatan Cisarua
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Pembangunan/ Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Penyediaan Sarana Jamban Sehat 11 Unit Desa Mandalawangi Kecamatan Cipatat
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Pembangunan/ Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Penyediaan Sarana Jamban Sehat 11 Unit Desa Mekarjaya Kecamatan Cihampelas
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah	Pembangunan/ Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Penyediaan Sarana Jamban Sehat 11 Unit Desa Mekarmukti Kecamatan Cihampelas



Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian Pekerjaan
	Kabupaten/ Kota		
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Pembangunan/ Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Penyediaan Sarana Jamban Sehat 11 Unit Desa Neglasari Kecamatan Cipongkor
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Pembangunan/ Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Penyediaan Sarana Jamban Sehat 11 Unit Desa Singajaya Kecamatan Cihampelas
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Pembangunan/ Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Penyediaan Sarana Jamban Sehat 11 Unit Desa Sirnagalih Kecamatan Cipeundeuy
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Pembangunan/ Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Penyediaan Sarana Jamban Sehat 11 Unit Desa Sukamulya Kecamatan Cipongkor



Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian Pekerjaan
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Pembangunan/ Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Penyediaan Sarana Jamban Sehat 11 Unit Desa Sukaresmi Kecamatan Rongga
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Pembangunan/ Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Penyediaan Sarana Jamban Sehat 11 Unit Desa Tanjungjaya Kecamatan Cihampelas
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Pembangunan/ Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Penyediaan Sarana Jamban Sehat 11 Unit Desa Tanjungwangi Kecamatan Cihampelas
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Pembangunan/ Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Penyediaan Sarana Jamban Sehat 11 Unit Desa Wargasaluyu Kecamatan Gununghalu
PROGRAM PENGELOLAAN DAN	Pengelolaan dan Pengembangan	Pembangunan/ Penyediaan Sub	Perbaikan Sanitasi Jl. Pajagalan RT



Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian Pekerjaan
PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	an Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Sistem Pengolahan Setempat	05 RW 01 Desa Cimoreme Kec. Ngamprah
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Pembangunan/ Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Sarana MCK Jl. Raya Padalarang, Cijeungjing Rt 04 Rw 13 Kertajaya. Padalarang, Kab. Bandung Barat, Padalarang, Kertajaya
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Pembangunan/ Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Sarana MCK Kp. Barujumaah RT 01 RW 06, Kab. Bandung Barat Kecamatan Cisarua, Desa Cipada
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Pembangunan/ Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Sarana MCK Kp. Cibodas RT 3/4, Kab. Bandung Barat, Kecamatan Ngamprah Desa Cilame
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Pembangunan/ Penyediaan Sub Sistem	Sarana MCK Kp. Cikurutug RW 23, Kab. Bandung Barat, Kecamatan



Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian Pekerjaan
N SISTEM AIR LIMBAH	Domestik dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Pengolahan Setempat	Padalarang Desa Campakamekar
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Pembangunan/ Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Sarana MCK Kp. Cintamekar Rw 22 Desa Gunungmasigit, Kab. Bandung Barat, Cipatat, Gunungmasigit
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Pembangunan/ Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Sarana MCK Kp. Nyalindung RW 09, Kab. Bandung Barat, Kecamatan Cisarua Desa Tugumukti
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Pembangunan/ Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Sarana MCK RW 14 Desa Kertajaya Kecamatan Padalarang Kab, Bandung Barat, Padalarang, Kertajaya

Tahun 2023



Program	Kegiatan	Sub kegiatan	Uraian Pekerjaan
PROGRAM PENGELOLA	Pengelolaan dan Pengembangan	Pembangunan/ Penyediaan	Penyediaan Sarana Jamban



Program	Kegiatan	Sub kegiatan	Uraian Pekerjaan
AN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	aan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Sehat 11 Unit Desa Batulayang Kecamatan Cililin
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Penyediaan Sarana Jamban Sehat 11 Unit Desa Bojong Kecamatan Rongga
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Penyediaan Sarana Jamban Sehat 11 Unit Desa Cicangkanghilir Kecamatan Cipongkor
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Penyediaan Sarana Jamban Sehat 11 Unit Desa Cihampelas Kecamatan Cihampelas
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Penyediaan Sarana Jamban Sehat 11 Unit Desa Cinengah Kecamatan Rongga
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Penyediaan Sarana Jamban Sehat 11 Unit Desa Citalem Kecamatan Cipongkor
PROGRAM PENGELOLAAN DAN	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air	Pembangunan/Penyediaan Sub	Penyediaan Sarana Jamban Sehat 11 Unit

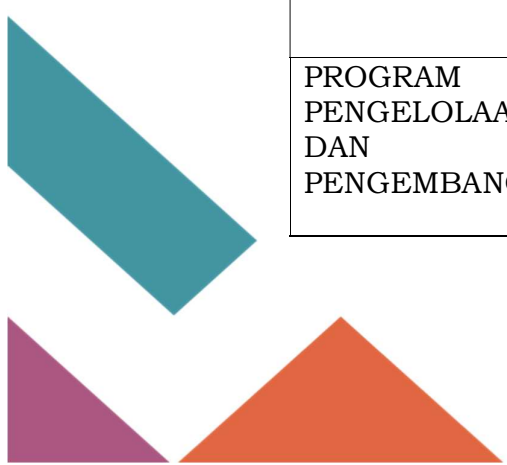


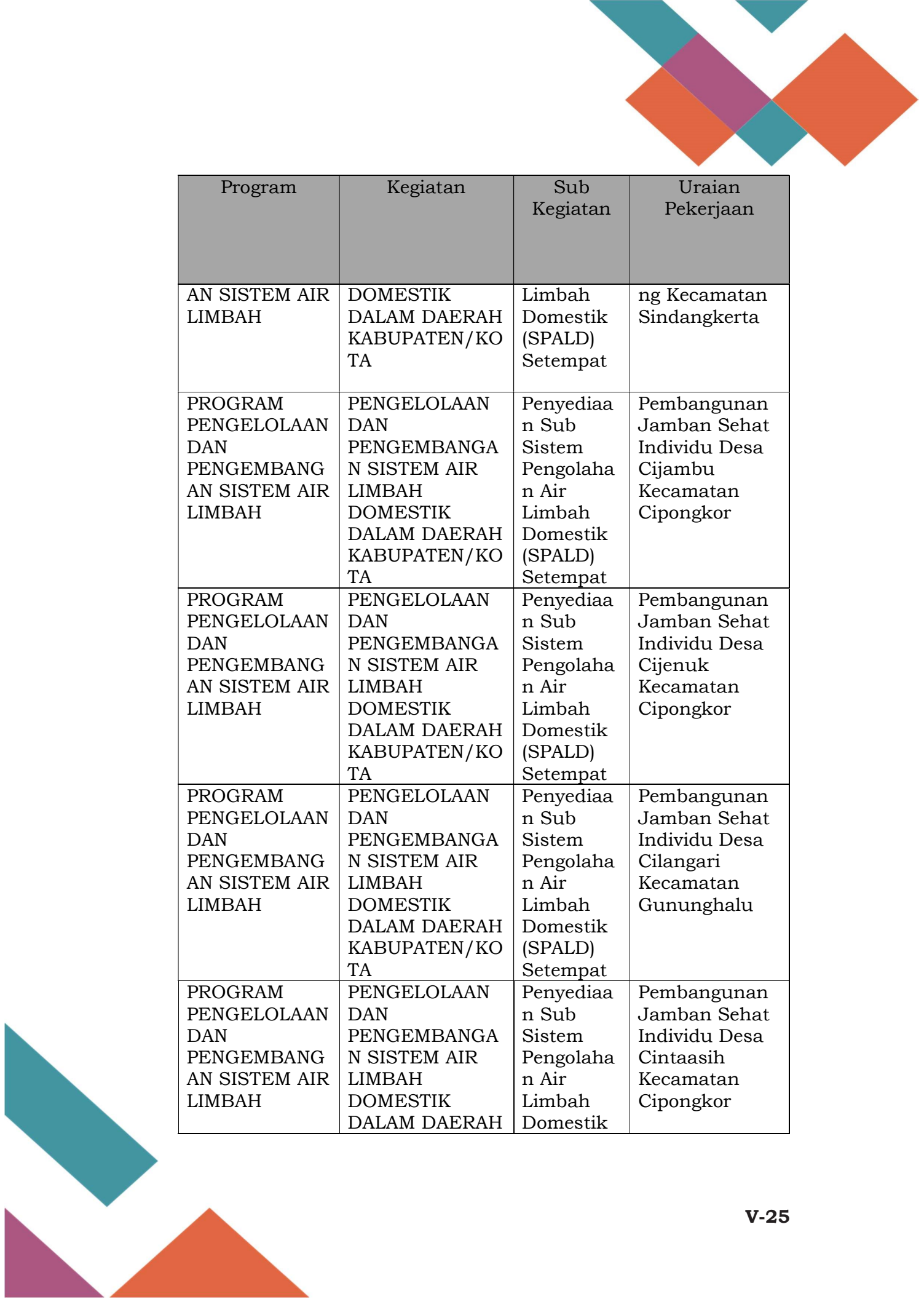


Program	Kegiatan	Sub kegiatan	Uraian Pekerjaan
PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Sistem Pengolahan Setempat	Desa Sukamulya Kecamatan Cipongkor
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Penyediaan Sarana Jamban Sehat 11 Unit Desa Sukaresmi Kecamatan Rongga

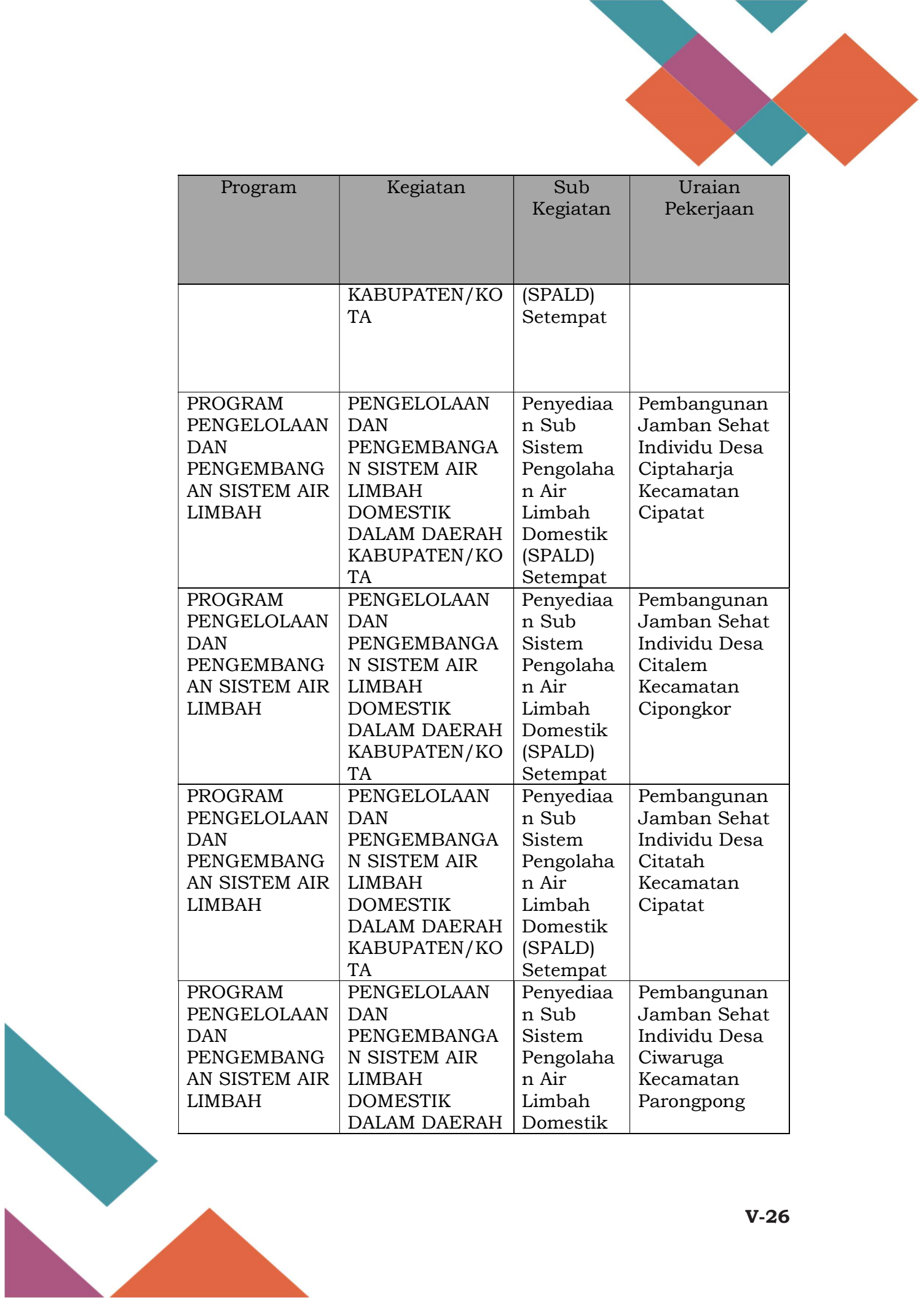
Tahun 2024

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian Pekerjaan
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH DOMESTIK DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Pembangunan Jamban Sehat Individu Desa Baranangsiang Kecamatan Cipongkor
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH DOMESTIK DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Pembangunan Jamban Sehat Individu Desa Cibenda Kecamatan Cipongkor
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN	PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air	Pembangunan Jamban Sehat Individu Desa Cicangkanggira

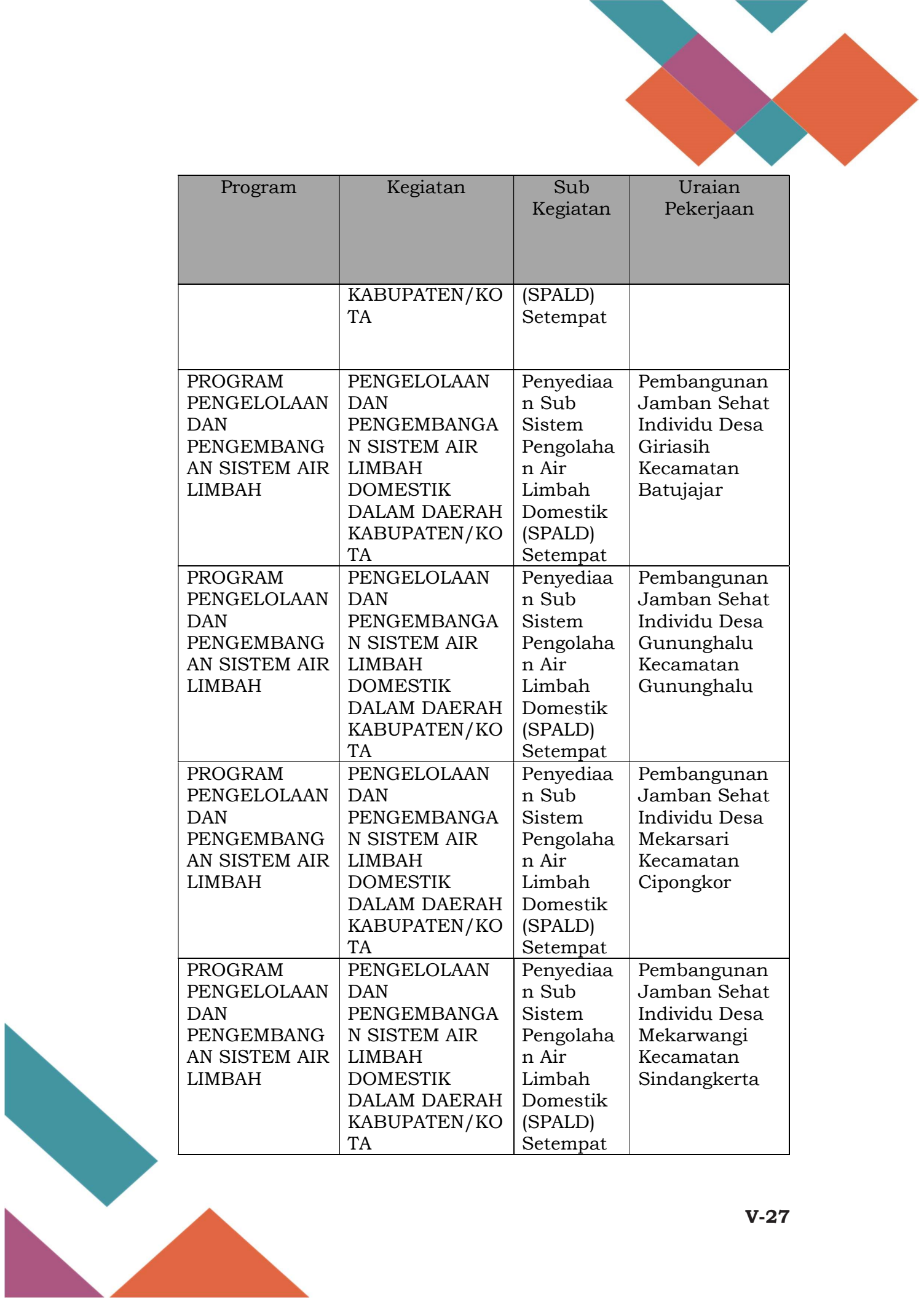




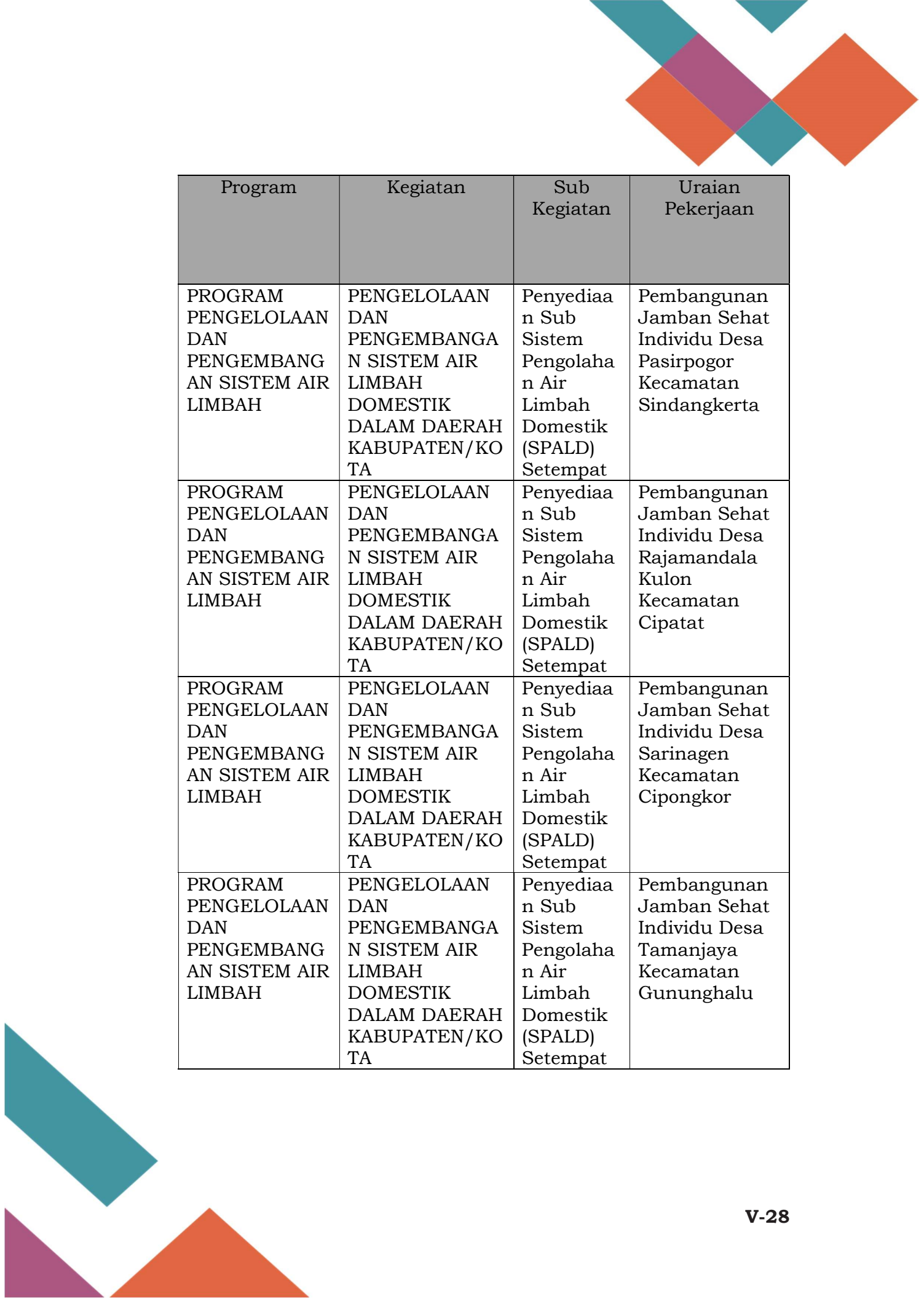
Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian Pekerjaan
AN SISTEM AIR LIMBAH	DOMESTIK DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	Limbah Domestik (SPALD) Setempat	ng Kecamatan Sindangkerta
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH DOMESTIK DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Pembangunan Jamban Sehat Individu Desa Cijambu Kecamatan Cipongkor
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH DOMESTIK DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Pembangunan Jamban Sehat Individu Desa Cijenuk Kecamatan Cipongkor
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH DOMESTIK DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Pembangunan Jamban Sehat Individu Desa Cilangari Kecamatan Gununghalu
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH DOMESTIK DALAM DAERAH	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik	Pembangunan Jamban Sehat Individu Desa Cintaasih Kecamatan Cipongkor



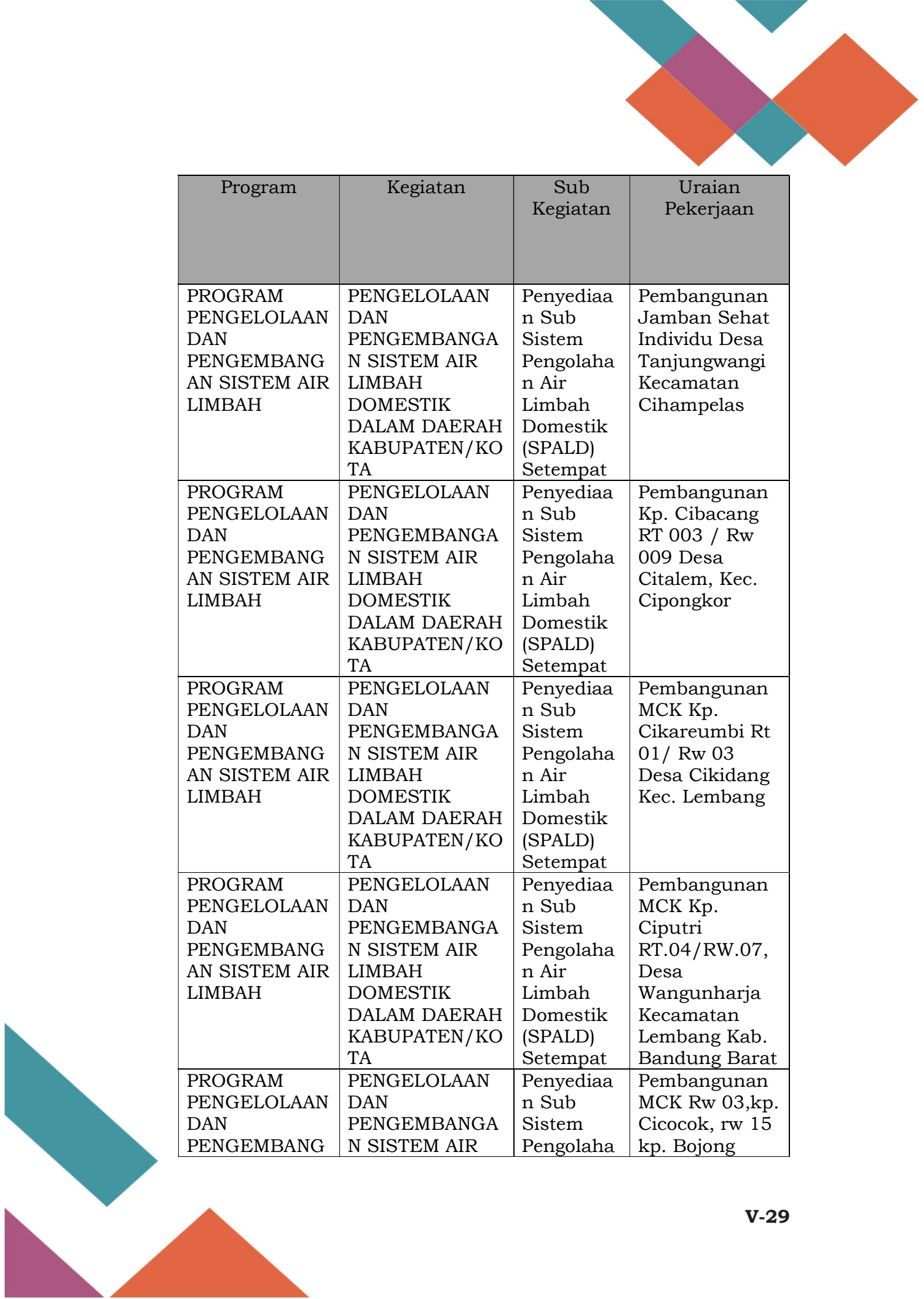
Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian Pekerjaan
	KABUPATEN/KOTA	(SPALD) Setempat	
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH DOMESTIK DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Pembangunan Jamban Sehat Individu Desa Ciptaharja Kecamatan Cipatat
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH DOMESTIK DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Pembangunan Jamban Sehat Individu Desa Citalem Kecamatan Cipongkor
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH DOMESTIK DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Pembangunan Jamban Sehat Individu Desa Citatah Kecamatan Cipatat
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH DOMESTIK DALAM DAERAH	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik	Pembangunan Jamban Sehat Individu Desa Ciwaruga Kecamatan Parongpong



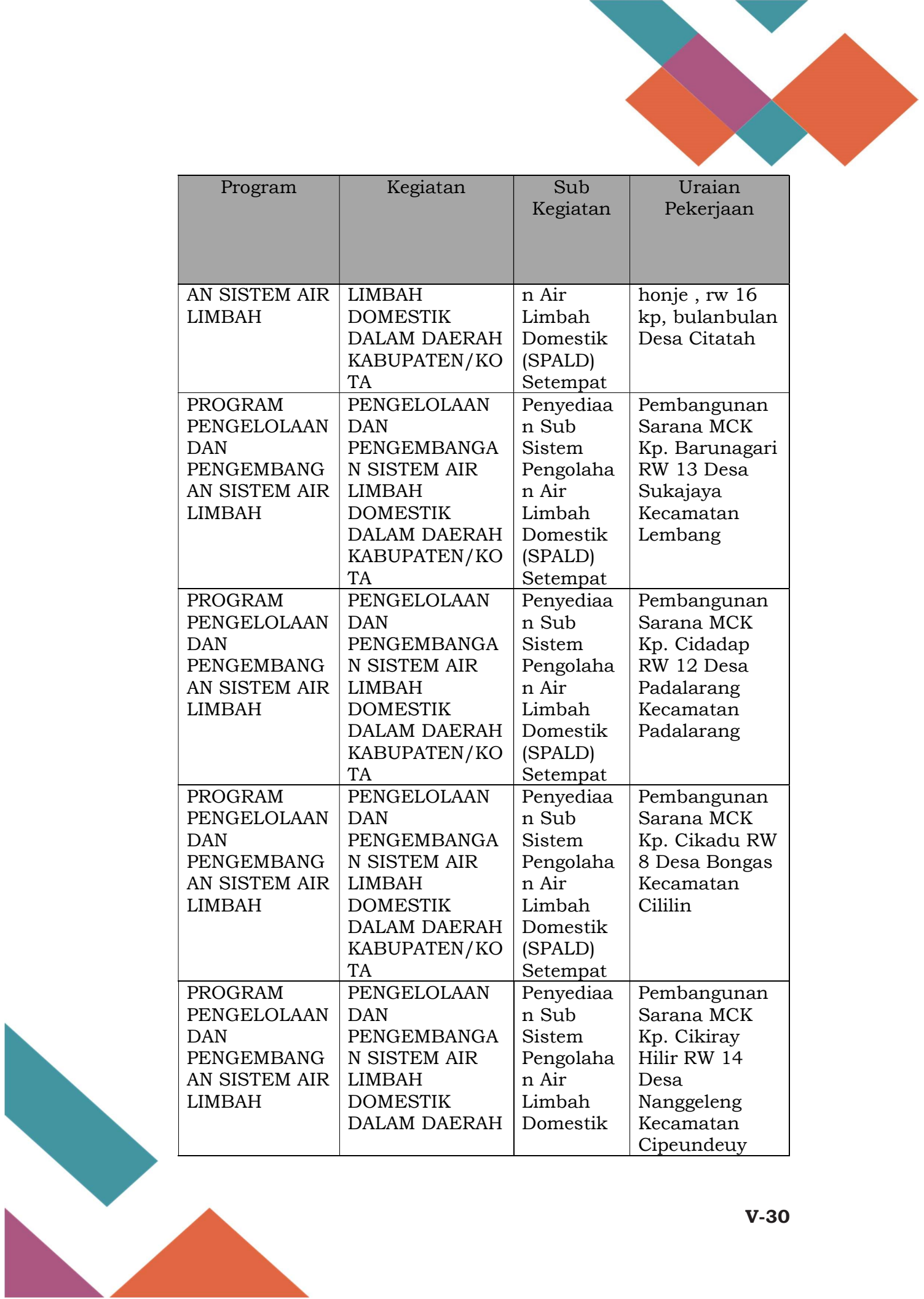
Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian Pekerjaan
	KABUPATEN/KOTA	(SPALD) Setempat	
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH DOMESTIK DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Pembangunan Jamban Sehat Individu Desa Giriasih Kecamatan Batujajar
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH DOMESTIK DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Pembangunan Jamban Sehat Individu Desa Gununghalu Kecamatan Gununghalu
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH DOMESTIK DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Pembangunan Jamban Sehat Individu Desa Mekarsari Kecamatan Cipongkor
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH DOMESTIK DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Pembangunan Jamban Sehat Individu Desa Mekarwangi Kecamatan Sindangkerta



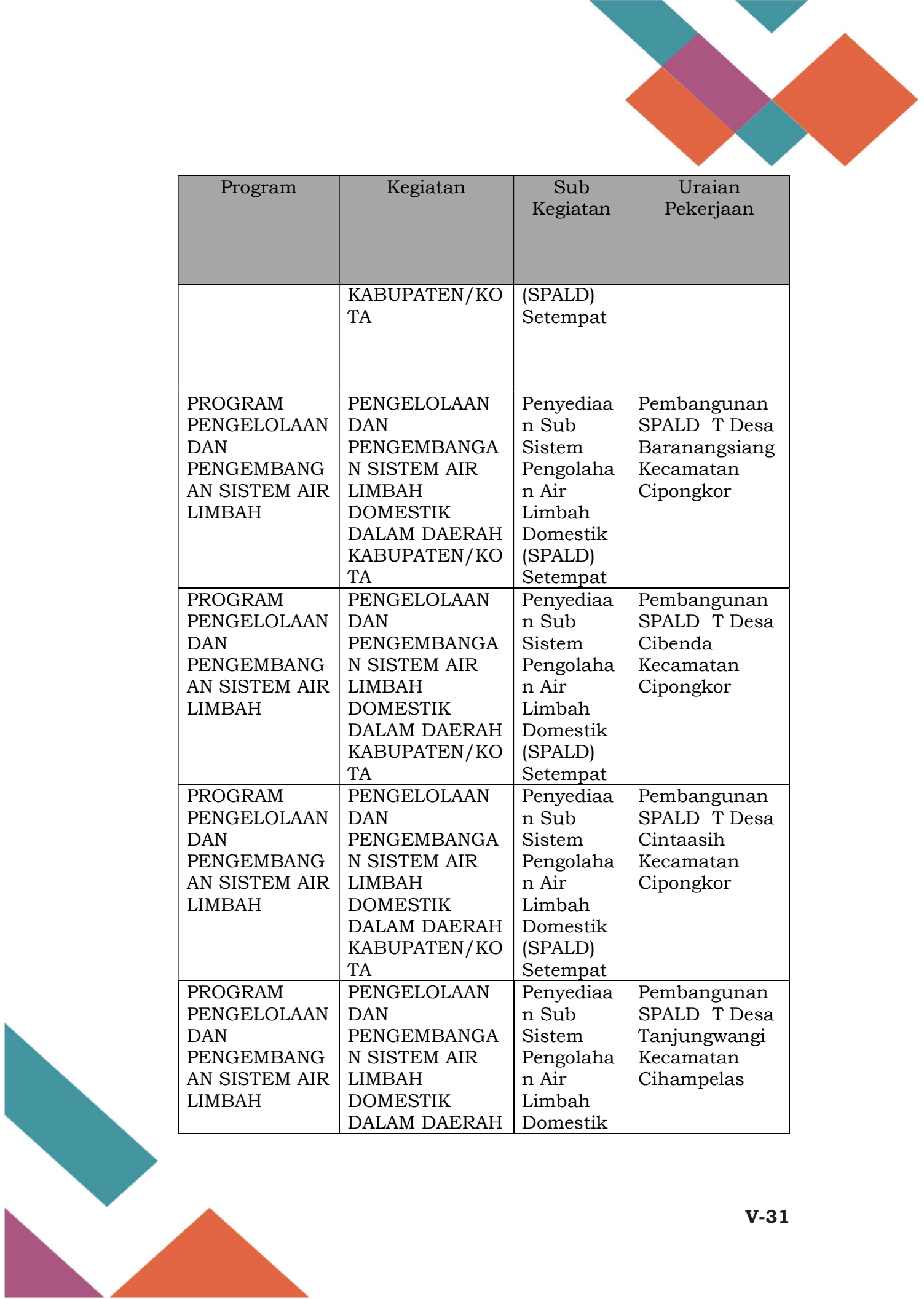
Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian Pekerjaan
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH DOMESTIK DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Pembangunan Jamban Sehat Individu Desa Pasirpogor Kecamatan Sindangkerta
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH DOMESTIK DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Pembangunan Jamban Sehat Individu Desa Rajamandala Kulon Kecamatan Cipatat
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH DOMESTIK DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Pembangunan Jamban Sehat Individu Desa Sarinagen Kecamatan Cipongkor
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH DOMESTIK DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Pembangunan Jamban Sehat Individu Desa Tamanjaya Kecamatan Gununghalu



Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian Pekerjaan
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH DOMESTIK DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Pembangunan Jamban Sehat Individu Desa Tanjungwangi Kecamatan Cihampelas
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH DOMESTIK DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Pembangunan Kp. Cibacang RT 003 / Rw 009 Desa Citalan, Kec. Cipongkor
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH DOMESTIK DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Pembangunan MCK Kp. Cikareumbi Rt 01/ Rw 03 Desa Cikidang Kec. Lembang
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH DOMESTIK DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Pembangunan MCK Kp. Ciputri RT.04/RW.07, Desa Wangunharja Kecamatan Lembang Kab. Bandung Barat
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN	PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan	Pembangunan MCK Rw 03,kp. Cicocok, rw 15 kp. Bojong



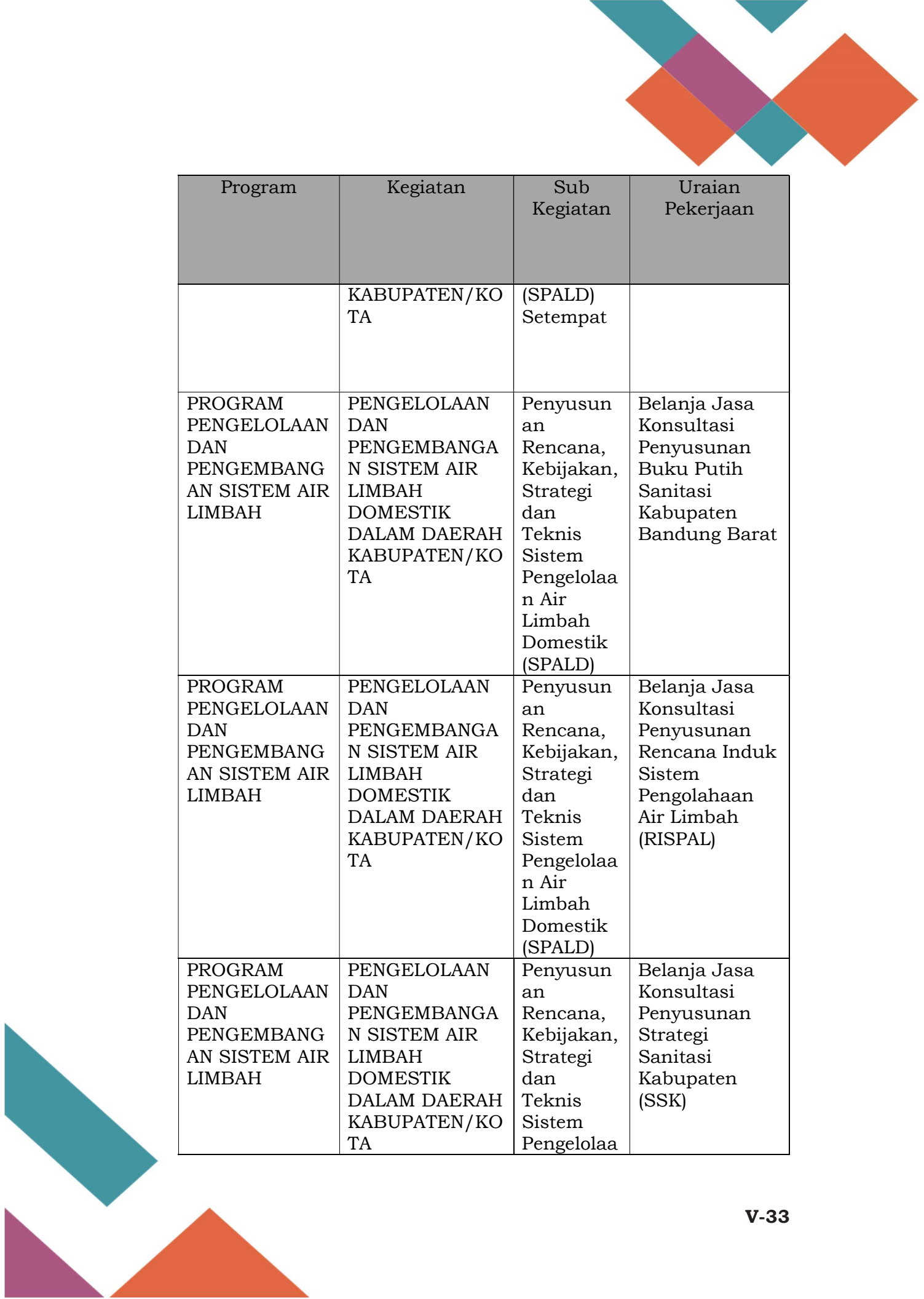
Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian Pekerjaan
AN SISTEM AIR LIMBAH	LIMBAH DOMESTIK DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	n Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	honje , rw 16 kp, bulanbulan Desa Citatah
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH DOMESTIK DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Pembangunan Sarana MCK Kp. Barunagari RW 13 Desa Sukajaya Kecamatan Lembang
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH DOMESTIK DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Pembangunan Sarana MCK Kp. Cidadap RW 12 Desa Padalarang Kecamatan Padalarang
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH DOMESTIK DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Pembangunan Sarana MCK Kp. Cikadu RW 8 Desa Bongas Kecamatan Cililin
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH DOMESTIK DALAM DAERAH	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik	Pembangunan Sarana MCK Kp. Cikiray Hilir RW 14 Desa Nanggaleng Kecamatan Cipeundeuy



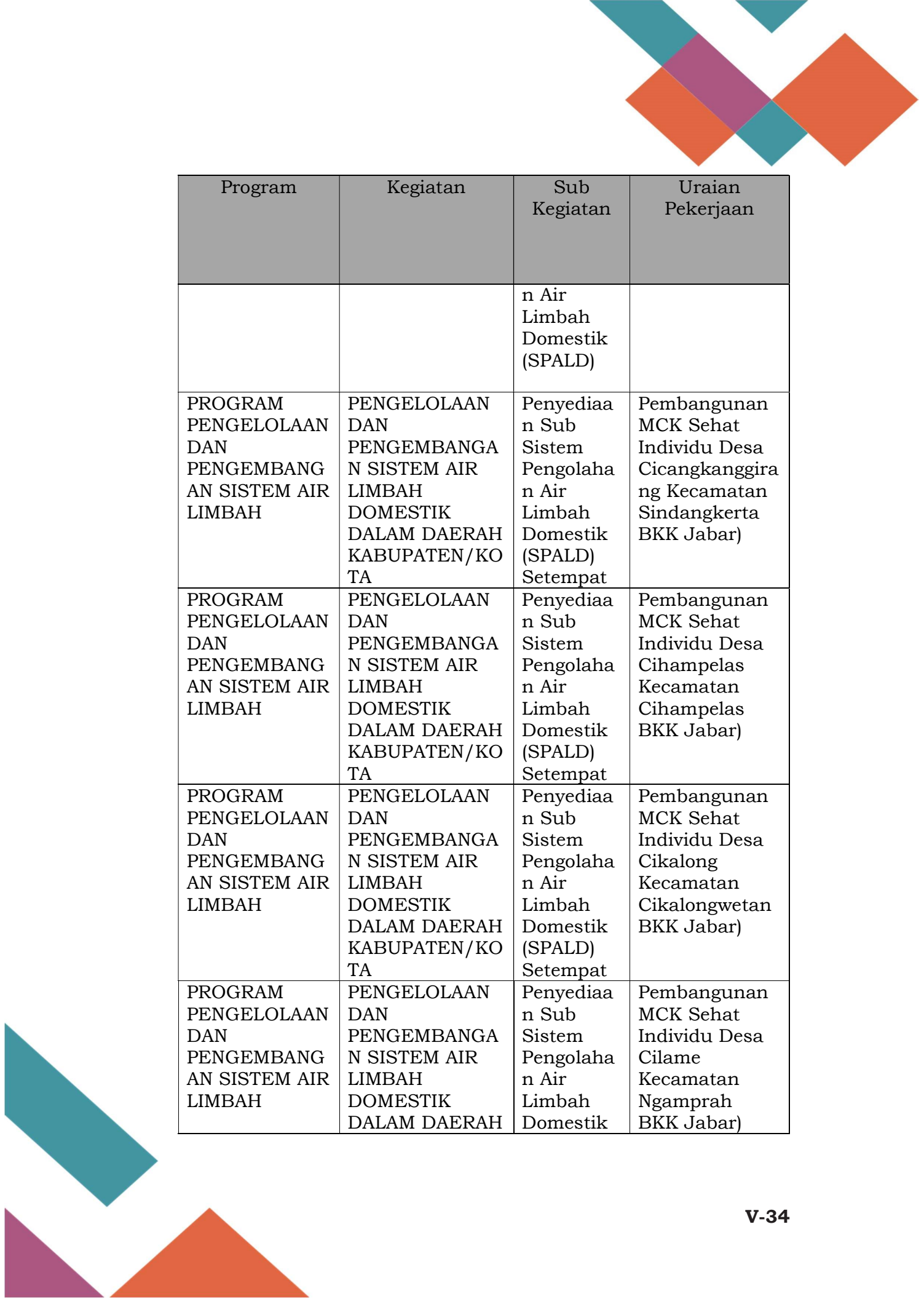
Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian Pekerjaan
	KABUPATEN/KOTA	(SPALD) Setempat	
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH DOMESTIK DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Pembangunan SPALD T Desa Baranangsiang Kecamatan Cipongkor
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH DOMESTIK DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Pembangunan SPALD T Desa Cibenda Kecamatan Cipongkor
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH DOMESTIK DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Pembangunan SPALD T Desa Cintaasih Kecamatan Cipongkor
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH DOMESTIK DALAM DAERAH	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik	Pembangunan SPALD T Desa Tanjungwangi Kecamatan Cihampelas



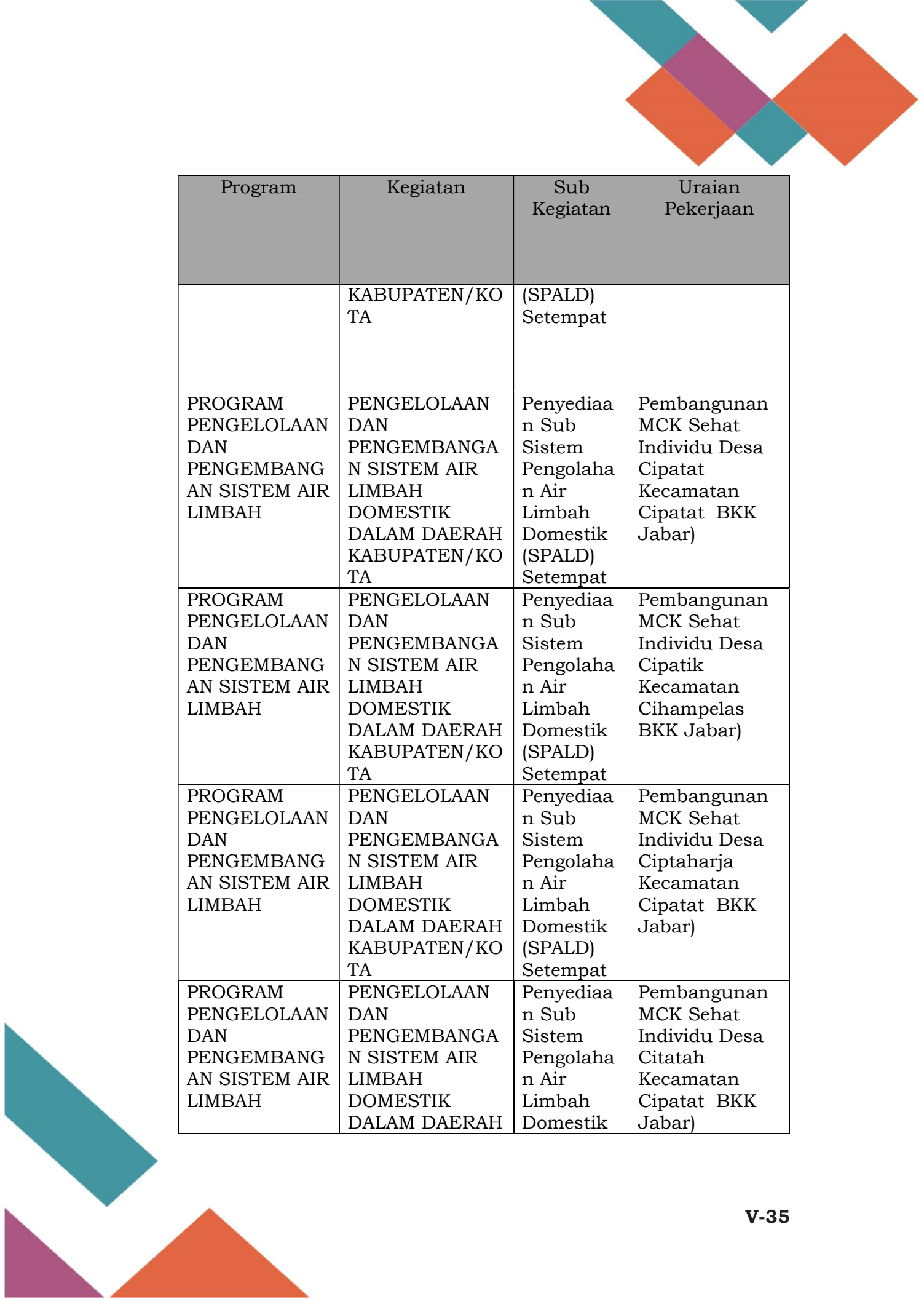
Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian Pekerjaan
	KABUPATEN/KOTA	(SPALD) Setempat	
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH DOMESTIK DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	JASA KONSULTASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN SARANA MCK WILAYAH II
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH DOMESTIK DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	JASA KONSULTASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN SARANA MCK WILAYAH I
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH DOMESTIK DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	JASA KONSULTASI PENGAWASAN PEMBANGUNAN SARANA MCK WILAYAH II
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH DOMESTIK DALAM DAERAH	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik	JASA KONSULTASI PENGAWASAN PEMBANGUNAN SARANA MCK WILAYAH I



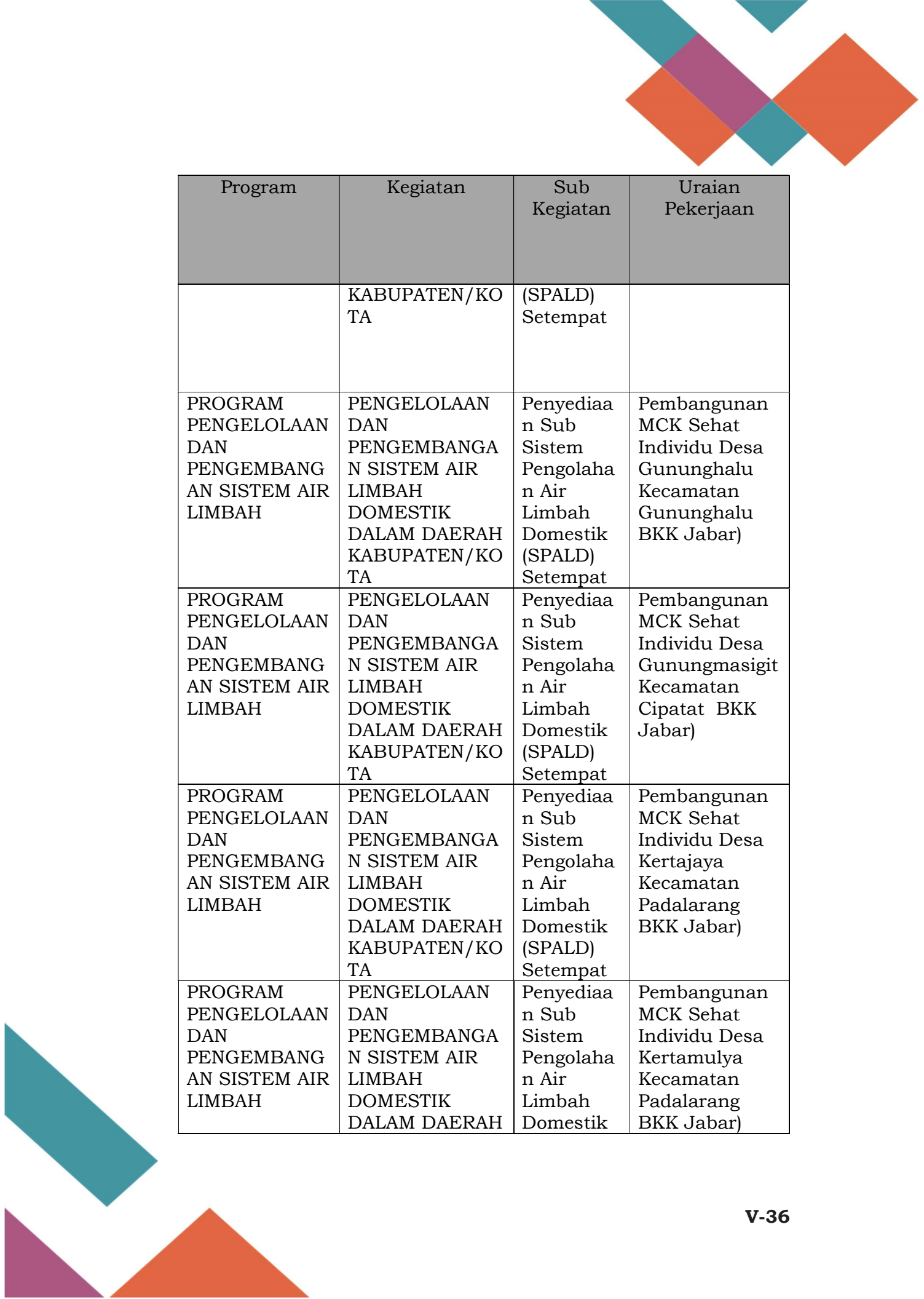
Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian Pekerjaan
	KABUPATEN/KOTA	(SPALD) Setempat	
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH DOMESTIK DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Belanja Jasa Konsultasi Penyusunan Buku Putih Sanitasi Kabupaten Bandung Barat
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH DOMESTIK DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Belanja Jasa Konsultasi Penyusunan Rencana Induk Sistem Pengolahan Air Limbah (RISPAL)
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH DOMESTIK DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan	Belanja Jasa Konsultasi Penyusunan Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK)



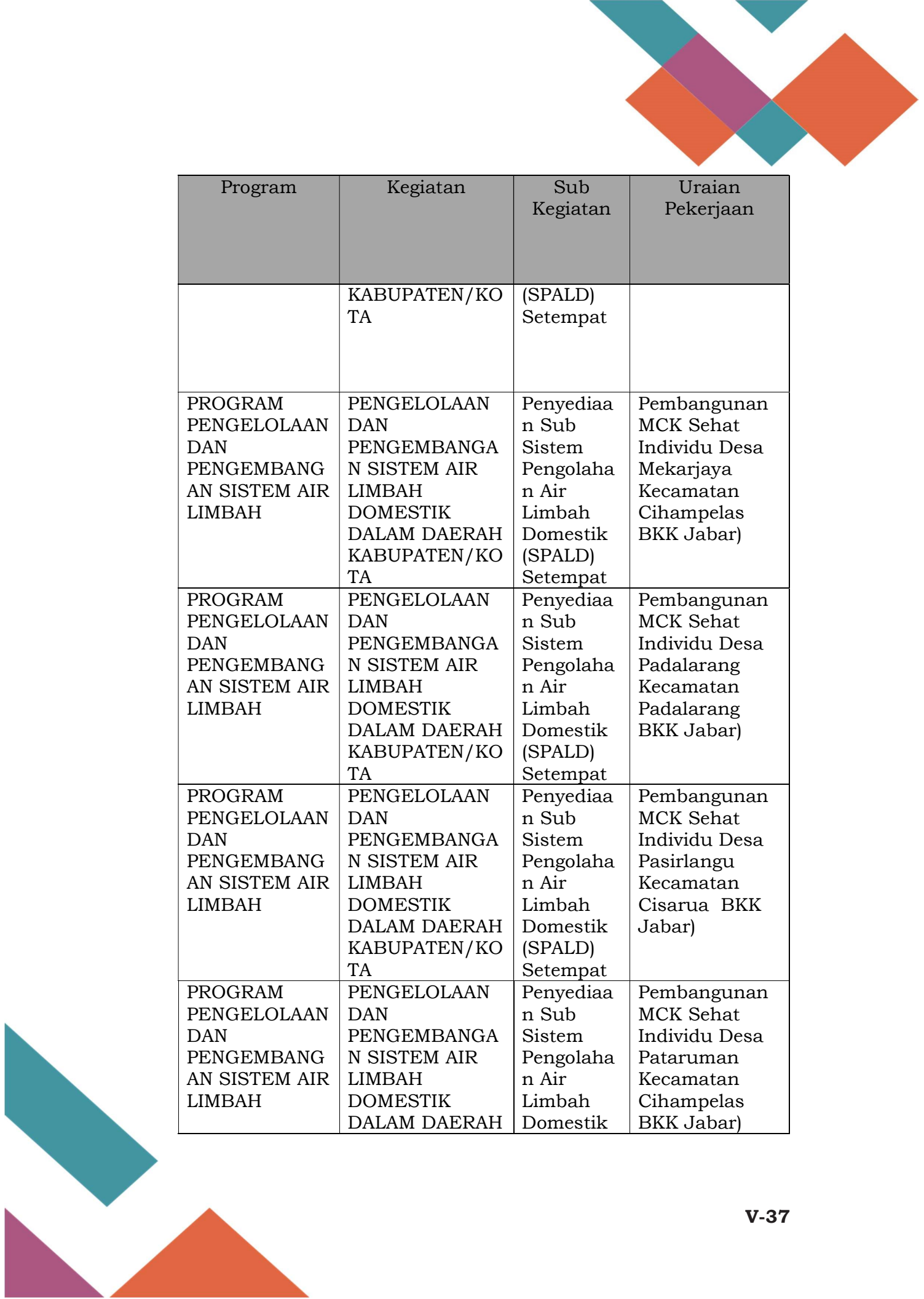
Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian Pekerjaan
		n Air Limbah Domestik (SPALD)	
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH DOMESTIK DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Pembangunan MCK Sehat Individu Desa Cicangkangiring Kecamatan Sindangkerta BKK Jabar)
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH DOMESTIK DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Pembangunan MCK Sehat Individu Desa Cihampelas Kecamatan Cihampelas BKK Jabar)
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH DOMESTIK DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Pembangunan MCK Sehat Individu Desa Cikalong Kecamatan Cikalongwetan BKK Jabar)
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH DOMESTIK DALAM DAERAH	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik	Pembangunan MCK Sehat Individu Desa Cilame Kecamatan Ngamprah BKK Jabar)



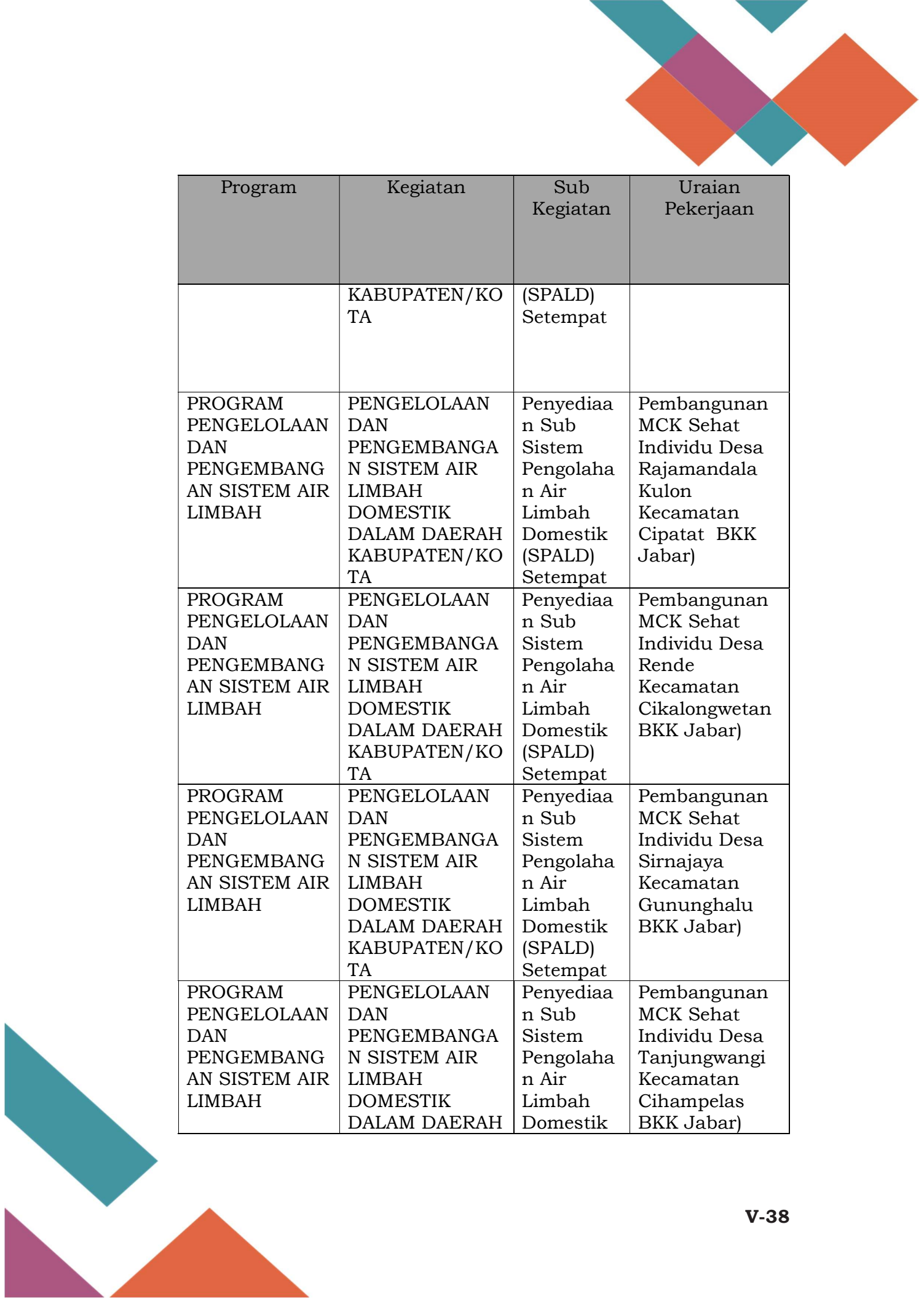
Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian Pekerjaan
	KABUPATEN/KOTA	(SPALD) Setempat	
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH DOMESTIK DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Pembangunan MCK Sehat Individu Desa Cipatat Kecamatan Cipatat BKK Jabar)
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH DOMESTIK DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Pembangunan MCK Sehat Individu Desa Cipatik Kecamatan Cihampelas BKK Jabar)
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH DOMESTIK DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Pembangunan MCK Sehat Individu Desa Ciptaharja Kecamatan Cipatat BKK Jabar)
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH DOMESTIK DALAM DAERAH	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik	Pembangunan MCK Sehat Individu Desa Citatah Kecamatan Cipatat BKK Jabar)



Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian Pekerjaan
	KABUPATEN/KOTA	(SPALD) Setempat	
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH DOMESTIK DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Pembangunan MCK Sehat Individu Desa Gununghalu Kecamatan Gununghalu BKK Jabar)
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH DOMESTIK DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Pembangunan MCK Sehat Individu Desa Gunungmasigit Kecamatan Cipatat BKK Jabar)
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH DOMESTIK DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Pembangunan MCK Sehat Individu Desa Kertajaya Kecamatan Padalarang BKK Jabar)
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH DOMESTIK DALAM DAERAH	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik	Pembangunan MCK Sehat Individu Desa Kertamulya Kecamatan Padalarang BKK Jabar)



Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian Pekerjaan
	KABUPATEN/KOTA	(SPALD) Setempat	
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH DOMESTIK DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Pembangunan MCK Sehat Individu Desa Mekarjaya Kecamatan Cihampelas BKK Jabar)
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH DOMESTIK DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Pembangunan MCK Sehat Individu Desa Padalarang Kecamatan Padalarang BKK Jabar)
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH DOMESTIK DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Pembangunan MCK Sehat Individu Desa Pasirlangu Kecamatan Cisarua BKK Jabar)
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH DOMESTIK DALAM DAERAH	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik	Pembangunan MCK Sehat Individu Desa Pataruman Kecamatan Cihampelas BKK Jabar)



Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian Pekerjaan
	KABUPATEN/KOTA	(SPALD) Setempat	
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH DOMESTIK DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Pembangunan MCK Sehat Individu Desa Rajamandala Kulon Kecamatan Cipatat BKK Jabar)
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH DOMESTIK DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Pembangunan MCK Sehat Individu Desa Rende Kecamatan Cikalongwetan BKK Jabar)
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH DOMESTIK DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Pembangunan MCK Sehat Individu Desa Sirnajaya Kecamatan Gunungghalu BKK Jabar)
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH DOMESTIK DALAM DAERAH	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik	Pembangunan MCK Sehat Individu Desa Tanjungwangi Kecamatan Cihampelas BKK Jabar)



Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian Pekerjaan
	KABUPATEN/KOTA	(SPALD) Setempat	
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH DOMESTIK DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Jasa Konsultansi Perencanaan MCK Sehat Individu BKK Jabar)
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH DOMESTIK DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Jasa Konsultansi Pengawasan MCK Sehat Individu Wilayah I BKK Jabar)
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH DOMESTIK DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Jasa Konsultansi Pengawasan MCK Sehat Individu Wilayah II BKK Jabar)

5.2. Persampahan

Berikut ini realisasi penanganan Persampahan di wilayah Kabupaten Bandung Barat

Tahun 2022

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian Pekerjaan
PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan TPA/TPST /SPA/TPS-3R/TPS	Pembangunan TPS Desa Suntenjaya Kecamatan Lembang

Tahun 2024

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian Pekerjaan
PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN DI DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pembangunan TPA/TPST /SPA/TPS 63R/TPS	Pembangunan Sarana TPS3R di Komplek Pemda KBB
PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN DI DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pembangunan TPA/TPST /SPA/TPS 63R/TPS	Pembangunan Sarana TPS Desa Cikidang Kecamatan Lembang
PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN DI DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST /SPA/TPS 63R/TPS	DUMP TRUCK 136HD ARM ROLL SINGLE HYDROULIK KONTAINER TERBUKA STAINLESS STEEL



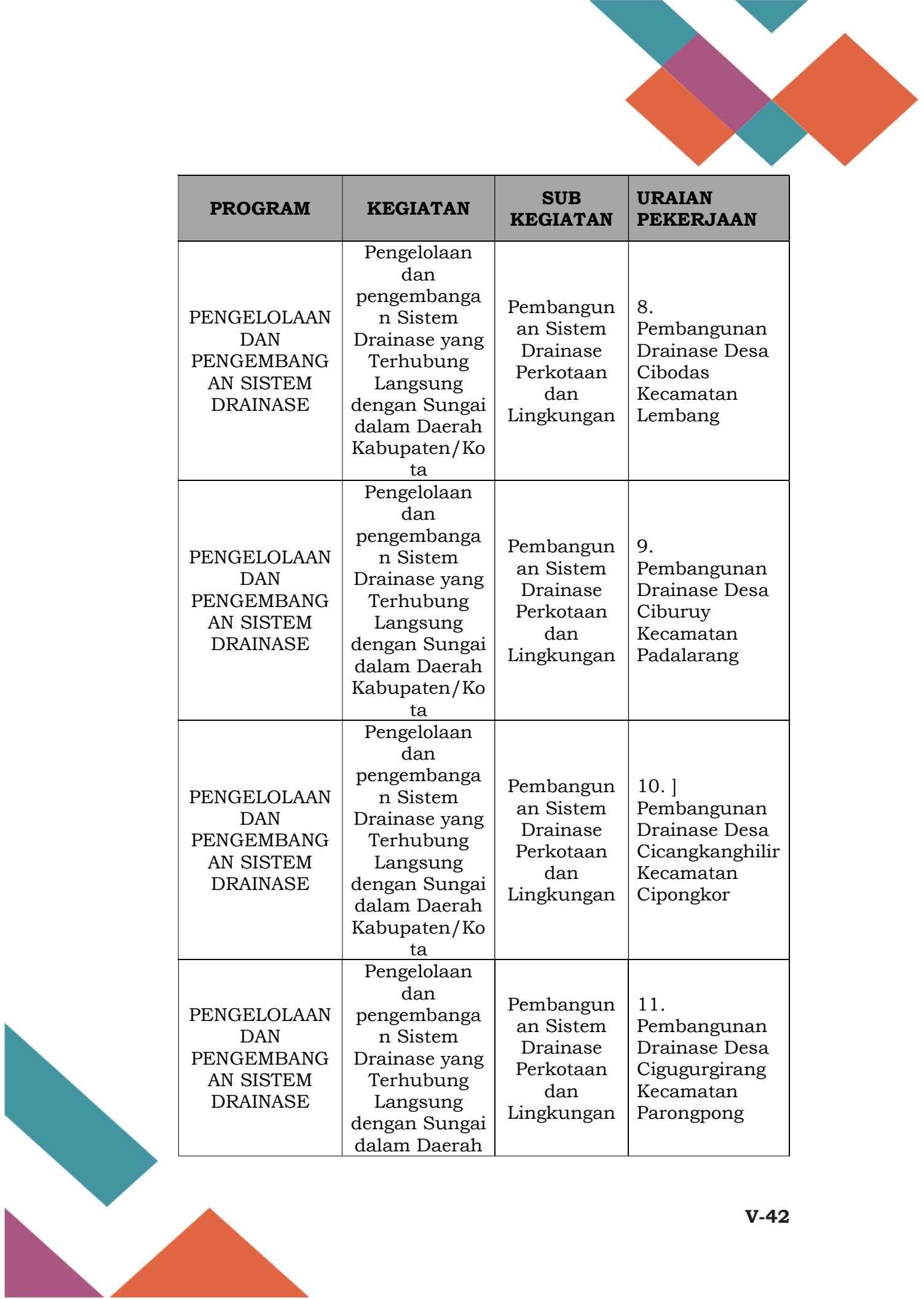
Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian Pekerjaan
PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN DI DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST /SPA/TPS 63R/TPS	Kontainer Bak Sampah 6m3 Terbuka
PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN DI DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST /SPA/TPS 63R/TPS	MOBIL CARRY PU WD AC PS
PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN DI DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST /SPA/TPS 63R/TPS	Motor 150 L 200 L BAK SAMPAH TERBUKA TANPA HIDROLIK

5.3. Drainase

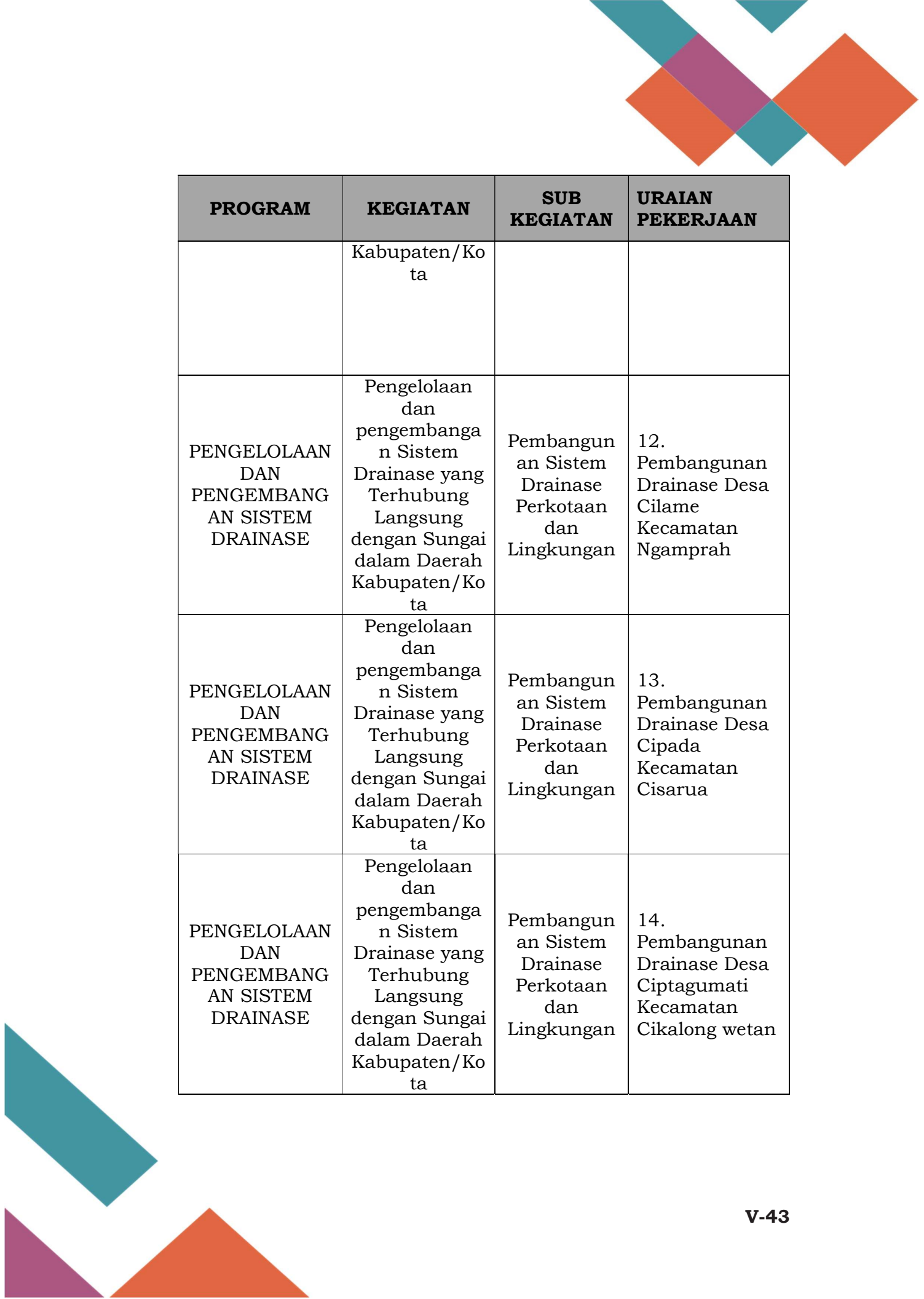
Tahun 2021

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	URAIAN PEKERJAAN
PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan dan Lingkungan	7. Pembangunan Drainase Desa Batujajar Kecamatan Batujajar

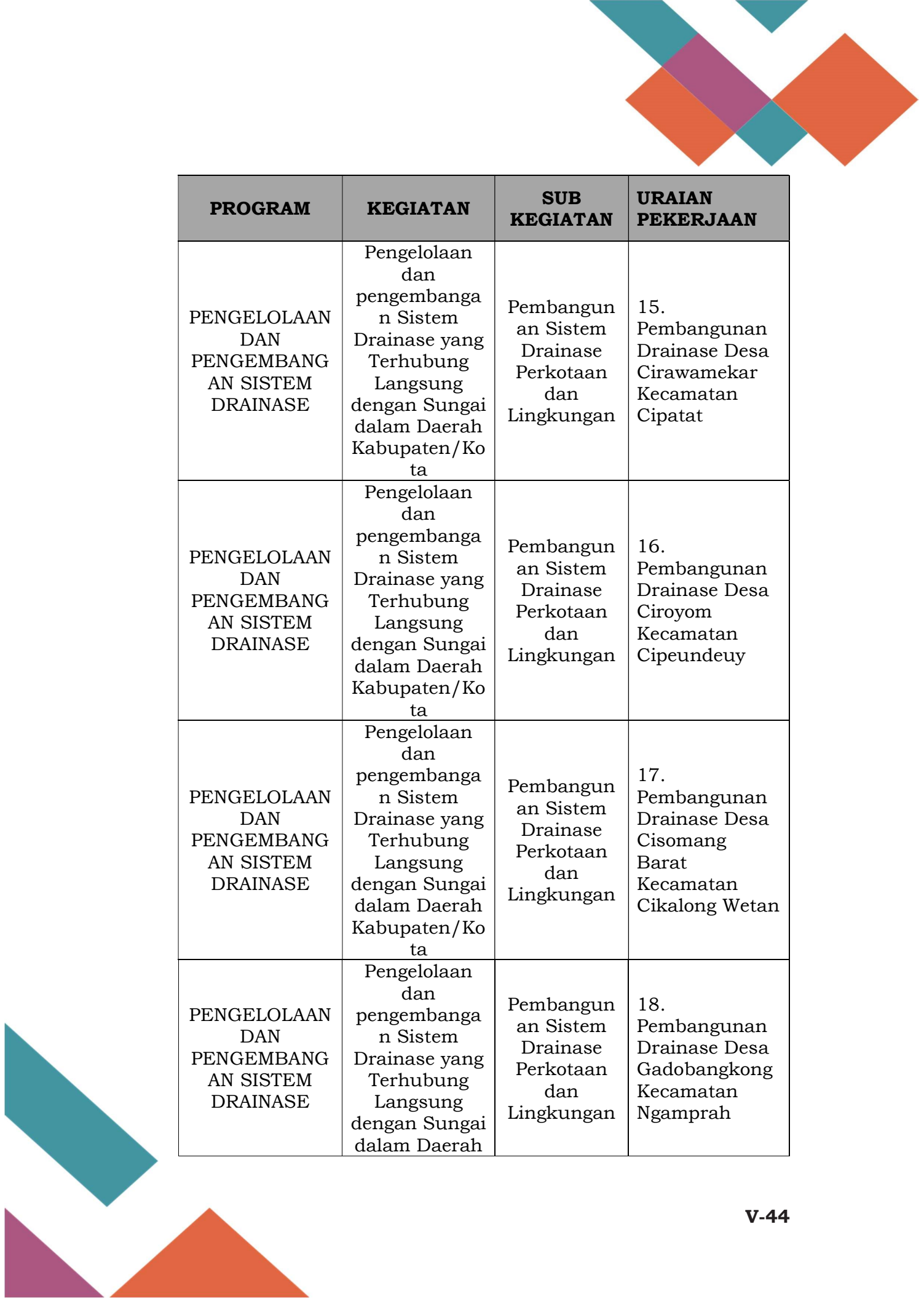




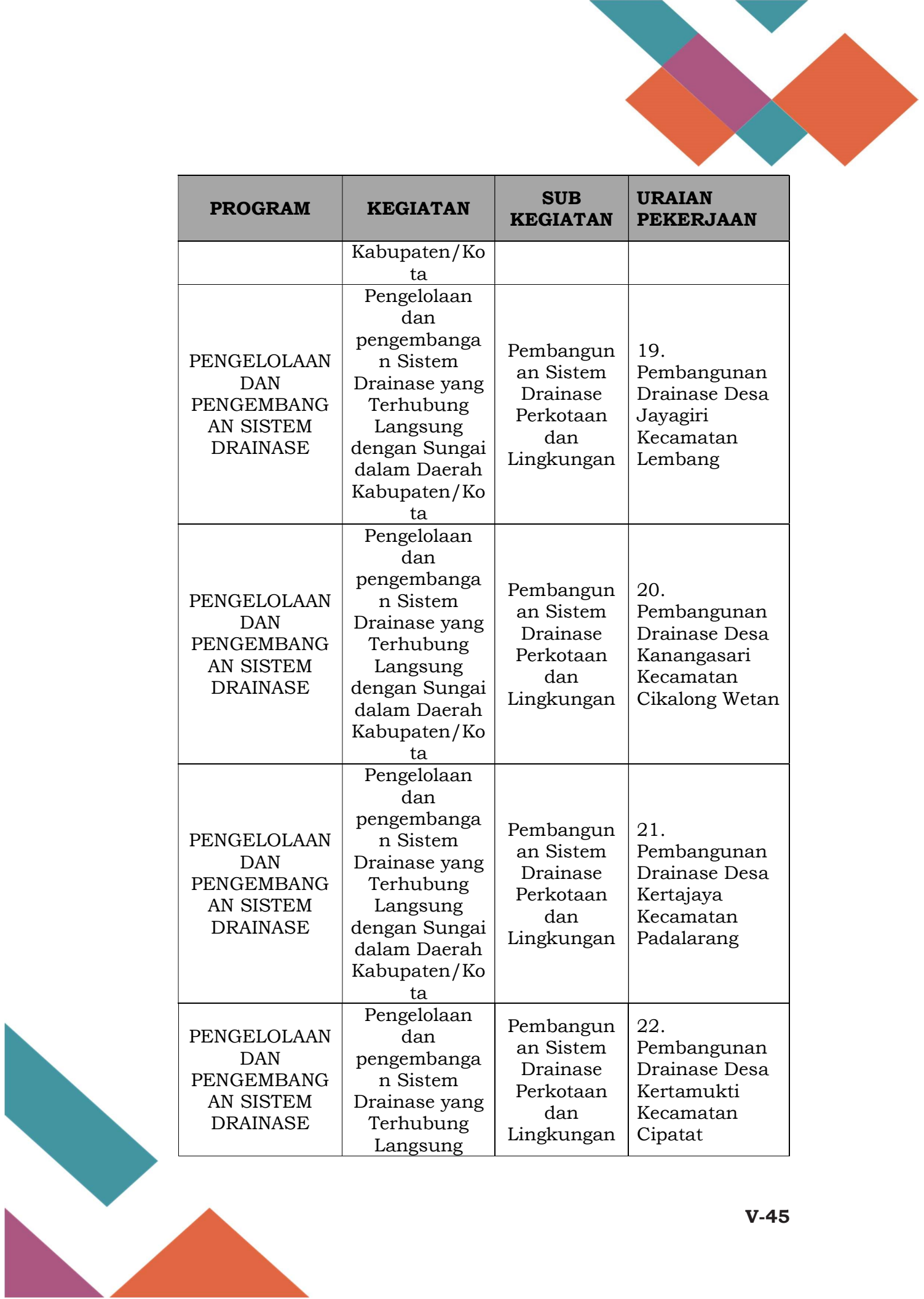
PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	URAIAN PEKERJAAN
PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan dan Lingkungan	8. Pembangunan Drainase Desa Cibodas Kecamatan Lembang
PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan dan Lingkungan	9. Pembangunan Drainase Desa Ciburuy Kecamatan Padalarang
PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan dan Lingkungan	10.] Pembangunan Drainase Desa Cicangkanghilir Kecamatan Cipongkor
PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan dan Lingkungan	11. Pembangunan Drainase Desa Cigugurgirang Kecamatan Parongpong



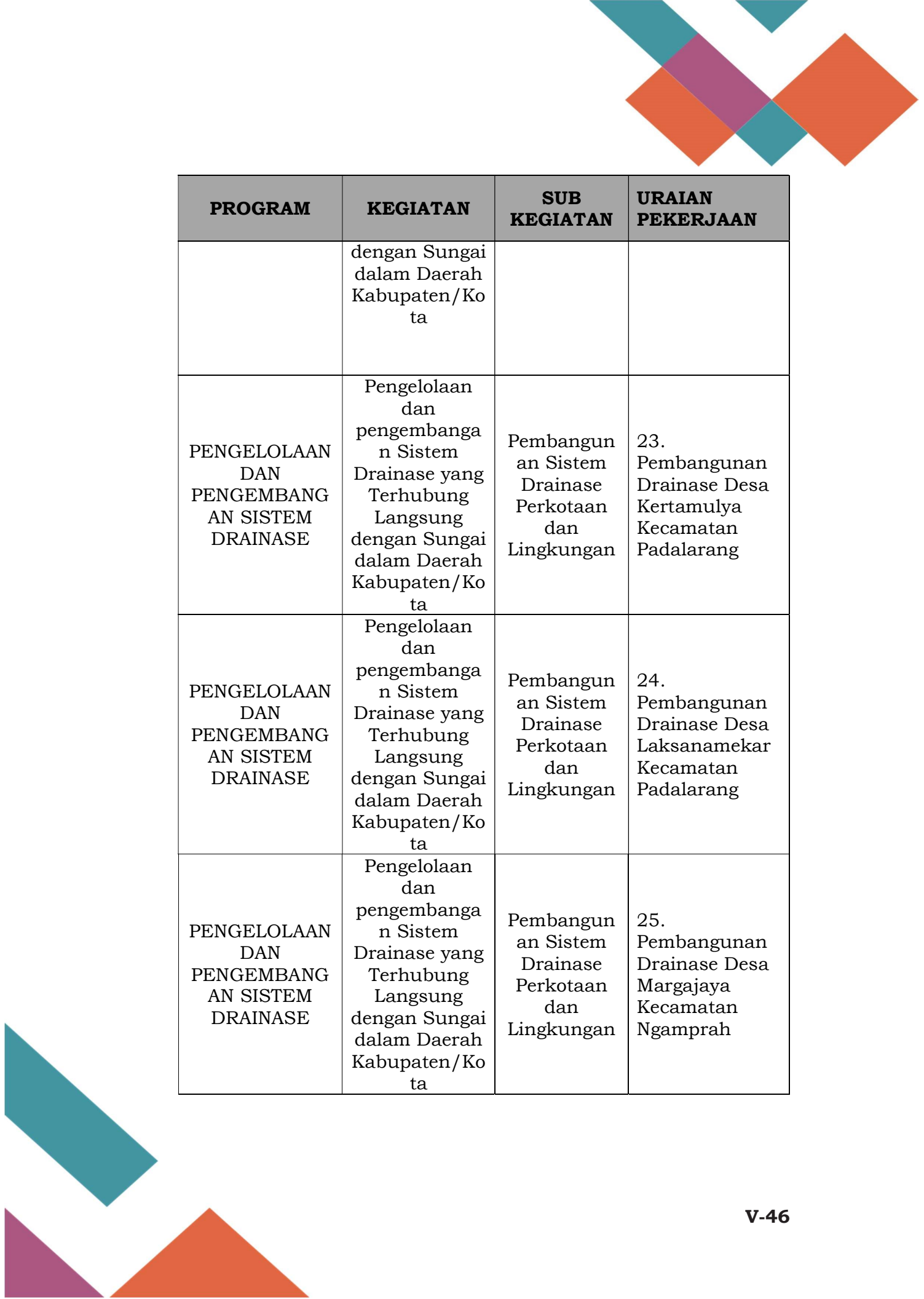
PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	URAIAN PEKERJAAN
	Kabupaten/Kota		
PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan dan Lingkungan	12. Pembangunan Drainase Desa Cilame Kecamatan Ngamprah
PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan dan Lingkungan	13. Pembangunan Drainase Desa Cipada Kecamatan Cisarua
PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan dan Lingkungan	14. Pembangunan Drainase Desa Ciptagumati Kecamatan Cikalong wetan



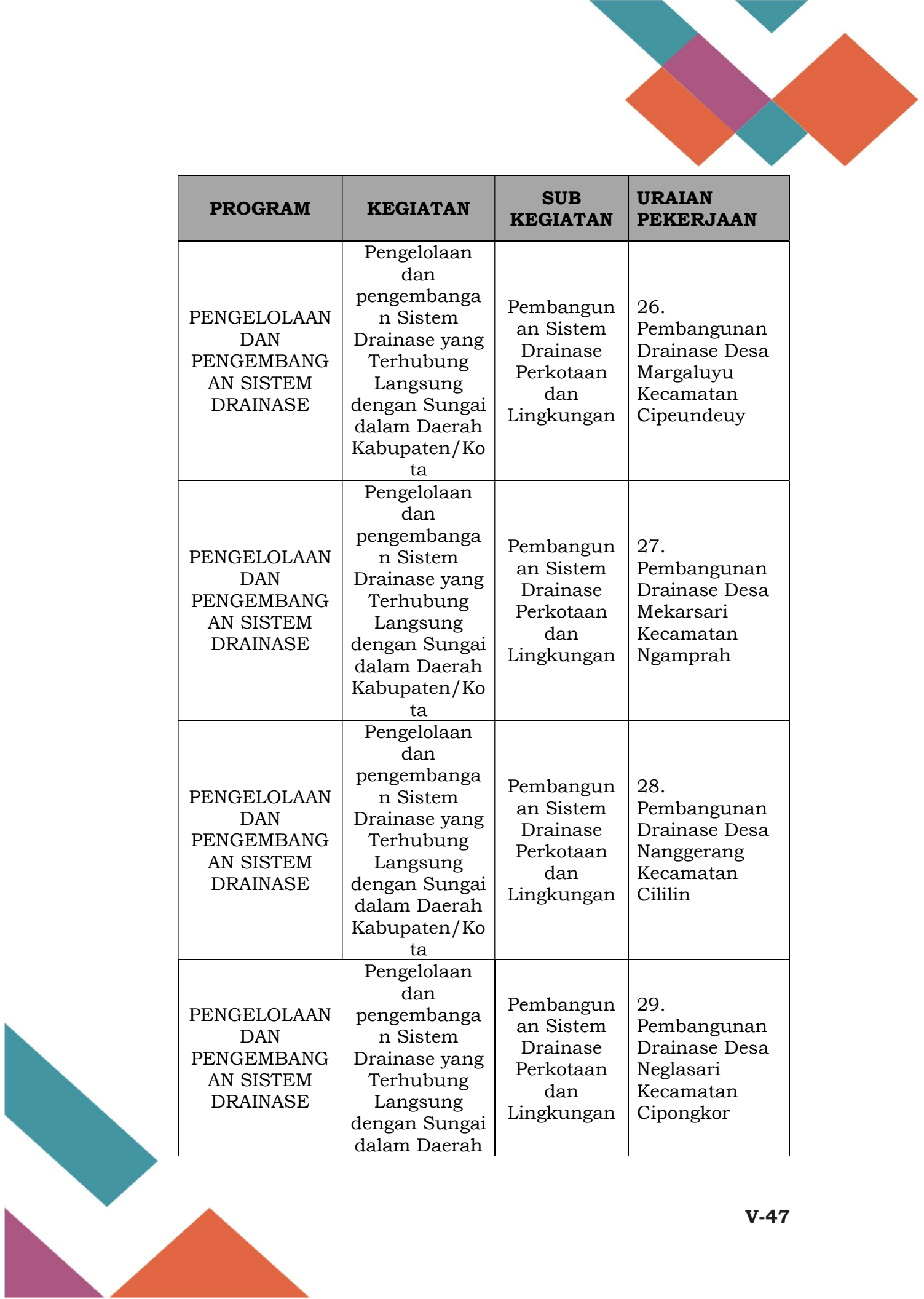
PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	URAIAN PEKERJAAN
PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan dan Lingkungan	15. Pembangunan Drainase Desa Cirawamekar Kecamatan Cipatat
PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan dan Lingkungan	16. Pembangunan Drainase Desa Ciroyom Kecamatan Cipeundeuy
PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan dan Lingkungan	17. Pembangunan Drainase Desa Cisomang Barat Kecamatan Cikalong Wetan
PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan dan Lingkungan	18. Pembangunan Drainase Desa Gadobangkong Kecamatan Ngamprah



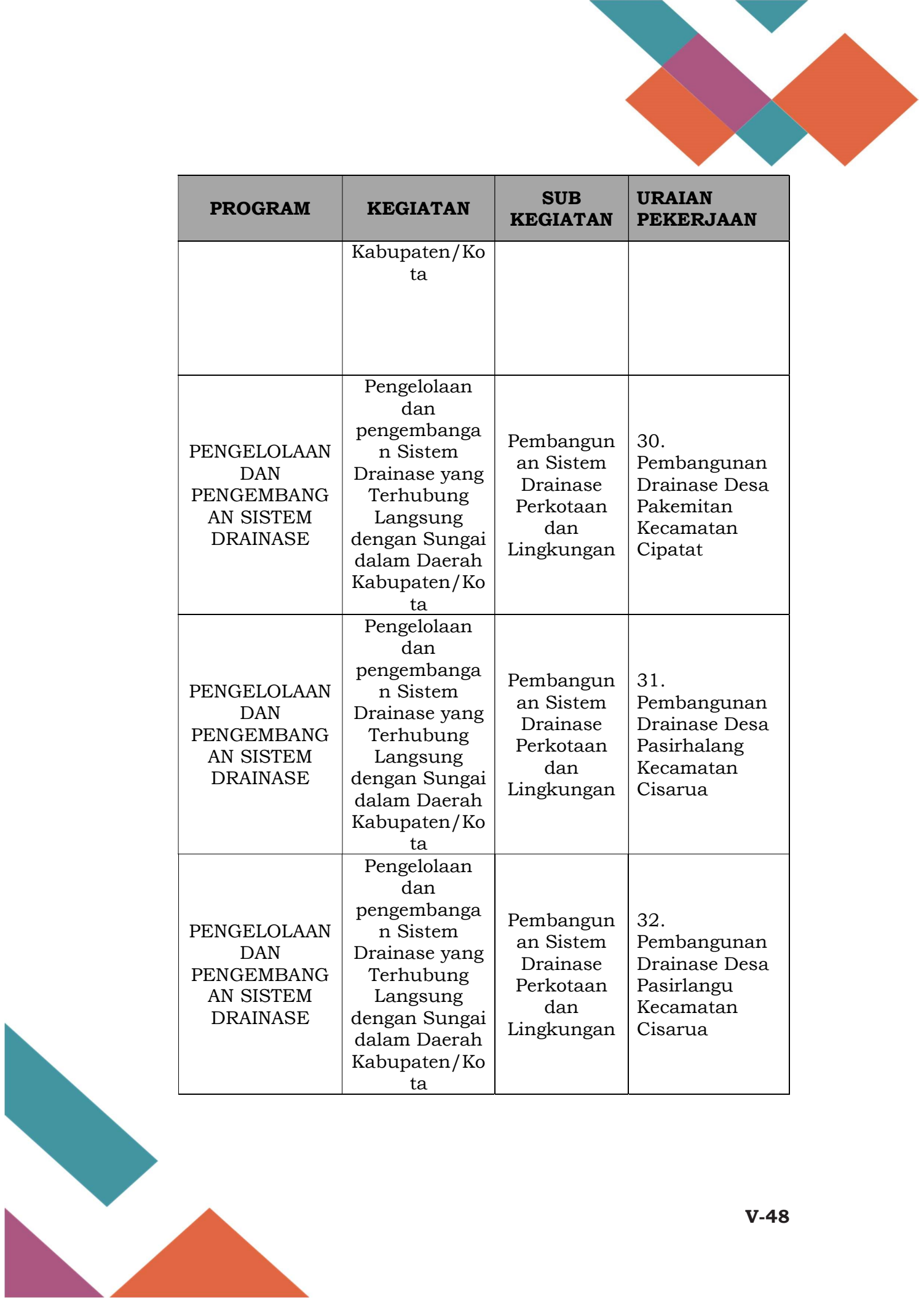
PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	URAIAN PEKERJAAN
	Kabupaten/Kota		
PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan dan Lingkungan	19. Pembangunan Drainase Desa Jayagiri Kecamatan Lembang
PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan dan Lingkungan	20. Pembangunan Drainase Desa Kanangasari Kecamatan Cikalong Wetan
PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan dan Lingkungan	21. Pembangunan Drainase Desa Kertajaya Kecamatan Padalarang
PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan dan Lingkungan	22. Pembangunan Drainase Desa Kertamukti Kecamatan Cipatat



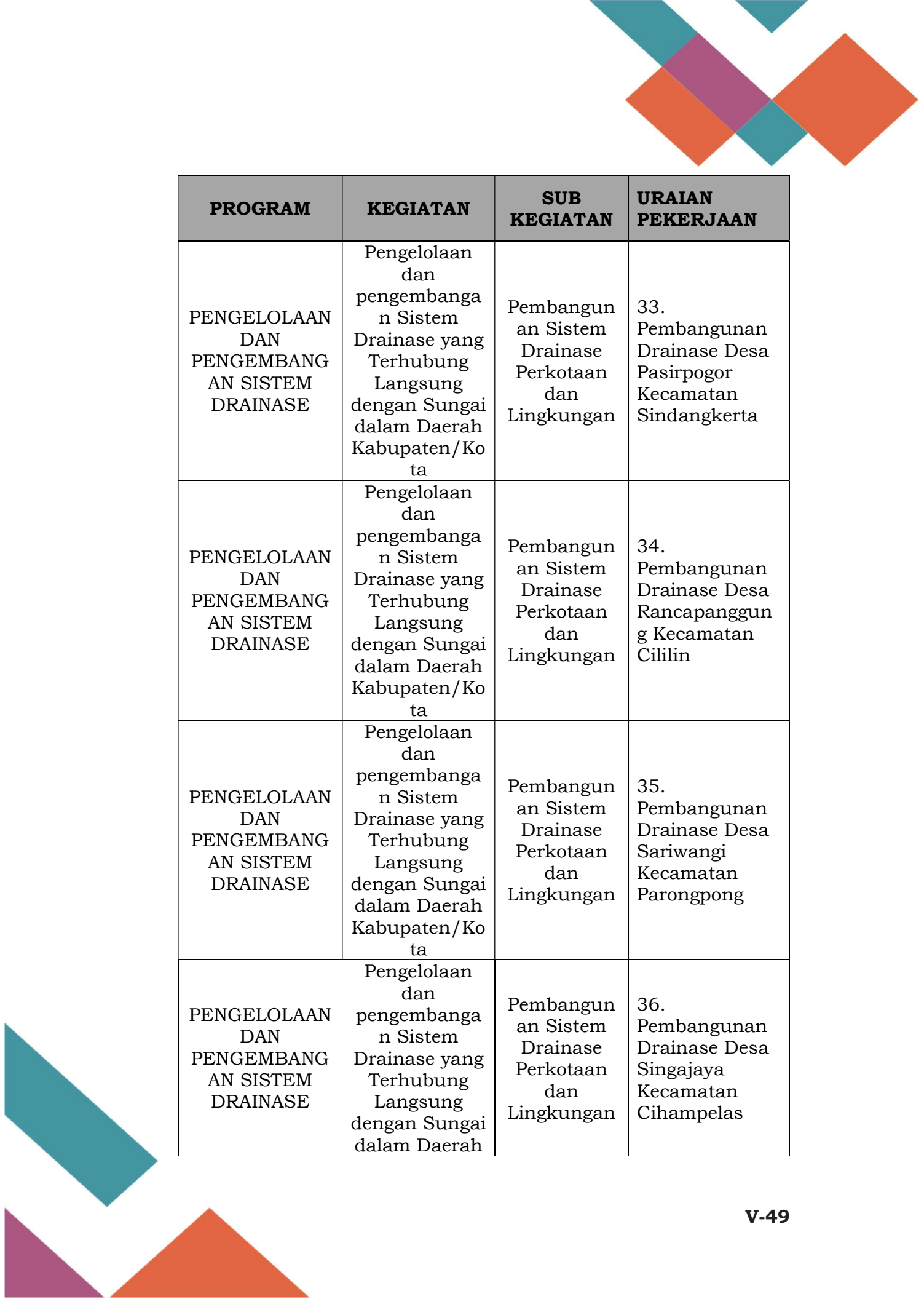
PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	URAIAN PEKERJAAN
	dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota		
PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan dan Lingkungan	23. Pembangunan Drainase Desa Kertamulya Kecamatan Padalarang
PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan dan Lingkungan	24. Pembangunan Drainase Desa Laksanamekar Kecamatan Padalarang
PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan dan Lingkungan	25. Pembangunan Drainase Desa Margajaya Kecamatan Ngamprah



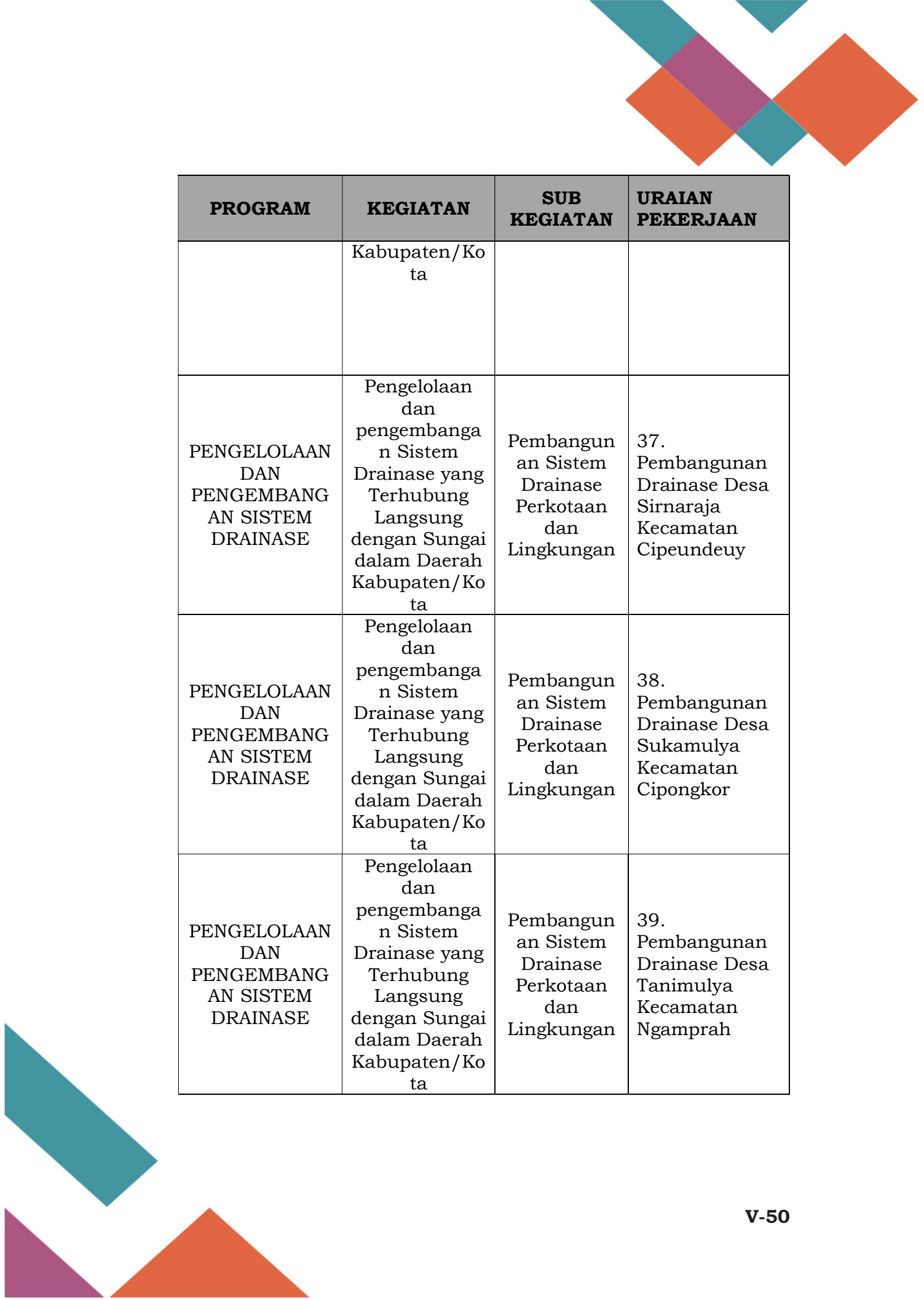
PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	URAIAN PEKERJAAN
PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan dan Lingkungan	26. Pembangunan Drainase Desa Margaluyu Kecamatan Cipeundeuy
PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan dan Lingkungan	27. Pembangunan Drainase Desa Mekarsari Kecamatan Ngamprah
PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan dan Lingkungan	28. Pembangunan Drainase Desa Nanggerang Kecamatan Cililin
PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan dan Lingkungan	29. Pembangunan Drainase Desa Neglasari Kecamatan Cipongkor



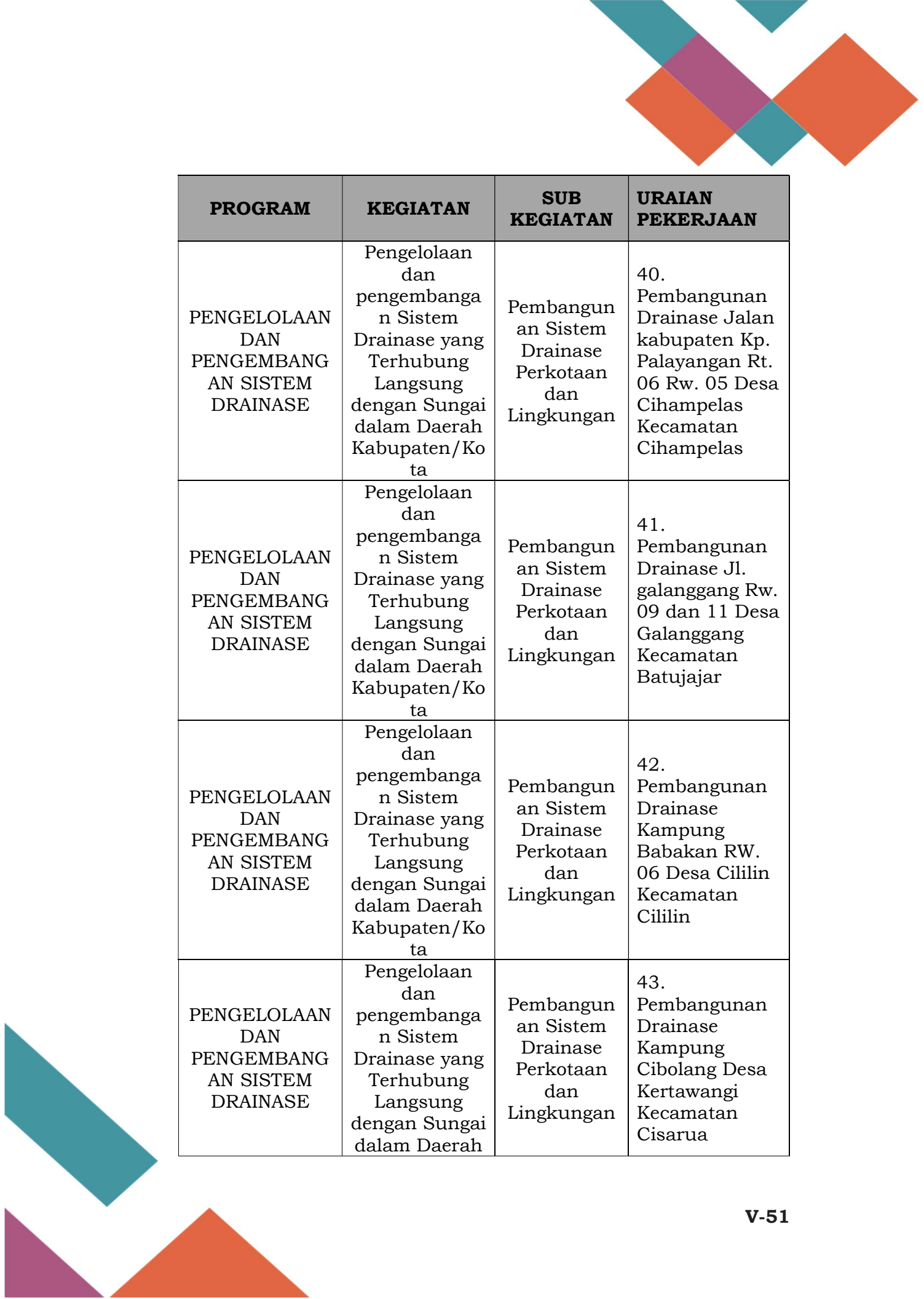
PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	URAIAN PEKERJAAN
	Kabupaten/Kota		
PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan dan Lingkungan	30. Pembangunan Drainase Desa Pakemitan Kecamatan Cipatat
PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan dan Lingkungan	31. Pembangunan Drainase Desa Pasirhalang Kecamatan Cisarua
PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan dan Lingkungan	32. Pembangunan Drainase Desa Pasirlangu Kecamatan Cisarua



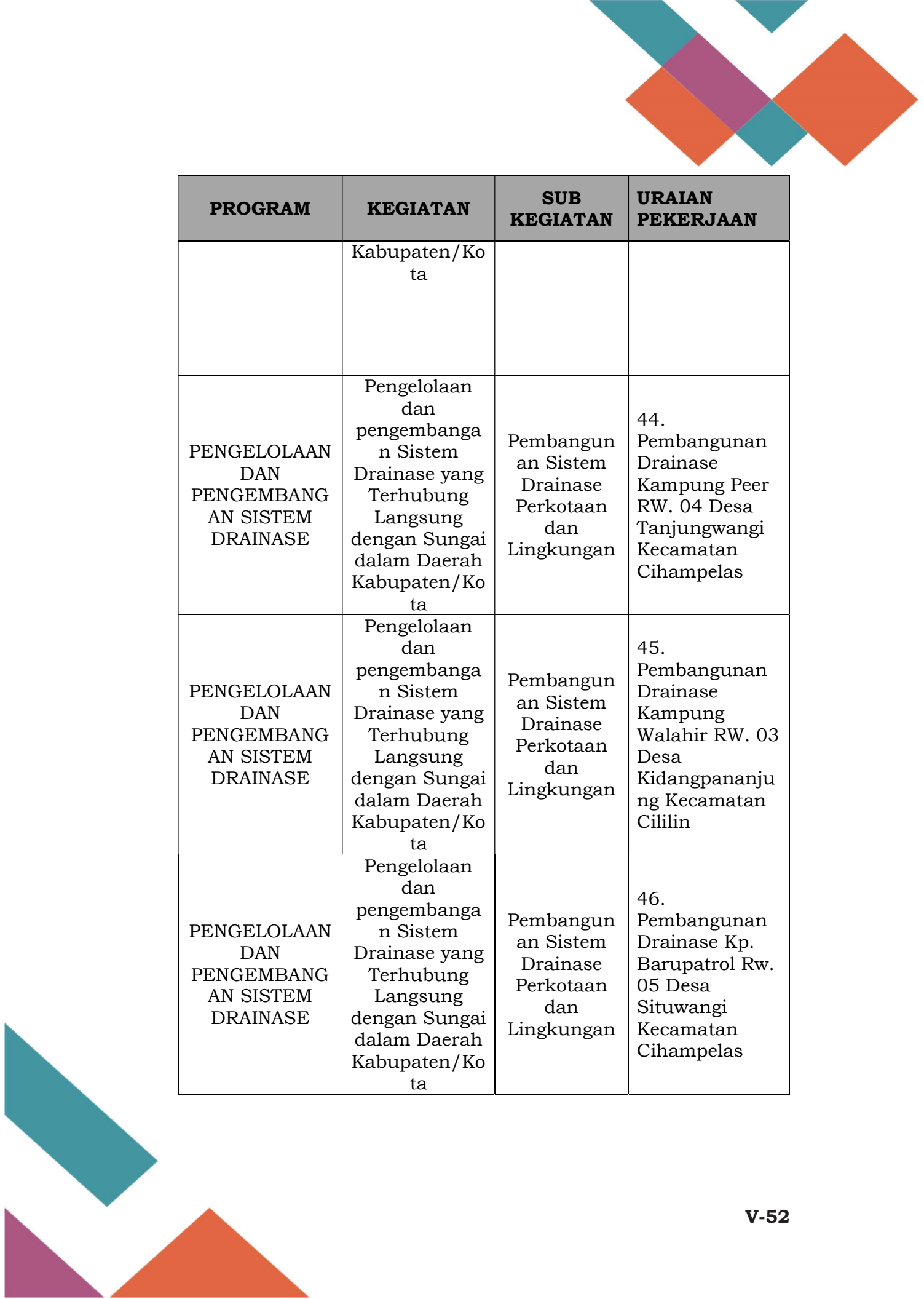
PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	URAIAN PEKERJAAN
PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan dan Lingkungan	33. Pembangunan Drainase Desa Pasirpogor Kecamatan Sindangkerta
PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan dan Lingkungan	34. Pembangunan Drainase Desa Rancapanggung Kecamatan Cililin
PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan dan Lingkungan	35. Pembangunan Drainase Desa Sariwangi Kecamatan Parongpong
PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan dan Lingkungan	36. Pembangunan Drainase Desa Singajaya Kecamatan Cihampelas



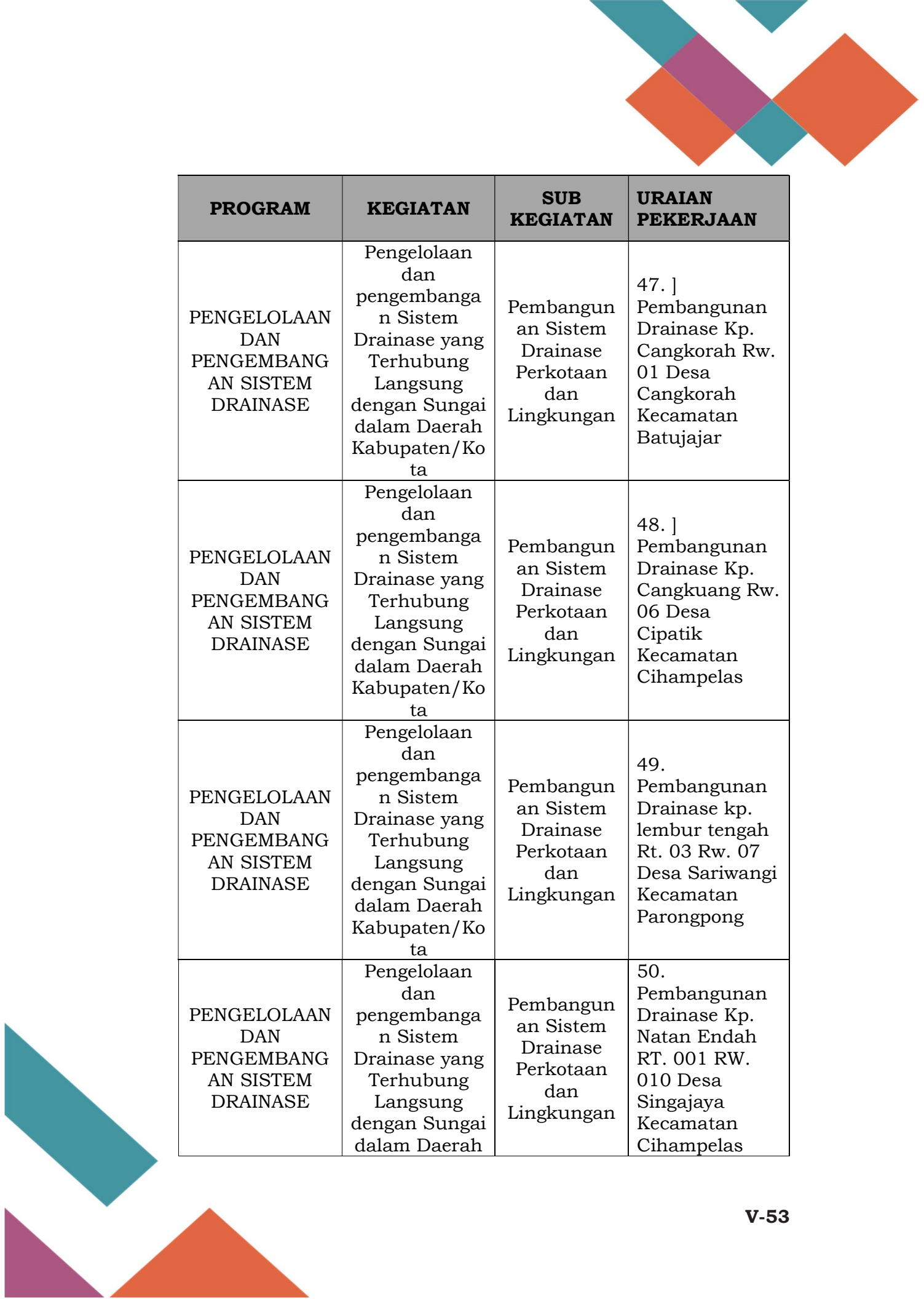
PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	URAIAN PEKERJAAN
	Kabupaten/Kota		
PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan dan Lingkungan	37. Pembangunan Drainase Desa Sirnaraja Kecamatan Cipeundeuy
PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan dan Lingkungan	38. Pembangunan Drainase Desa Sukamulya Kecamatan Cipongkor
PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan dan Lingkungan	39. Pembangunan Drainase Desa Tanimulya Kecamatan Ngamprah



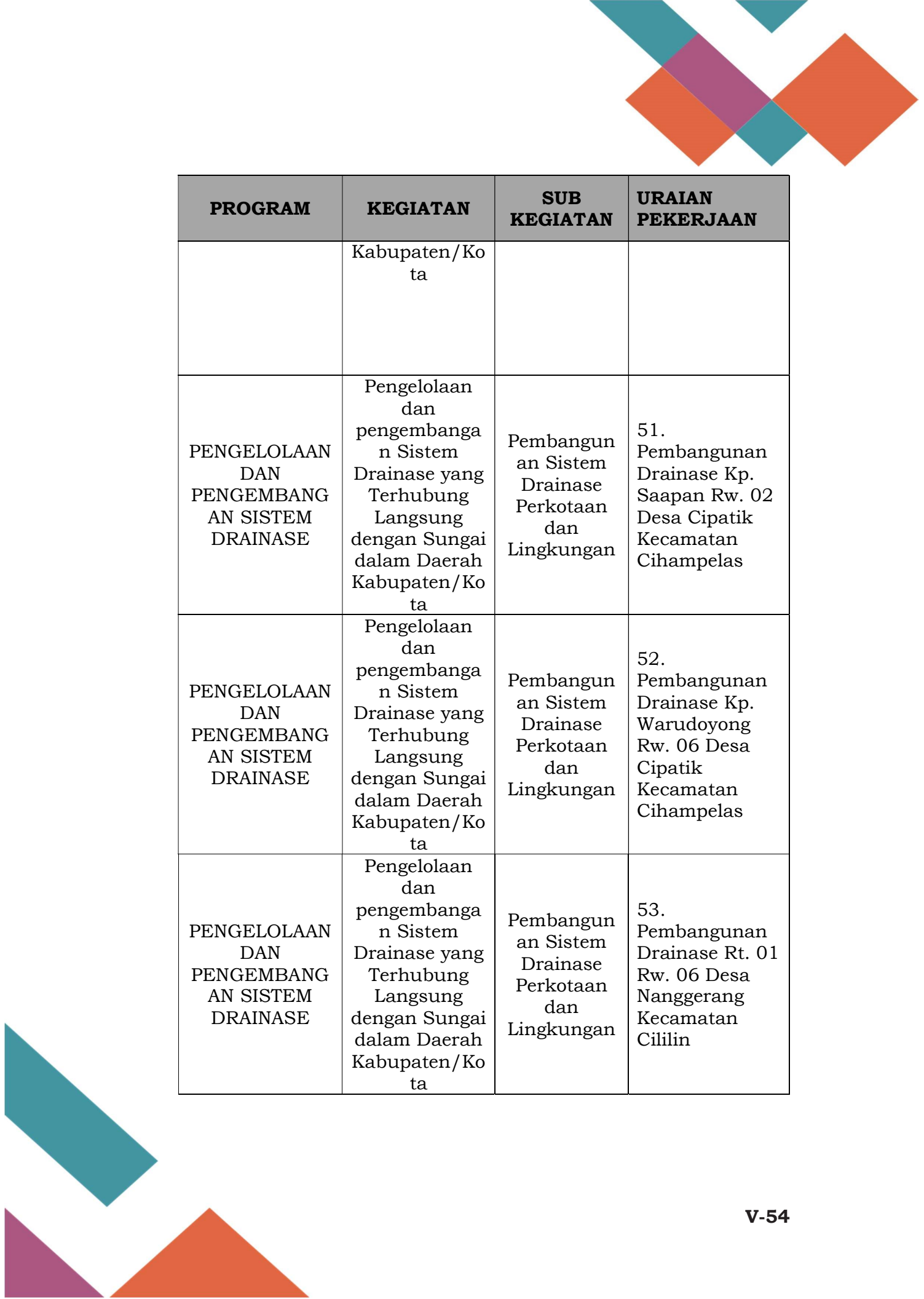
PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	URAIAN PEKERJAAN
PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan dan Lingkungan	40. Pembangunan Drainase Jalan kabupaten Kp. Palayangan Rt. 06 Rw. 05 Desa Cihampelas Kecamatan Cihampelas
PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan dan Lingkungan	41. Pembangunan Drainase Jl. Galanggang Rw. 09 dan 11 Desa Galanggang Kecamatan Batujajar
PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan dan Lingkungan	42. Pembangunan Drainase Kampung Babakan RW. 06 Desa Cililin Kecamatan Cililin
PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan dan Lingkungan	43. Pembangunan Drainase Kampung Cibolang Desa Kertawangi Kecamatan Cisarua



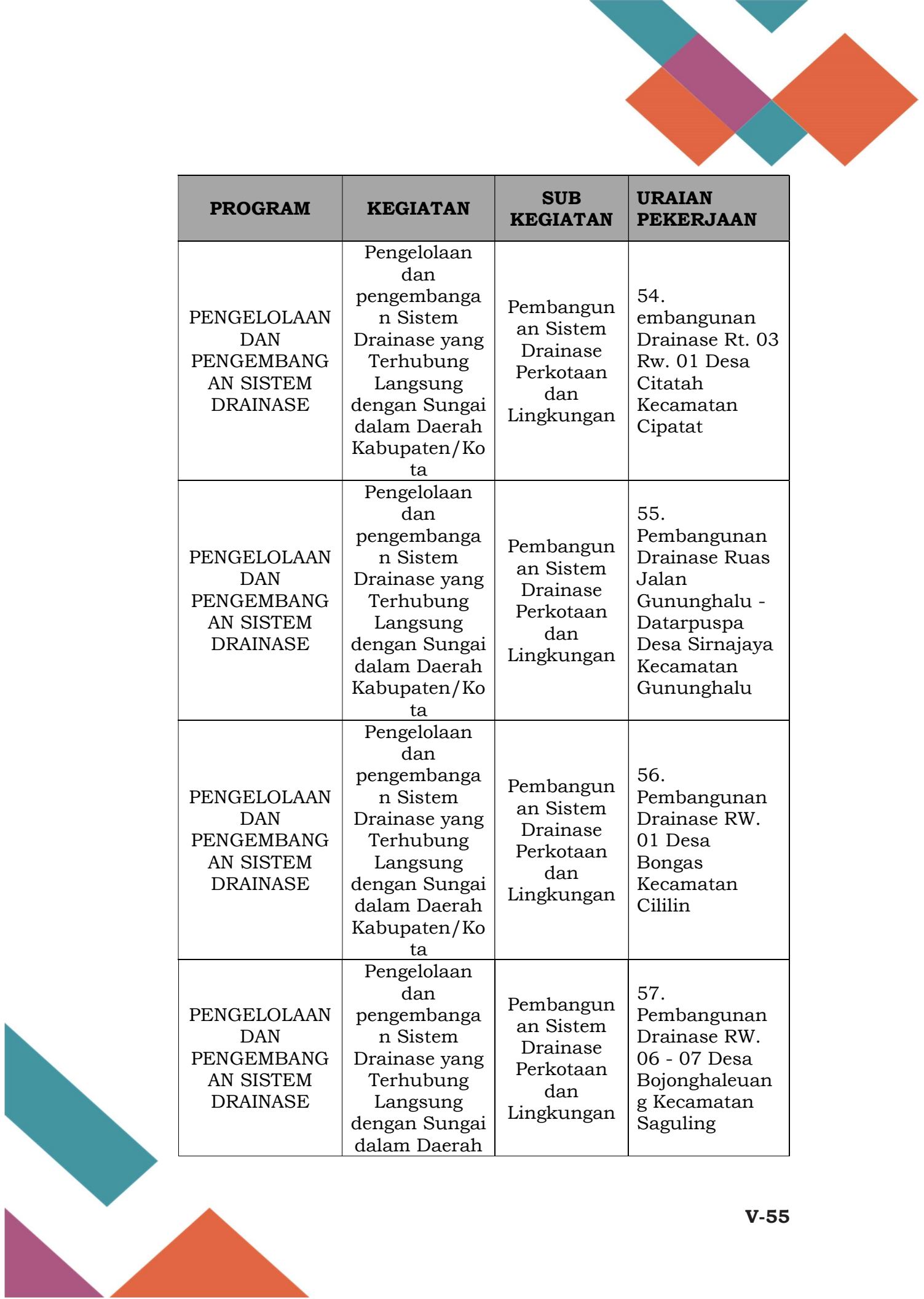
PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	URAIAN PEKERJAAN
	Kabupaten/Kota		
PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan dan Lingkungan	44. Pembangunan Drainase Kampung Peer RW. 04 Desa Tanjungwangi Kecamatan Cihampelas
PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan dan Lingkungan	45. Pembangunan Drainase Kampung Walahir RW. 03 Desa Kidangpananjung Kecamatan Cililin
PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan dan Lingkungan	46. Pembangunan Drainase Kp. Barupatrol Rw. 05 Desa Situwangi Kecamatan Cihampelas



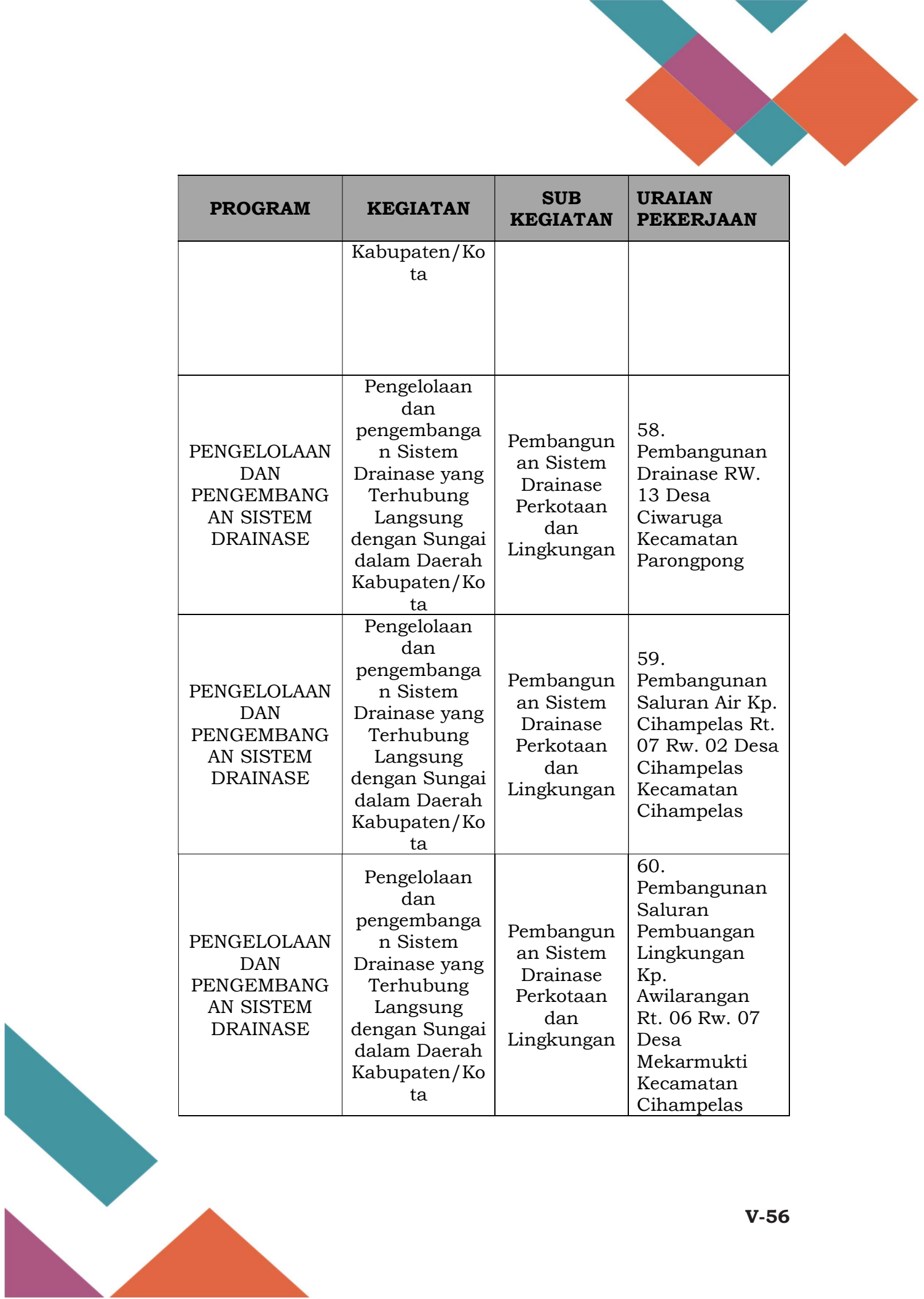
PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	URAIAN PEKERJAAN
PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan dan Lingkungan	47.] Pembangunan Drainase Kp. Cangkorah Rw. 01 Desa Cangkorah Kecamatan Batujajar
PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan dan Lingkungan	48.] Pembangunan Drainase Kp. Cangkuang Rw. 06 Desa Cipatik Kecamatan Cihampelas
PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan dan Lingkungan	49. Pembangunan Drainase kp. lembur tengah Rt. 03 Rw. 07 Desa Sariwangi Kecamatan Parongpong
PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan dan Lingkungan	50. Pembangunan Drainase Kp. Natan Endah RT. 001 RW. 010 Desa Singajaya Kecamatan Cihampelas



PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	URAIAN PEKERJAAN
	Kabupaten/Kota		
PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan dan Lingkungan	51. Pembangunan Drainase Kp. Saapan Rw. 02 Desa Cipatik Kecamatan Cihampelas
PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan dan Lingkungan	52. Pembangunan Drainase Kp. Warudoyong Rw. 06 Desa Cipatik Kecamatan Cihampelas
PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan dan Lingkungan	53. Pembangunan Drainase Rt. 01 Rw. 06 Desa Nanggerang Kecamatan Cililin



PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	URAIAN PEKERJAAN
PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan dan Lingkungan	54. Pembangunan Drainase Rt. 03 Rw. 01 Desa Citatah Kecamatan Cipatat
PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan dan Lingkungan	55. Pembangunan Drainase Ruas Jalan Gununghalu - Datarpuspa Desa Sirnajaya Kecamatan Gununghalu
PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan dan Lingkungan	56. Pembangunan Drainase RW. 01 Desa Bongas Kecamatan Cililin
PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan dan Lingkungan	57. Pembangunan Drainase RW. 06 - 07 Desa Bojonghaleuan Kecamatan Saguling



PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	URAIAN PEKERJAAN
	Kabupaten/Kota		
PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan dan Lingkungan	58. Pembangunan Drainase RW. 13 Desa Ciwaruga Kecamatan Parongpong
PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan dan Lingkungan	59. Pembangunan Saluran Air Kp. Cihampelas Rt. 07 Rw. 02 Desa Cihampelas Kecamatan Cihampelas
PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan dan Lingkungan	60. Pembangunan Saluran Pembuangan Lingkungan Kp. Awilarangan Rt. 06 Rw. 07 Desa Mekarmukti Kecamatan Cihampelas



PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	URAIAN PEKERJAAN
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan dan Lingkungan	1. Rehabilitasi Drainase Desa
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan dan Lingkungan	2. Rehabilitasi Drainase Desa Baranangsiang Kecamatan Cipongkor
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan dan Lingkungan	3. Rehabilitasi Drainase Desa Cibenda Kecamatan Cipongkor
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan dan Lingkungan	4. Rehabilitasi Drainase Desa Cikadu Kecamatan Sindangkerta





PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	URAIAN PEKERJAAN
	Kabupaten/Kota		
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan dan Lingkungan	5. Rehabilitasi Drainase Desa Cilame Kecamatan Ngamprah
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan dan Lingkungan	6. Rehabilitasi Drainase Desa Karangtanjung Kecamatan Cililin
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan dan Lingkungan	7. Rehabilitasi Drainase Desa Karyamukti Kecamatan Cililin





PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	URAIAN PEKERJAAN
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan dan Lingkungan	8. Rehabilitasi Drainase Desa Mekarwangi Kecamatan Lembang
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan dan Lingkungan	9/. Rehabilitasi Drainase Desa Nangerang Kecamatan Cililin
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan dan Lingkungan	10. Rehabilitasi Drainase Desa Pakuhaji Kecamatan Ngamprah
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan dan Lingkungan	11. Rehabilitasi Drainase Desa Sukamanah Kecamatan Rongga



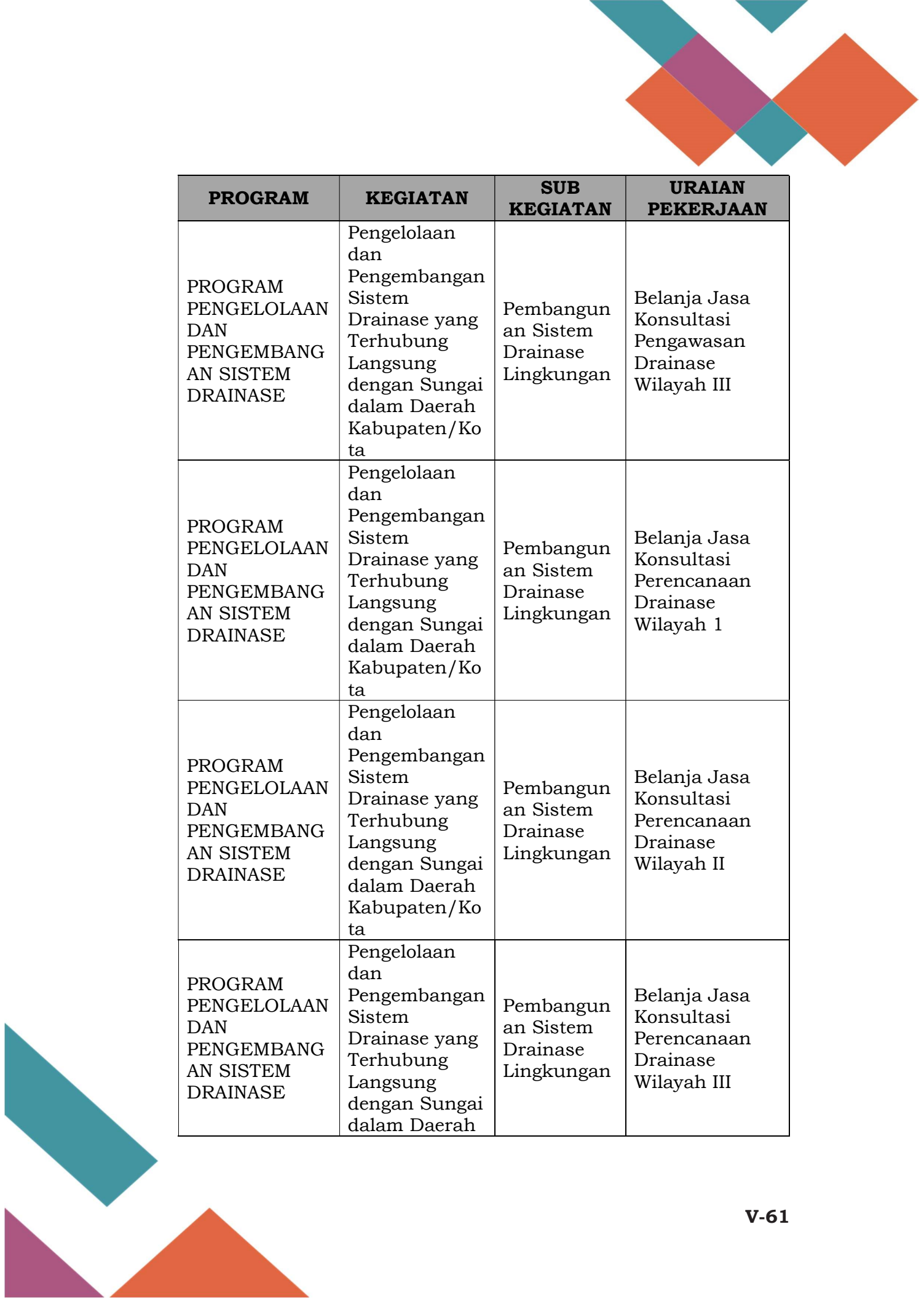


PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	URAIAN PEKERJAAN
	Kabupaten/Kota		

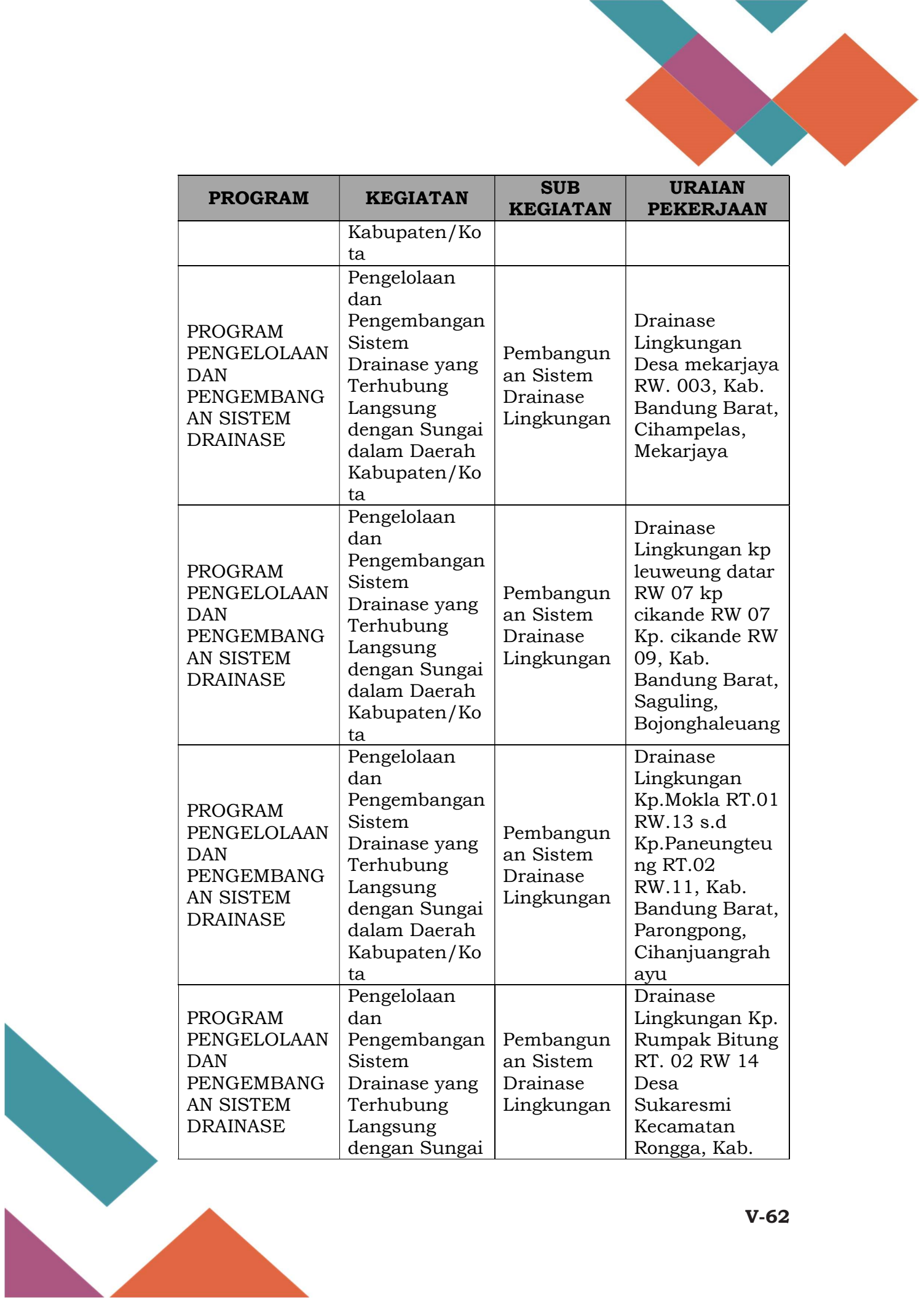
Tahun 2022

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	URAIAN PEKERJAAN
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Drainase Wilayah III
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan Drainase Tahap II
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan Drainase Wilayah I

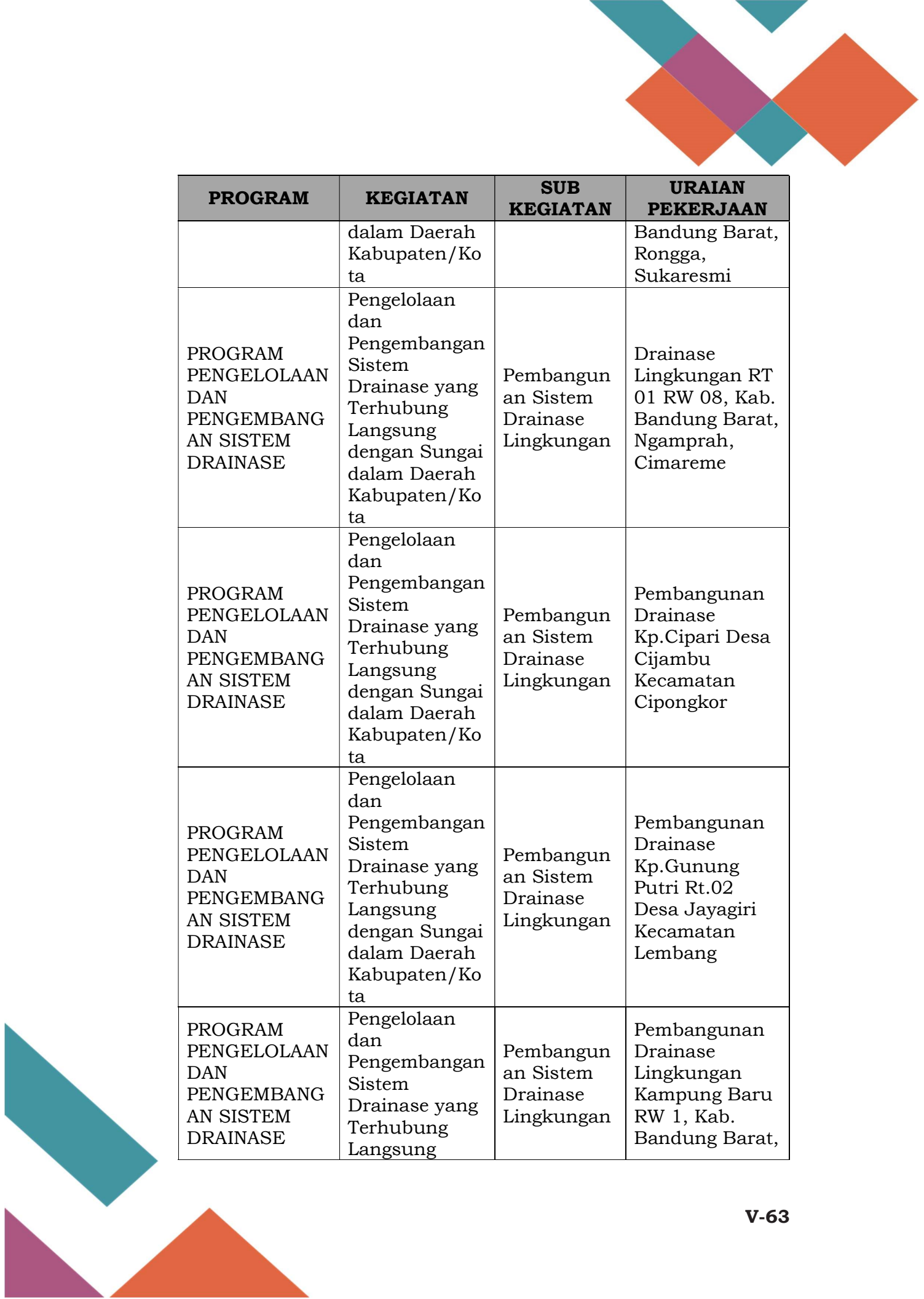




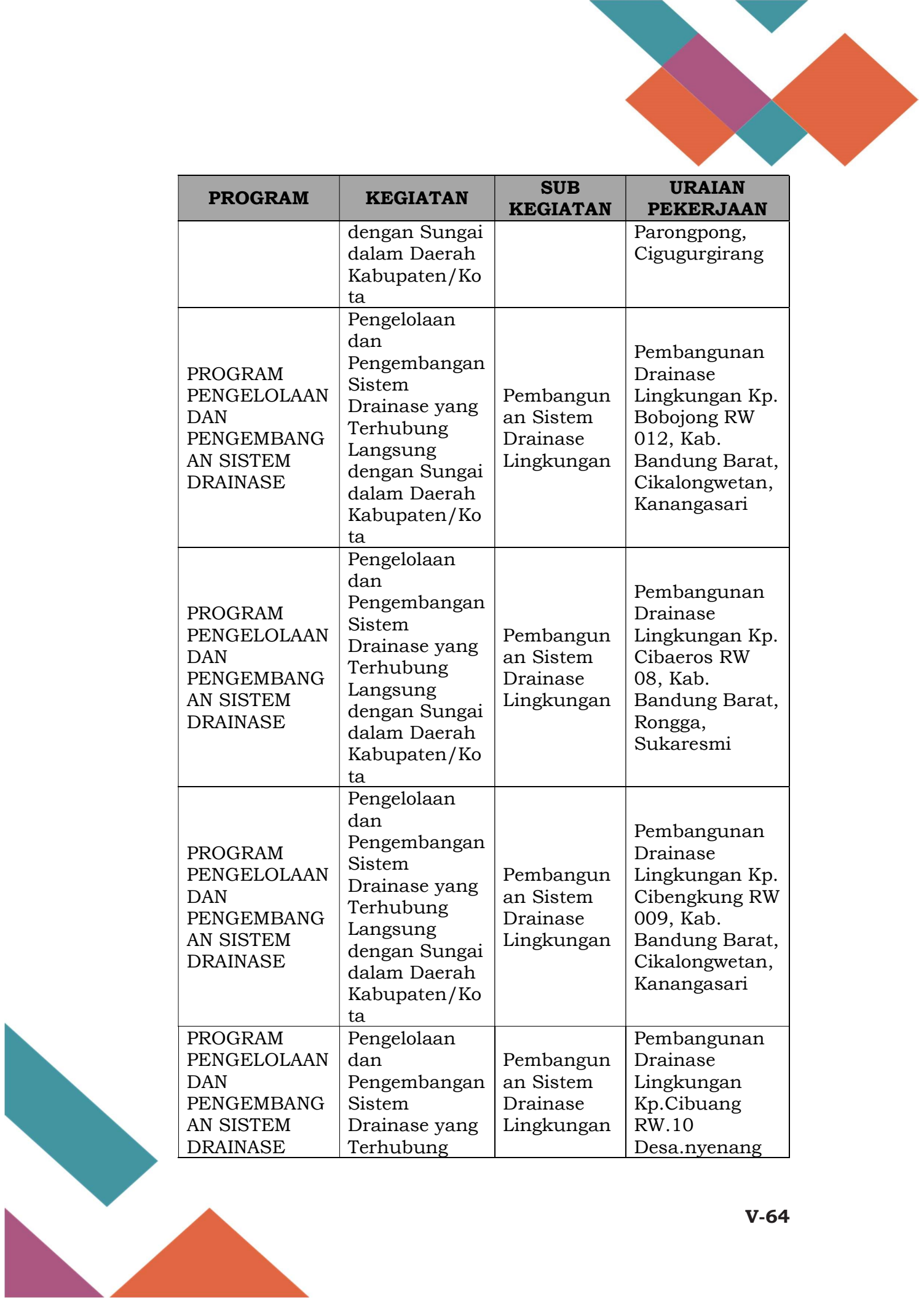
PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	URAIAN PEKERJAAN
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan Drainase Wilayah III
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Drainase Wilayah 1
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Drainase Wilayah II
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Drainase Wilayah III



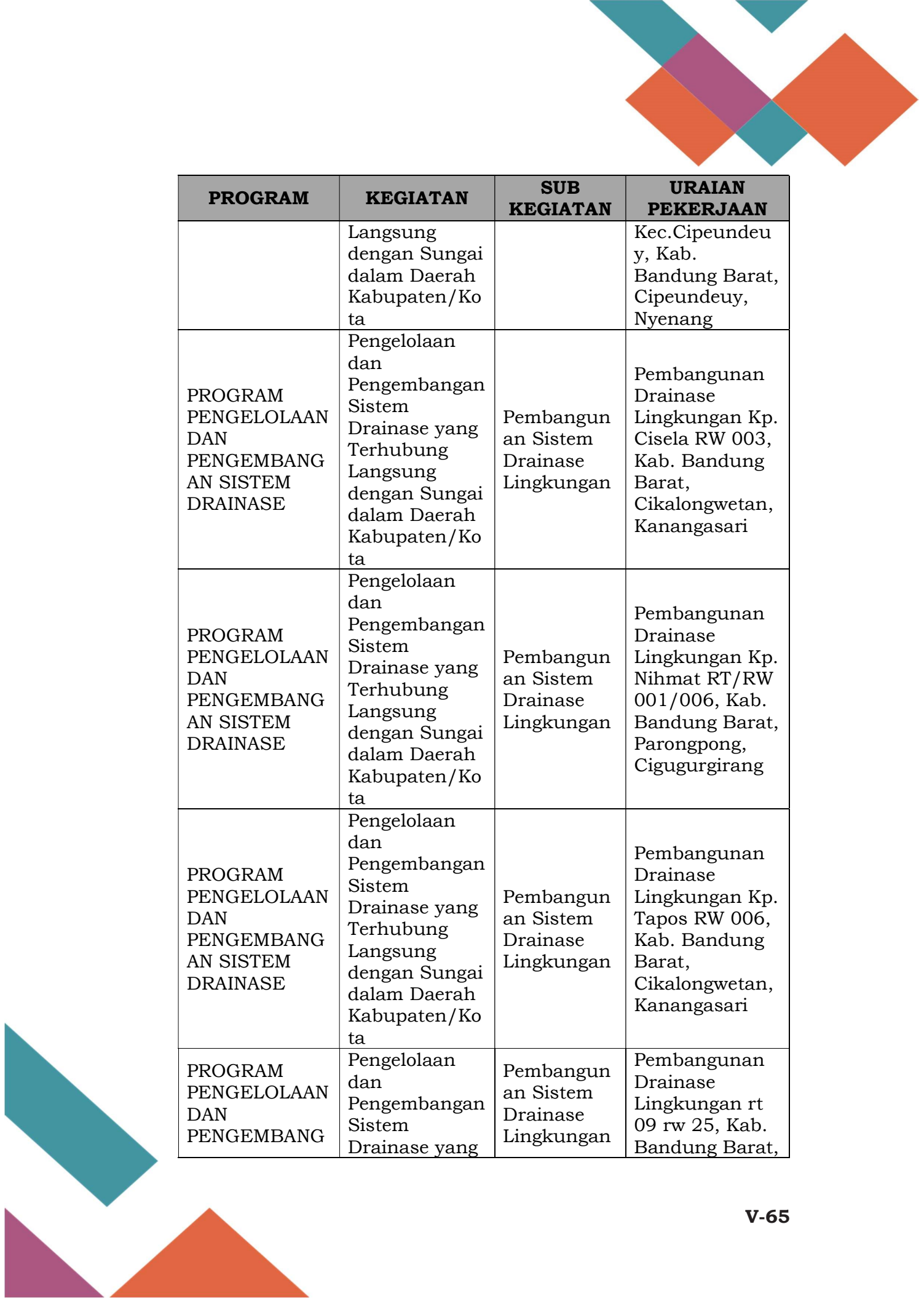
PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	URAIAN PEKERJAAN
	Kabupaten/Kota		
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Drainase Lingkungan Desa mekarjaya RW. 003, Kab. Bandung Barat, Cihampelas, Mekarjaya
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Drainase Lingkungan kp leuweung datar RW 07 kp cikande RW 07 Kp. cikande RW 09, Kab. Bandung Barat, Saguling, Bojonghaleuang
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Drainase Lingkungan Kp.Mokla RT.01 RW.13 s.d Kp.Paneungteung RT.02 RW.11, Kab. Bandung Barat, Parongpong, Cihanjuangrahayu
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Drainase Lingkungan Kp. Rumpak Bitung RT. 02 RW 14 Desa Sukaresmi Kecamatan Rongga, Kab.



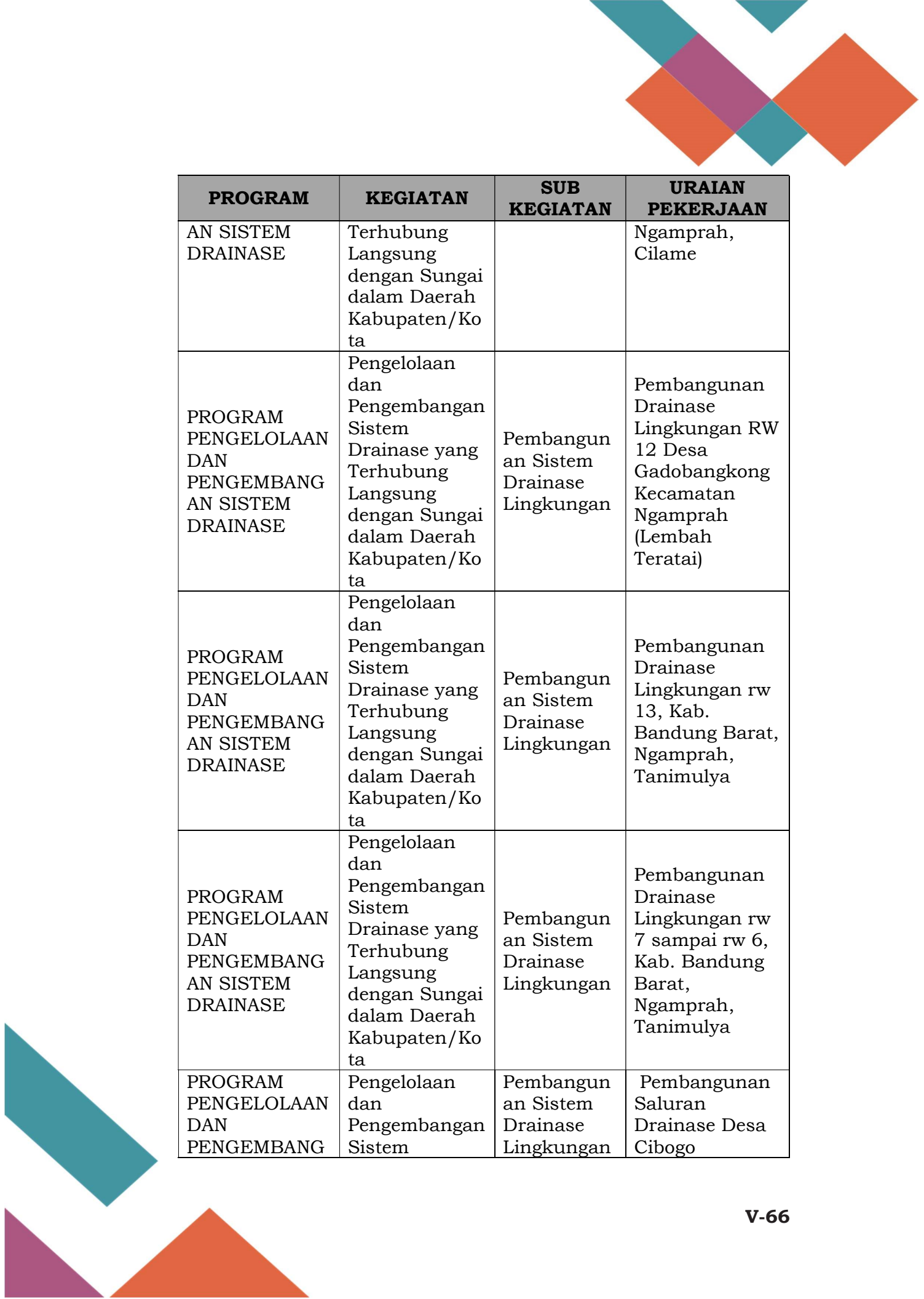
PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	URAIAN PEKERJAAN
	dalam Daerah Kabupaten/Kota		Bandung Barat, Rongga, Sukaresmi
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Drainase Lingkungan RT 01 RW 08, Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Cimareme
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Pembangunan Drainase Kp.Cipari Desa Cijambu Kecamatan Cipongkor
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Pembangunan Drainase Kp.Gunung Putri Rt.02 Desa Jayagiri Kecamatan Lembang
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Pembangunan Drainase Lingkungan Kampung Baru RW 1, Kab. Bandung Barat,



PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	URAIAN PEKERJAAN
	dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota		Parongpong, Cigugurgirang
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Pembangunan Drainase Lingkungan Kp. Bobojong RW 012, Kab. Bandung Barat, Cikalongwetan, Kanangasari
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Pembangunan Drainase Lingkungan Kp. Cibaeros RW 08, Kab. Bandung Barat, Rongga, Sukaresmi
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Pembangunan Drainase Lingkungan Kp. Cibengkung RW 009, Kab. Bandung Barat, Cikalongwetan, Kanangasari
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Pembangunan Drainase Lingkungan Kp. Cibuang RW.10 Desa.nyenang



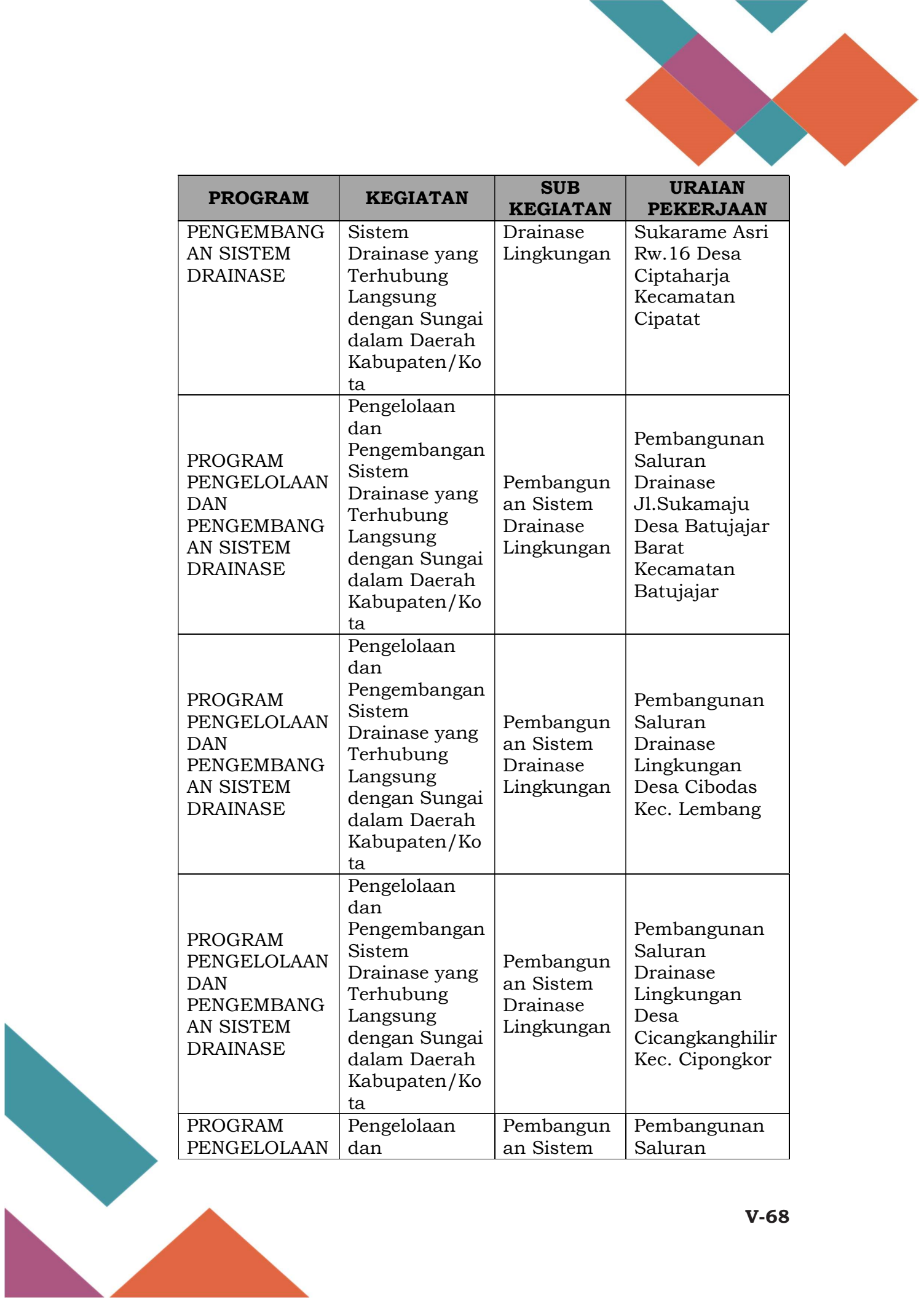
PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	URAIAN PEKERJAAN
	Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota		Kec.Cipeundeuy, Kab. Bandung Barat, Cipeundeuy, Nyenang
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Pembangunan Drainase Lingkungan Kp. Cisela RW 003, Kab. Bandung Barat, Cikalongwetan, Kanangasari
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Pembangunan Drainase Lingkungan Kp. Nihmat RT/RW 001/006, Kab. Bandung Barat, Parongpong, Cigugurgirang
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Pembangunan Drainase Lingkungan Kp. Tapos RW 006, Kab. Bandung Barat, Cikalongwetan, Kanangasari
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Pembangunan Drainase Lingkungan rt 09 rw 25, Kab. Bandung Barat,



PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	URAIAN PEKERJAAN
AN SISTEM DRAINASE	Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota		Ngamprah, Cilame
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Pembangunan Drainase Lingkungan RW 12 Desa Gadobangkong Kecamatan Ngamprah (Lembah Teratai)
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Pembangunan Drainase Lingkungan rw 13, Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Tanimulya
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Pembangunan Drainase Lingkungan rw 7 sampai rw 6, Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Tanimulya
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Pembangunan Saluran Drainase Desa Cibogo



PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	URAIAN PEKERJAAN
AN SISTEM DRAINASE	Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota		Kecamatan Lembang
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Pembangunan Saluran Drainase Desa Jayagiri Kecamatan Lembang
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Pembangunan Saluran Drainase Desa Kanangasari Kecamatan Cikalongwetan
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Pembangunan Saluran Drainase Desa Tugumukti Kecamatan Cisarua
PROGRAM PENGELOLAAN DAN	Pengelolaan dan Pengembangan	Pembangunan Sistem	Pembangunan Saluran Drainase Griya



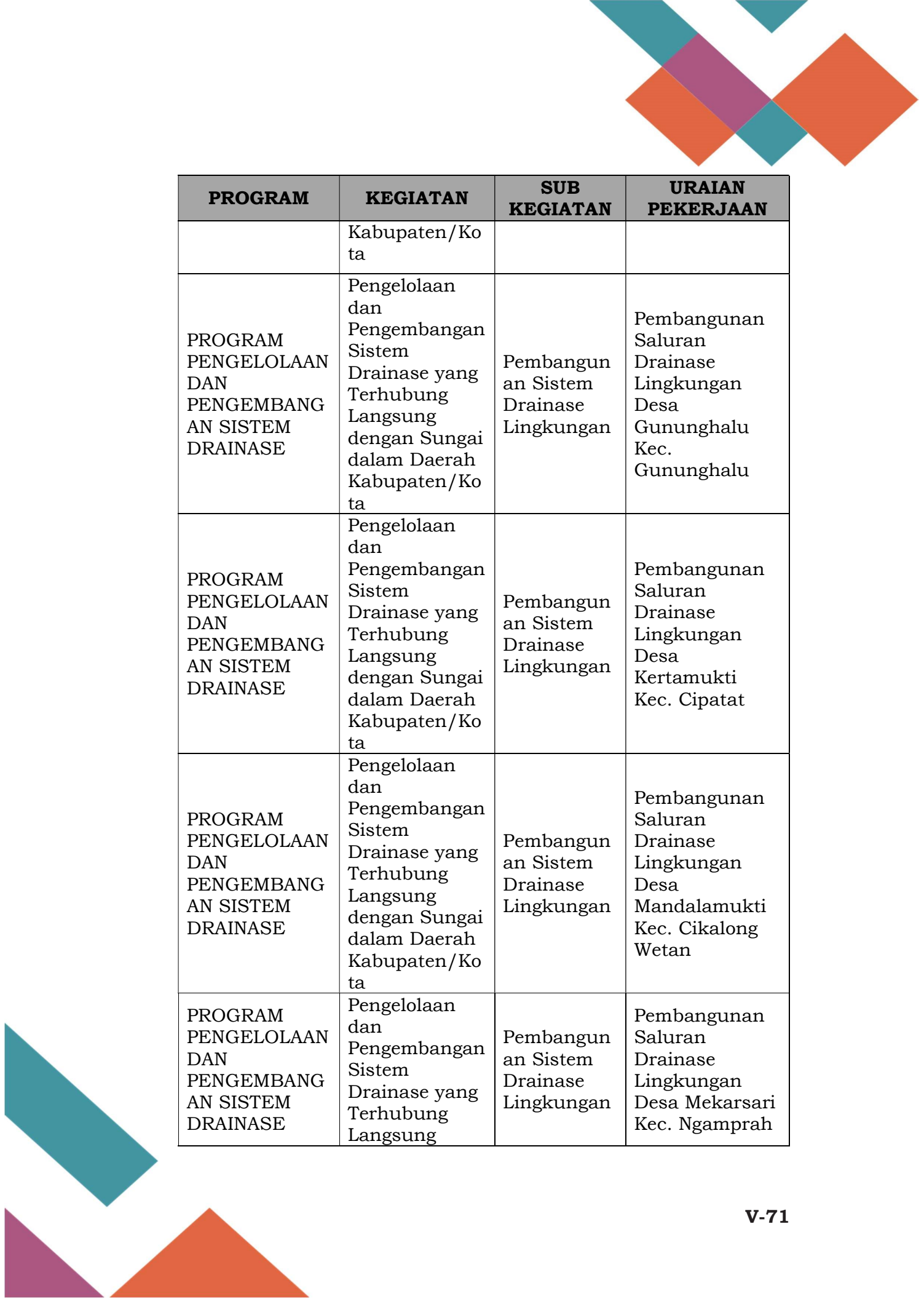
PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	URAIAN PEKERJAAN
PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Drainase Lingkungan	Sukarame Asri Rw.16 Desa Ciptaharja Kecamatan Cipatat
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Pembangunan Saluran Drainase Jl.Sukamaju Desa Batujajar Barat Kecamatan Batujajar
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Pembangunan Saluran Drainase Lingkungan Desa Cibodas Kec. Lembang
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Pembangunan Saluran Drainase Lingkungan Desa Cicangkanghilir Kec. Cipongkor
PROGRAM PENGELOLAAN	Pengelolaan dan	Pembangunan Sistem	Pembangunan Saluran



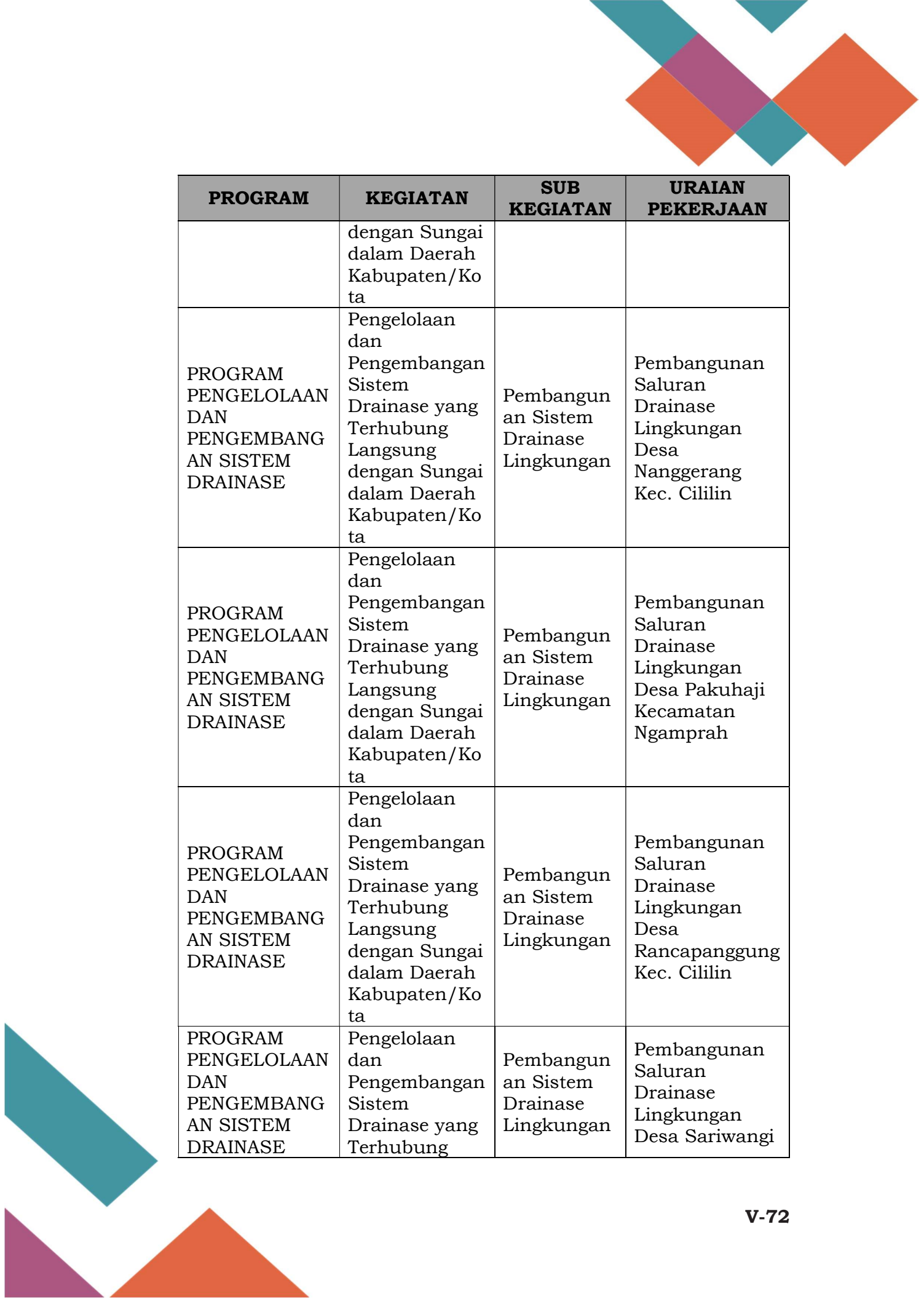
PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	URAIAN PEKERJAAN
DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Drainase Lingkungan	Drainase Lingkungan Desa Cigugurgirang Kec. Parongpong
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Pembangunan Saluran Drainase Lingkungan Desa Cikahurpan Kec. Lembang
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Pembangunan Saluran Drainase Lingkungan Desa Cikole Kec. Lembang
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Pembangunan Saluran Drainase Lingkungan Desa Cintaasih Kec. Cipongkor



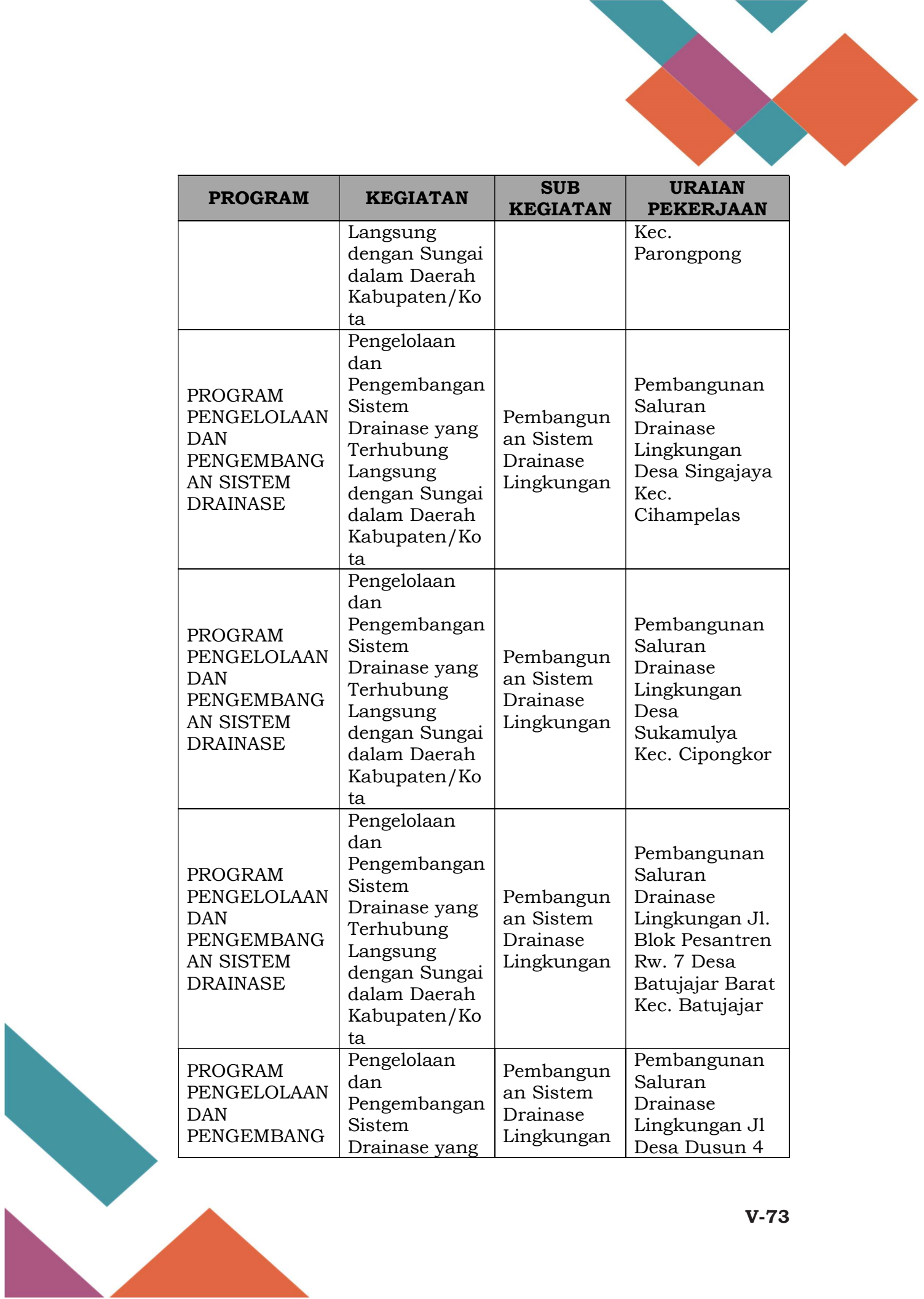
PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	URAIAN PEKERJAAN
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Pembangunan Saluran Drainase Lingkungan Desa Cipada Kec. Cikalong Wetan
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Pembangunan Saluran Drainase Lingkungan Desa Cipada Kec. Cisarua
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Pembangunan Saluran Drainase Lingkungan Desa Cirawamekar Kec. Cipatat
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Pembangunan Saluran Drainase Lingkungan Desa Ciroyom Kec. Cipeundeuy



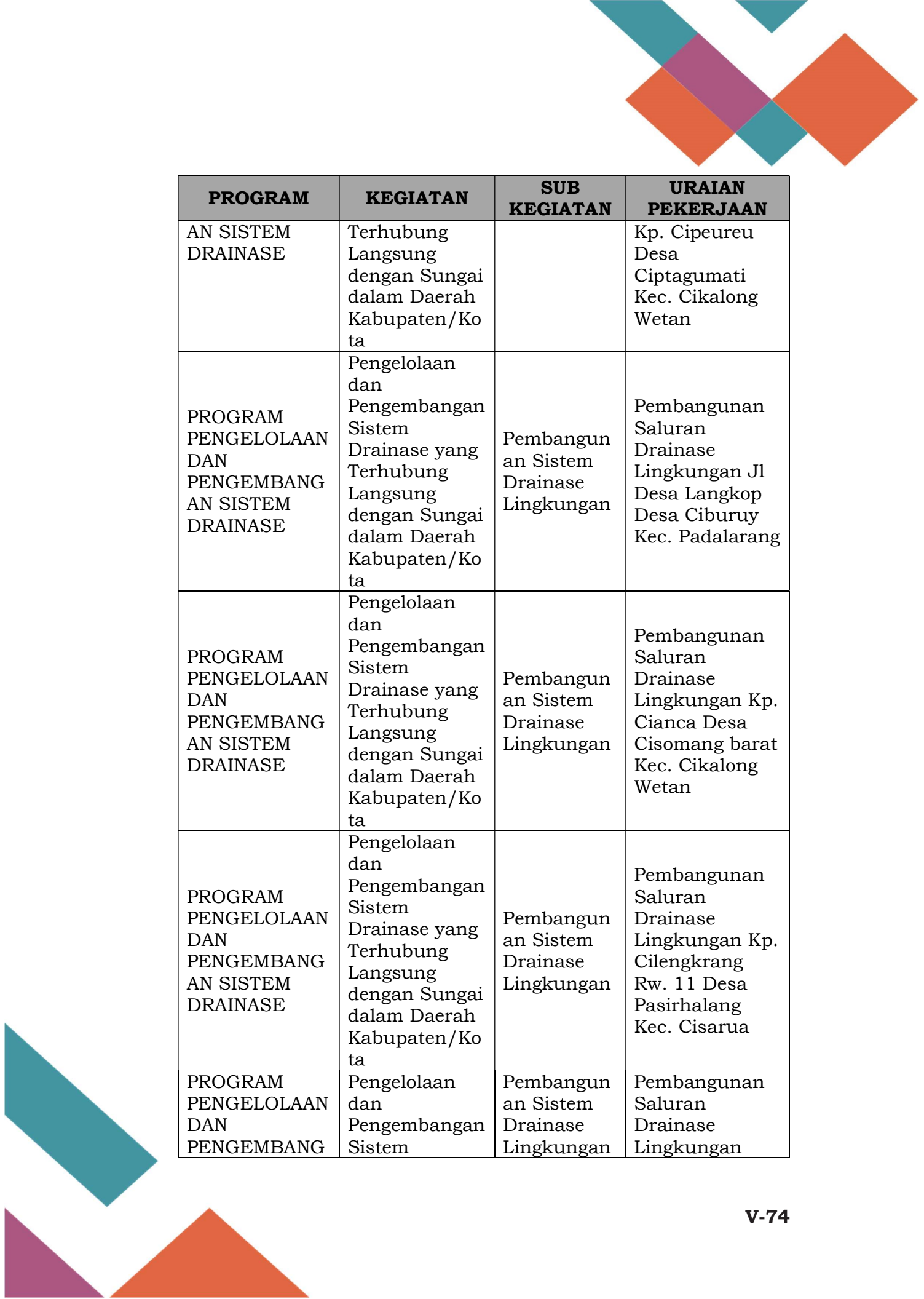
PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	URAIAN PEKERJAAN
	Kabupaten/Kota		
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Pembangunan Saluran Drainase Lingkungan Desa Gununghalu Kec. Gununghalu
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Pembangunan Saluran Drainase Lingkungan Desa Kertamukti Kec. Cipatat
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Pembangunan Saluran Drainase Lingkungan Desa Mandalamukti Kec. Cikalong Wetan
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Pembangunan Saluran Drainase Lingkungan Desa Mekarsari Kec. Ngamprah



PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	URAIAN PEKERJAAN
	dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota		
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Pembangunan Saluran Drainase Lingkungan Desa Nanggerang Kec. Cililin
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Pembangunan Saluran Drainase Lingkungan Desa Pakuhaji Kecamatan Ngamprah
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Pembangunan Saluran Drainase Lingkungan Desa Rancapanggung Kec. Cililin
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Pembangunan Saluran Drainase Lingkungan Desa Sariwangi



PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	URAIAN PEKERJAAN
	Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota		Kec. Parongpong
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Pembangunan Saluran Drainase Lingkungan Desa Singajaya Kec. Cihampelas
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Pembangunan Saluran Drainase Lingkungan Desa Sukamulya Kec. Cipongkor
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Pembangunan Saluran Drainase Lingkungan Jl. Blok Pesantren Rw. 7 Desa Batujajar Barat Kec. Batujajar
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Pembangunan Saluran Drainase Lingkungan Jl Desa Dusun 4



PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	URAIAN PEKERJAAN
AN SISTEM DRAINASE	Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota		Kp. Cipeureu Desa Ciptagumati Kec. Cikalong Wetan
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Pembangunan Saluran Drainase Lingkungan Jl Desa Langkop Desa Ciburuy Kec. Padalarang
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Pembangunan Saluran Drainase Lingkungan Kp. Cianca Desa Cisomang barat Kec. Cikalong Wetan
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Pembangunan Saluran Drainase Lingkungan Kp. Cilengkrang Rw. 11 Desa Pasirhalang Kec. Cisarua
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Pembangunan Saluran Drainase Lingkungan



PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	URAIAN PEKERJAAN
AN SISTEM DRAINASE	Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota		RW. 04 - 05 Desa Kertawangi Kec. Cisarua
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Pembangunan Saluran Drainase Rt.02 Rw.08 Desa Gadobangkong Kecamatan Ngamprah

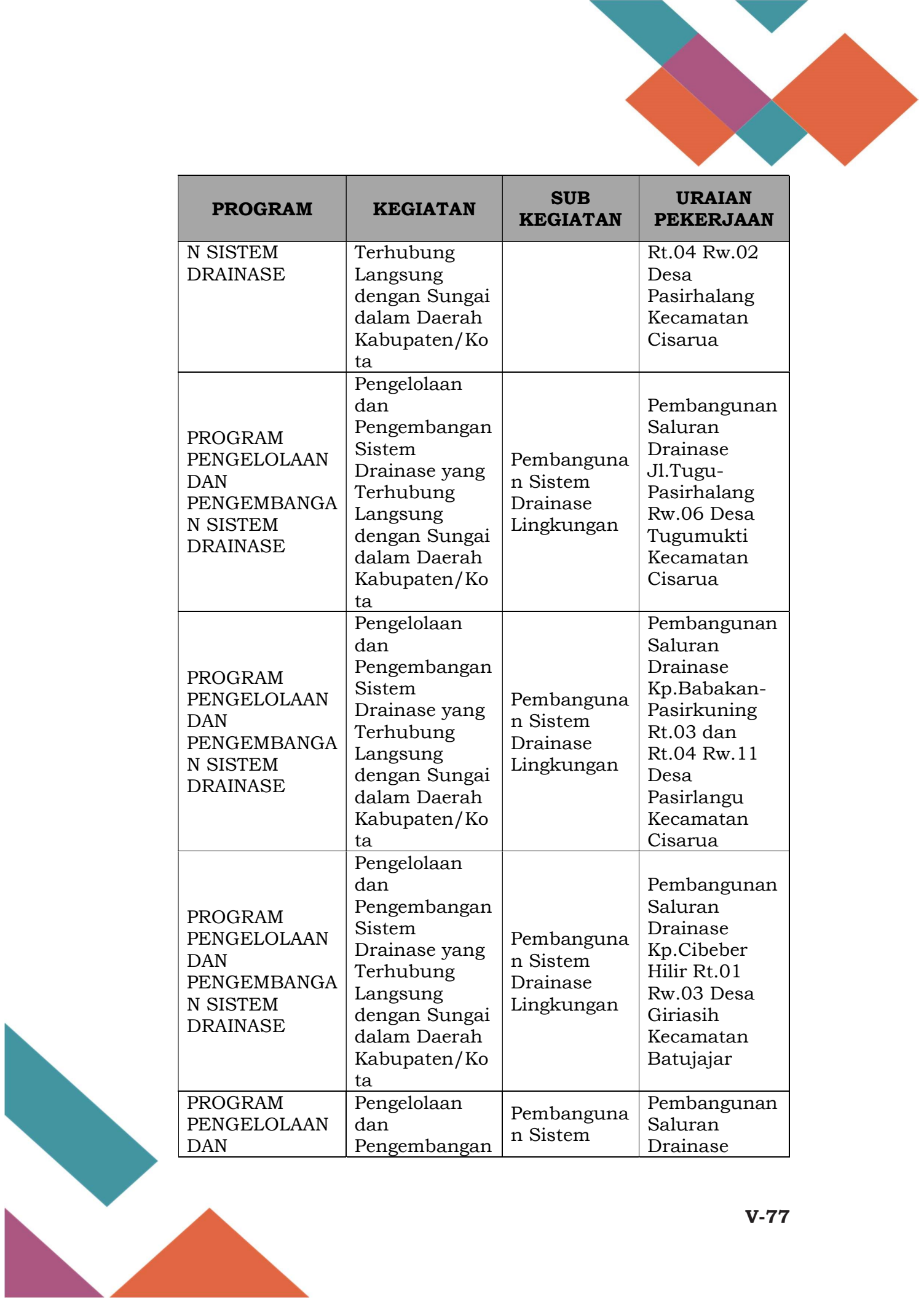
TAHUN 2023

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	URAIAN PEKERJAAN
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Pembangunan Drainase Kp.Cikandang Rw.08 Desa Cilame Kecamatan Ngamprah
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Pembangunan Drainase Kp. Kiara tengah Rt. 04 Rw.12, Kab. Bandung Barat

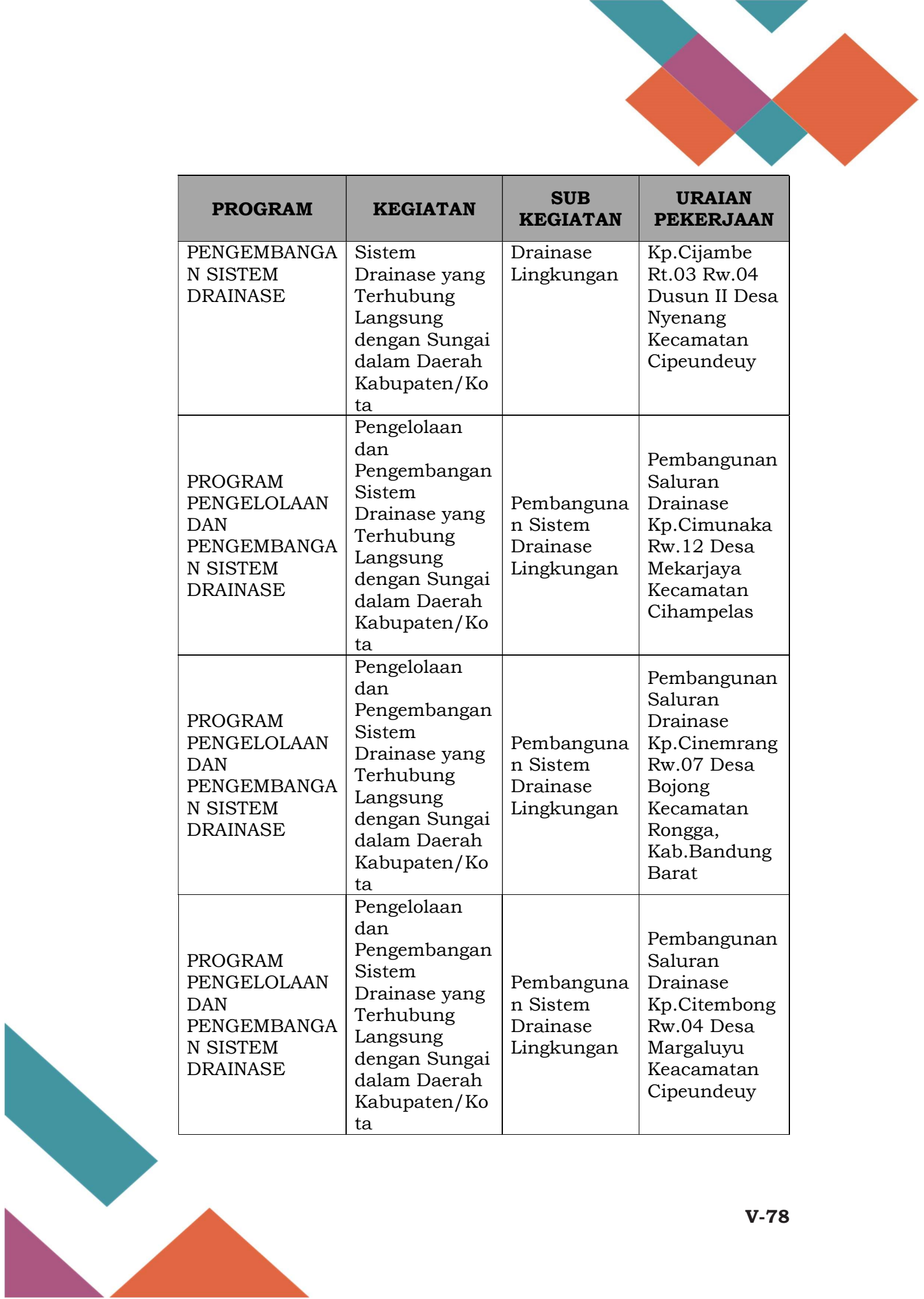




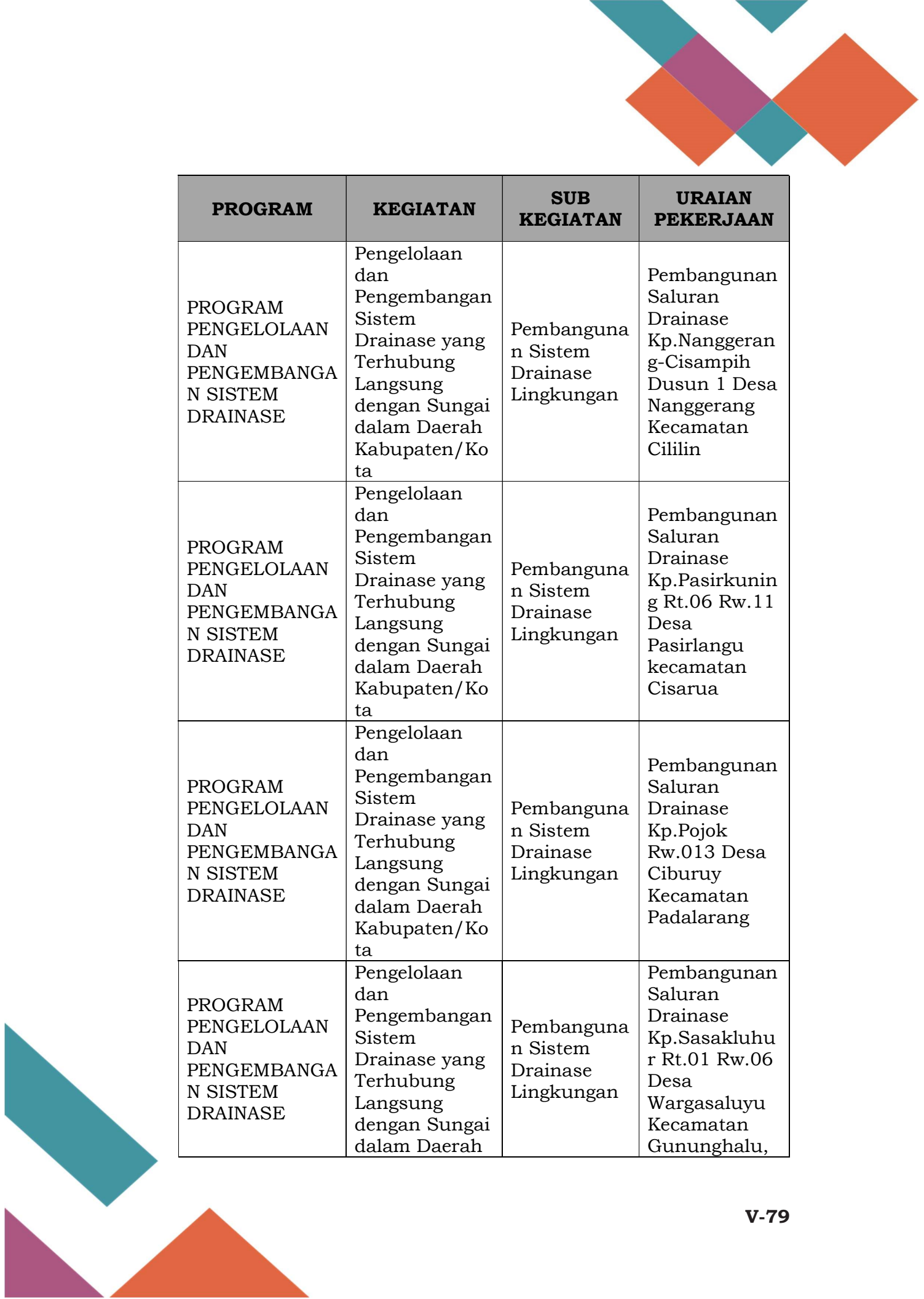
PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	URAIAN PEKERJAAN
	dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota		
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Pembangunan Drainase RW 20 Desa Padalarang Kec. Padalarang
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Pembangunan Saluran Drainase Desa Cipangeran Kecamatan Saguling
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Pembangunan Saluran Drainase Dusun III Cihanjuang Desa Mandalasari Kecamatan Cipatat
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Pembangunan Saluran Drainase Jalan Kp. Sukamaju



PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	URAIAN PEKERJAAN
N SISTEM DRAINASE	Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota		Rt.04 Rw.02 Desa Pasirhalang Kecamatan Cisarua
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Pembangunan Saluran Drainase Jl.Tugu-Pasirhalang Rw.06 Desa Tugumukti Kecamatan Cisarua
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Pembangunan Saluran Drainase Kp.Babakan-Pasirkuning Rt.03 dan Rt.04 Rw.11 Desa Pasirlangu Kecamatan Cisarua
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Pembangunan Saluran Drainase Kp.Cibeber Hilir Rt.01 Rw.03 Desa Giriasih Kecamatan Batujajar
PROGRAM PENGELOLAAN DAN	Pengelolaan dan Pengembangan	Pembangunan Sistem	Pembangunan Saluran Drainase



PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	URAIAN PEKERJAAN
PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Drainase Lingkungan	Kp.Cijambe Rt.03 Rw.04 Dusun II Desa Nyenang Kecamatan Cipeundeuy
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Pembangunan Saluran Drainase Kp.Cimunaka Rw.12 Desa Mekarjaya Kecamatan Cihampelas
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Pembangunan Saluran Drainase Kp.Cinemrang Rw.07 Desa Bojong Kecamatan Rongga, Kab.Bandung Barat
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Pembangunan Saluran Drainase Kp.Citembong Rw.04 Desa Margaluyu Kecamatan Cipeundeuy



PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	URAIAN PEKERJAAN
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Pembangunan Saluran Drainase Kp.Nanggerang-Cisampih Dusun 1 Desa Nanggerang Kecamatan Cililin
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Pembangunan Saluran Drainase Kp.Pasirkuning Rt.06 Rw.11 Desa Pasirlangu kecamatan Cisarua
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Pembangunan Saluran Drainase Kp.Pojok Rw.013 Desa Ciburuy Kecamatan Padalarang
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Pembangunan Saluran Drainase Kp.Sasakluhur Rt.01 Rw.06 Desa Wargasaluyu Kecamatan Gununghalu,



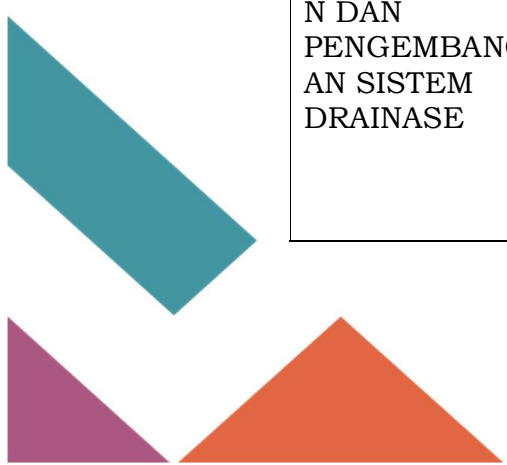
PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	URAIAN PEKERJAAN
	Kabupaten/Kota		Kab.Bandung Barat
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Pembangunan Saluran Drainase Kp.Sindangsari Rt.01 Rw.07 Desa Pasirhalang Kecamatan Cisarua
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	JASA KONSULTASI PERENCANAAN DRAINASE WILAYAH I
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	JASA KONSULTASI PENGAWASAN DRAINASE WILAYAH I
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung	Rehabilitasi Saluran Drainase Lingkungan	Rehabilitasi Drainase Lingkungan di KBB

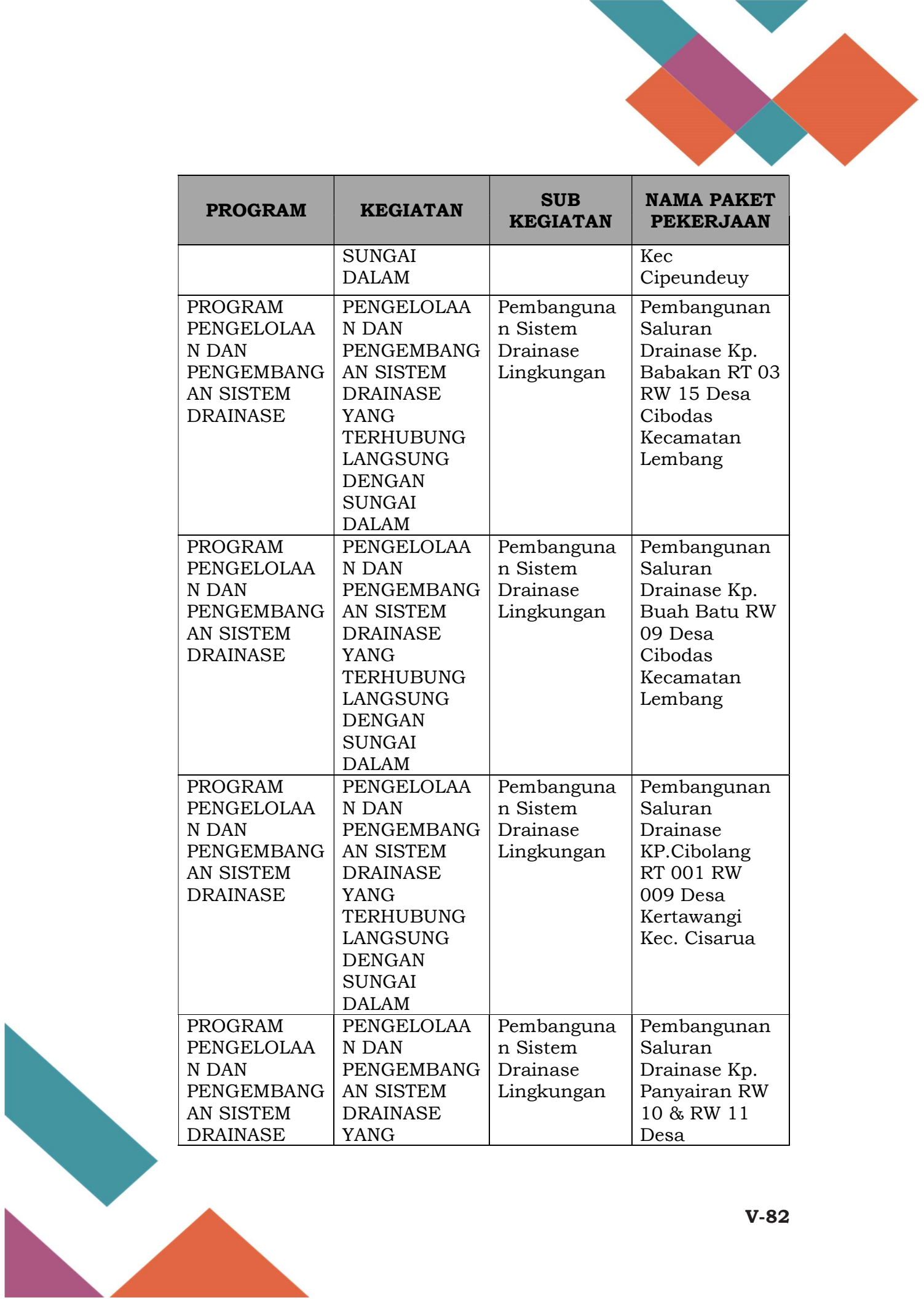


PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	URAIAN PEKERJAAN
	dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota		

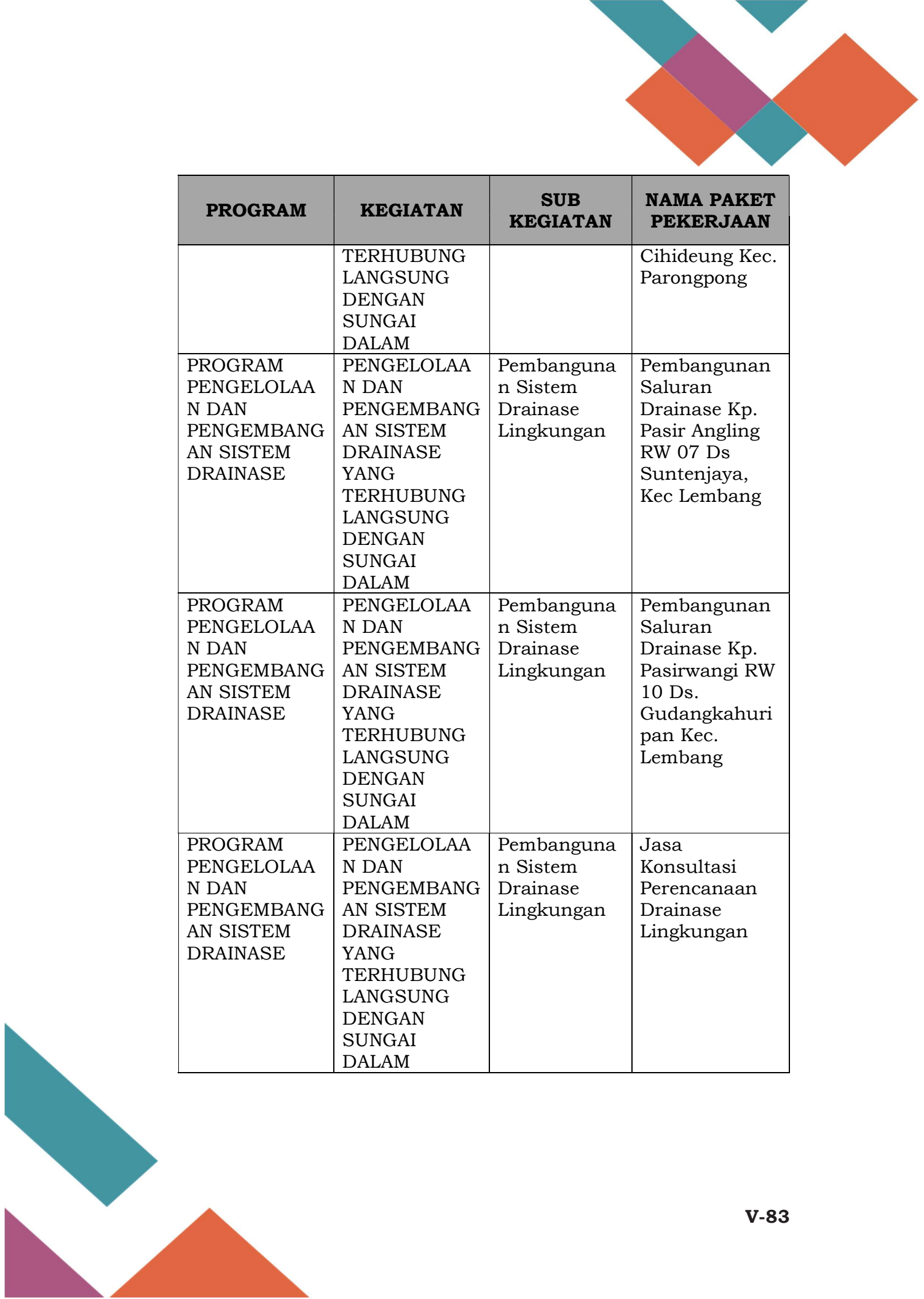
TAHUN 2024

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NAMA PAKET PEKERJAAN
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE YANG TERHUBUNG LANGSUNG DENGAN SUNGAI DALAM	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Drainase kp Nagrog RT 1 RW 10 Desa Rancasenggung Kec Sindangkerta
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE YANG TERHUBUNG LANGSUNG DENGAN SUNGAI DALAM	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Pembangunan Saluran Drainase Desa Cihideung Kec. Parongpong
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE YANG TERHUBUNG LANGSUNG DENGAN	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Pembangunan Saluran Drainase Jalan Lingkungan Citembong-Cibungur Dusun I dan III Desa Margaluyu,





PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NAMA PAKET PEKERJAAN
	SUNGAI DALAM		Kec Cipeundeuy
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE YANG TERHUBUNG LANGSUNG DENGAN SUNGAI DALAM	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Pembangunan Saluran Drainase Kp. Babakan RT 03 RW 15 Desa Cibodas Kecamatan Lembang
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE YANG TERHUBUNG LANGSUNG DENGAN SUNGAI DALAM	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Pembangunan Saluran Drainase Kp. Buah Batu RW 09 Desa Cibodas Kecamatan Lembang
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE YANG TERHUBUNG LANGSUNG DENGAN SUNGAI DALAM	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Pembangunan Saluran Drainase KP.Cibolang RT 001 RW 009 Desa Kertawangi Kec. Cisarua
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE YANG	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Pembangunan Saluran Drainase Kp. Panyairan RW 10 & RW 11 Desa



PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NAMA PAKET PEKERJAAN
	TERHUBUNG LANGSUNG DENGAN SUNGAI DALAM		Cihideung Kec. Parongpong
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE YANG TERHUBUNG LANGSUNG DENGAN SUNGAI DALAM	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Pembangunan Saluran Drainase Kp. Pasir Angling RW 07 Ds Suntenjaya, Kec Lembang
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE YANG TERHUBUNG LANGSUNG DENGAN SUNGAI DALAM	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Pembangunan Saluran Drainase Kp. Pasirwangi RW 10 Ds. Gudangkahuri pan Kec. Lembang
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE YANG TERHUBUNG LANGSUNG DENGAN SUNGAI DALAM	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Jasa Konsultasi Perencanaan Drainase Lingkungan



PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NAMA PAKET PEKERJAAN
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE YANG TERHUBUNG LANGSUNG DENGAN SUNGAI DALAM	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Jasa Konsultasi Pengawasan Drainase Lingkungan



BAB VI

PROGRAM,KEGIATAN DAN INDIKASI PROGRAM

SANITASI

Program merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai wujud pengimplementasian strategi yang ditetapkan. Program diwujudkan oleh satu kegiatan atau lebih yang akan dilaksanakan pada jangka waktu tertentu. Untuk melaksanakan program dan kegiatan diperlukan pendanaan. Adapun rincian dan penjelasan mengenai program, kegiatan dan rekapitulasi total anggaran yang dibutuhkan untuk pembangunan sanitasi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun (2024-2029). Sumber anggaran diantaranya yaitu APBD Kabupaten/Kota, APBD Provinsi, APBN, DAK, swasta/CSR dan masyarakat) maupun jenis kegiatan (air limbah, persampahan dan drainase).

6.1. Program dan Kegiatan

Pemenuhan strategi sektor air limbah, persampahan dan drainase dilakukan dengan melakukan beberapa program dan kegiatan yang dapat dilihat pada **Tabel 6. 1**.



Tabel 6.1 Program Kegiatan dan Sub Kegiatan

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
Air Limbah Domestik			
1	Pengendalian Pencemaran dan atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Penanggulangan Pencemaran dan atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup: 1. Review Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD); 2. Pembangunan IPAL Komunal dan Jaringan Perpipaan pada permukiman padat; 3. Pembangunan IPLT Kabupaten Bandung Barat; 4. Penyusunan program pengendalian pencemaran badan air dan pemulihan kualitas badan air
2	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik: 1. Operasi dan Pemeliharaan IPAL Komunal swakelola atau non swakelola; 2. Operasi dan Pemeliharaan IPLT dan fasilitasnya; 3. Operasi dan pemeliharaan truk tinja
			Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat: 1. Pembentukan UPT Pengolahan Limbah Domestik; 2. Penyusunan Perda/Perbup layanan tinja terjadwal;



No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
			3. Pelaksanaan LLTT 4. Pembangunan tangki septictank individual dan tangki septictank komunal < 10 SR; 5. Pelaksanaan pemicuan sanitasi 6. Optimalisasi IPLT (Pembangunan, operasional dan pemeliharaan)
Persampahan			
1	Pengelolaan Persampahan	Pengelolaan Sampah	Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali: 1. Implementasi Perda Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik; 2. Penyediaan/Reaktivasi Bank Sampah Unit dan Bank Sampah Induk; 3. Optimalisasi TPSR
			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten: 1. Penyiapan masyarakat berupa Keranjang Sampah Individu; 2. Pemeliharaan TPS 3. Operasi dan Pemeliharaan TPS 3R 4. Operasi dan Pemeliharaan SPA 5. Operasi dan Pemeliharaan Alat Angkut/Transportasi Sampah 6. Rehabilitasi/Peningkatan TPA



No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
			7. Operasi dan Pemeliharaan TPA dan Fasilitasnya
2	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kabupaten	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup: 1. Lomba Sanitasi Lingkungan di Tingkat Kecamatan; 2. Lomba Sanitasi Lingkungan di Tingkat Kabupaten;
			Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup: 1. Sosialisasi Pengurangan Sampah skala Rumah Tangga; 2. Sosialisasi Pengumpulan dan pemilahan Sampah di Tingkat RT/RW/Kelurahan/Desa/Kecamatan
Drainase			
1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam daerah Kabupaten	1. Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan; 2. Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase; 3. Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan; 4. Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan; 5. Supervisi Pembangunan / Peningkatan / Rehabilitasi sistem drainase



6.2. Pengembangan Sanitasi

Program dan kegiatan yang dilakukan membutuhkan sejumlah pembiayaan dan waktu agar dapat berjalan. Kebutuhan biaya tersebut diperkirakan berdasarkan unit cost tiap kegiatan, dan direncanakan pada tahun tertentu. Untuk meningkatkan kelayakan sanitasi diperlukan perencanaan kegiatan selama kurun waktu 5 tahun berserta rincian pendanaan yang diperlukan untuk setiap kegiatan setiap tahunnya. Rincian informasi mengenai Kebutuhan biaya dan timeline pelaksanaan masing-masing kegiatan selengkapnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.



Tabel 6.2

Rencana Pengembangan Sanitasi Kabupaten Bandung Barat

No	KEGIATAN / SUB KEGIATAN		Tahun Pelaksanaan					
			2025	2026	2027	2028	2029	Sumber Pendanaan
A.	AIR LIMBAH							
	Penanggulan Pencemaran dan atau Kerusakan Lingkungan Hidup							
		Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup						
		1. Review Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah						APBN / APBD / CSR
		2. Pembangunan IPAL Komunal dan Jaringan Perpipaan						APBN / APBD / CSR
		3. Penyusunan Program Pengendalian Pencemaran Badan Air dan Pemulihan						APBN / APBD / CSR
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam							
		Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah						
		1. Opasi dan Pemeliharaan IPAL Komunal						APBN / APBD / CSR



No	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Tahun Pelaksanaan					Sumber Pendanaan
		2025	2026	2027	2028	2029	
	2. Operasi dan Pemeliharaan IPLT dan Fasilitasnya						APBN / APBD / CSR
	3. Operasi dan Pemeliharaan Truk Tinja						APBN / APBD / CSR
	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat						
	1. Penyusunan Kajian Layanan Lumpur Tinja Terjadwal Kabupaten						APBN / APBD / CSR
	2. Penyusunan Peraturan Daerah/Perbup Layanan Tinja Terjadwal						APBN / APBD / CSR
	3. Pelaksanaan LLTT						APBN / APBD / CSR
	4. Pembangunan Tangki Septik Individual dan atau Tangki Septik komunal <10 SR						APBN / APBD / CSR
	4.1 Pemicuan						APBN / APBD / CSR
	4.2 Pembangunan Tangki Septictank						APBN / APBD / CSR
	5 Revitalisasi IPLT						APBN / APBD / CSR
	5.1 Studi Perencanaan Optimalisasi IPLT						APBN / APBD / CSR
	5.2 Pengadaan truk tinja						APBN / APBD / CSR



No	KEGIATAN / SUB KEGIATAN		Tahun Pelaksanaan					Sumber Pendanaan
			2025	2026	2027	2028	2029	
		5.3 Pengawasan teknis dan Supervisi Optimalisasi IPLT						APBN / APBD / CSR
B	Persampahan							
		Pengolahan Sampah						APBN / APBD / CSR
		Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali						
		1. Implementasi Perda/Perbup Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik						APBN / APBD / CSR
		2 Penyediaan/Reaktivasi Bank Sampah Unit dan Bank Sampah						APBN / APBD / CSR
		3. Studi Optimalisasi TPS 3R						APBN / APBD / CSR
		4. Optimalisasi TPS 3R						APBN / APBD / CSR
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan Di tingkat Kabupaten						
		1. Penyiapan masyarakat berupa Keranjang Sampah Individu						APBN / APBD / CSR
		2. Pemeliharaan TPS						APBN / APBD / CSR
		3. Operasi dan pemeliharaan TPS 3R						APBN / APBD / CSR



No	KEGIATAN / SUB KEGIATAN		Tahun Pelaksanaan					Sumber Pendanaan
			2025	2026	2027	2028	2029	
		4. Operasi & Pemeliharaan SPA						APBN / APBD / CSR
		5. Operasi dan Pemeliharaan Alat Angkut/Transportasi Sampah						APBN / APBD / CSR
		6. Rehabilitasi/Peningkatan TPA						APBN / APBD / CSR
		7. Operasi dan Pemeliharaan TPA dan Fasilitasnya						APBN / APBD / CSR
		Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan						
		Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup						
		1. Lomba Sanitasi Lingkungan di Tingkat Kecamatan						APBN / APBD / CSR
		2. Lomba Sanitasi Lingkungan Tingkat Kabupaten						APBN / APBD / CSR
		Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup						
		1. Sosialisasi Pengurangan Sampah skala Rumah Tangga						APBN / APBD / CSR
		2. Sosialisasi Pengumpulan dan pemilahan Sampah di Tingkat RT/RW/Desa/Kecamatan						APBN / APBD / CSR



No	KEGIATAN / SUB KEGIATAN		Tahun Pelaksanaan					Sumber Pendanaan
			2025	2026	2027	2028	2029	
C	Drainase							
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam daerah Kabupaten							
		Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan						APBN / APBD / CSR
		Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase						APBN / APBD / CSR
		Rehabilitasi Saluran Drainase Tingkat kabupaten						APBN / APBD / CSR
		Pembangunan Sistem Drainase Tingkat kabupaten						APBN / APBD / CSR
		Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Sistem Drainase						APBN / APBD / CSR
		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Kabupaten						APBN / APBD / CSR

BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

JEJE RITCHIE ISMAIL

